

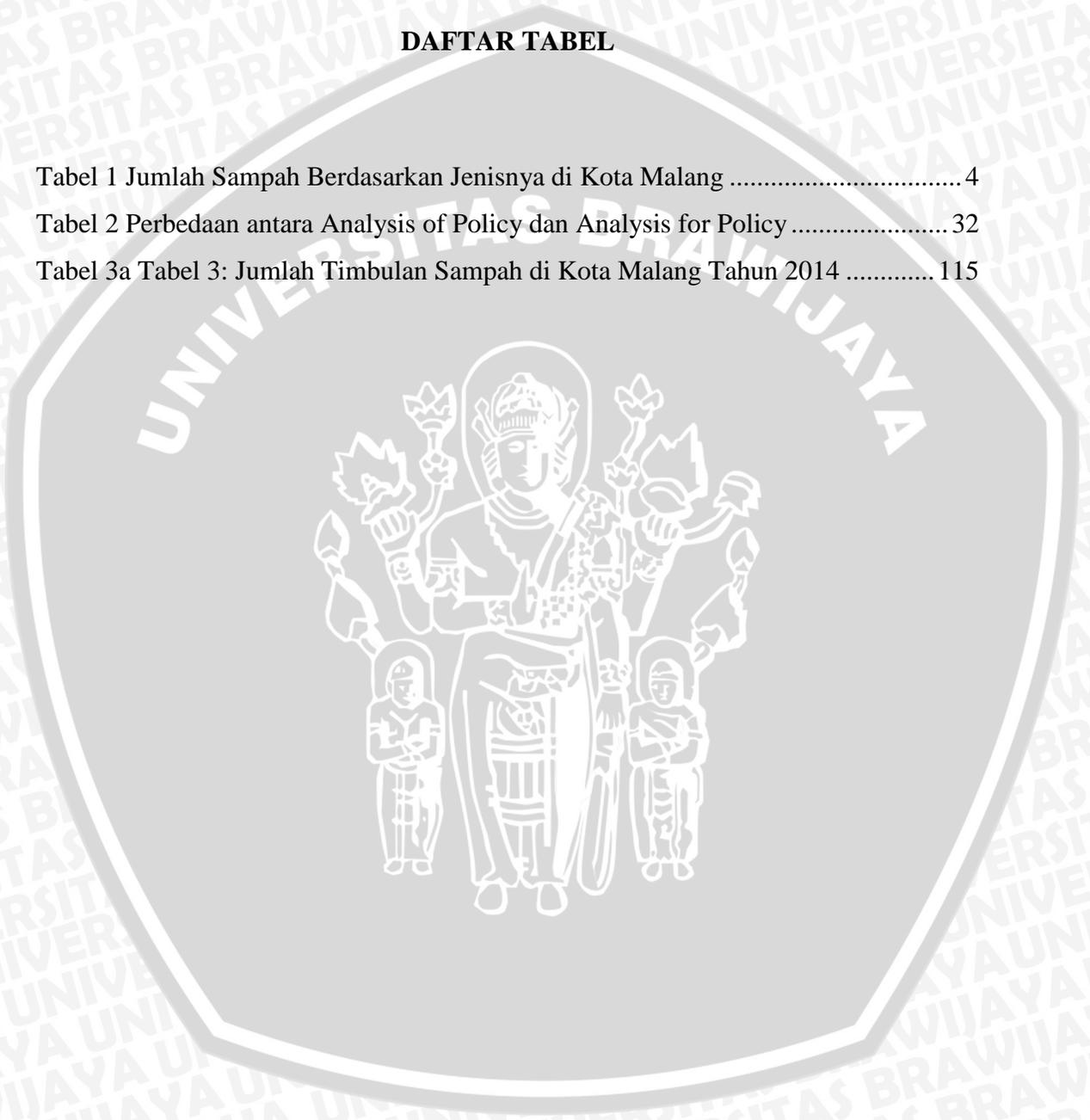
DAFTAR ISI

	Halaman
MOTO	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kebijakan Publik.....	15
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2. Model Kebijakan Publik.....	20
3. Proses Pembuatan Kebijakan.....	24
B. Analisis Kebijakan.....	30
1. Pengertian Analisis Kebijakan.....	30
2. Prosedur Analisis Kebijakan Publik.....	34
C. Skenario Kebijakan.....	38
1. Pengertian Skenario.....	38

2.	Langkah-langkah Pembuatan Skenario Kebijakan.....	41
3.	Aktor Dalam Pembuatan Skenario Planning.....	49
D.	Sampah.....	51
1.	Pengertian Sampah.....	51
2.	Jenis dan Sumber Sampah.....	52
3.	Pengelolaan Sampah.....	54
BAB III METODE PENELITIAN		59
A.	Jenis Penelitian.....	59
B.	Fokus Penelitian.....	60
C.	Lokasi dan Situs Penelitian.....	61
D.	Jenis dan Sumber Data.....	63
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	64
F.	Instrumen Penelitian.....	65
G.	Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		69
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian.....	69
1.	Gambaran Umum Kota Malang.....	69
2.	Gambaran Umum Situs Penelitian (Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).....	75
B.	Penyajian Data.....	83
1.	Potret pengelolaan sampah Kota Malang.....	83
2.	Skenario Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Malang.....	122
C.	Analisis Data.....	135
1.	Potret pengelolaan sampah Kota Malang.....	135
2.	Skenario Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Malang.....	151
BAB V PENUTUP.....		181
A.	Kesimpulan.....	181
B.	Saran.....	184
DAFTAR PUSTAKA.....		186
DAFTAR LAMPIRAN.....		188

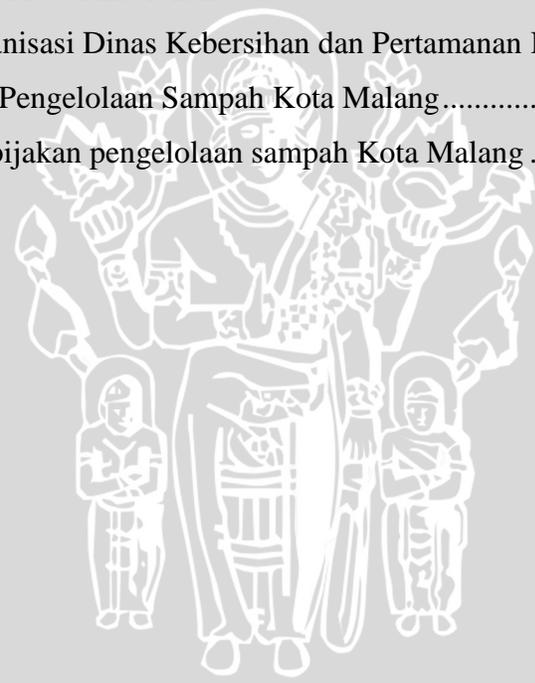
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sampah Berdasarkan Jenisnya di Kota Malang 4
Tabel 2 Perbedaan antara Analysis of Policy dan Analysis for Policy 32
Tabel 3a Tabel 3: Jumlah Timbulan Sampah di Kota Malang Tahun 2014 115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembuangan Sampah Perumahan	3
Gambar 2 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan	26
Gambar 3 Proses Kebijakan Secara Umum	28
Gambar 4 Variasi Analisis Kebijakan	31
Gambar 5 Prosedur Analisis Kebijakan	36
Gambar 6 Proses TAIDA	44
Gambar 7 WUS Model	47
Gambar 8 Analisis Data Model Interaktif	67
Gambar 9 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	79
Gambar 10 Mekanisme Pengelolaan Sampah Kota Malang	92
Gambar 11 skenario kebijakan pengelolaan sampah Kota Malang	163



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae

Lampiran 2 Surat riset/ riset di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Lampiran 3 rekomendasi pelaksanaan penelitian dari BAKESBANGPOL Kota Malang

Lampiran 4 Surat pengantar riset dari BAKESBANGPOL Kota Malang

Lampiran 5 Lembar Disposisi riset dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara belahan dunia manapun. Di Indonesia, sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Semakin tingginya jumlah penduduk dan aktivitasnya, membuat volume sampah terus meningkat. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Disamping itu, tentu saja sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai payung hukum yang mendasari pengelolaan sampah, yaitu tercantum dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya, masih dalam UU No 18 Tahun 2008 yang mengartikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-undang ini menjadi acuan dan pedoman bagi setiap daerah kabupaten/kota di diseluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

Sampah yang di kelola dalam UU No 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

- 1) Sampah rumah tangga, adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga, adalah sampah yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- 3) Sampah spesifik, adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

Dari tiga jenis sampah di atas, sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbanyak

Dalam rangka membatasi ruang lingkup penelitian, maka skripsi ini hanya akan memfokuskan pembahasan pada lingkup sampah rumah tangga. Rumah tangga umumnya menghasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton/dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Sampah tersebut dapat dibagi menjadi sampah yang mudah busuk dan tidak mudah busuk, yaitu yang dikenal sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Lebih jelasnya untuk membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik dapat dilihat pada bab 3 tinjauan pustaka.

Sampai saat ini pengelolaan sampah perkotaan yang digunakan adalah kumpul-angkut-buang, dan andalan utama sebuah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah pemusnahan dengan *landfilling* pada sebuah TPA (Damanhuri dan Padmi, 2011:3). Pengelolaan sampah di Indonesia pada umumnya belum dilaksanakan secara terpadu. Sampah dari berbagai sumber, baik dari rumah tangga, pasar, industri, dan lain-lain, langsung diangkut menuju tempat penampungan sementara (TPS) tanpa melalui pemisahan dan pengolahan. Dari TPS, sampah kemudian diangkut menuju tempat pembuangan akhir untuk kemudian ditimbun.



Gambar 1 Pembuangan Sampah Perumahan

Sumber: Diolah oleh peneliti

Pengelolaan sampah rumah tangga di kota Malang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang. Terlihat pada gambar tersebut bahwa sampah yang ada tidak ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik dari rumah tangga atau warga. Sampah tersebut hanya dikumpulkan dalam wadah yang disediakan oleh warga pada setiap rumah dan dipindahkan oleh petugas sampah dari DKP Kota Malang ke TPS, setelah itu dari TPS diangkut ke TPA Supit Urang.

Rumah tangga merupakan penghasil sampah paling banyak. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Malang tahun 2014 volume rata-rata sampah tiap bulan bervariasi pada rentang 21000 m³ sampai 28000 m³ dengan rincian sampah rumah tangga 19000 m³ hingga 25000 m³, sampah pasar 2000 m³ hingga 3000 m³ sedangkan sampah industri dan pertamanan volumenya relatif kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbanyak. Oleh karena itu pengelolaan sampah rumah tangga menjadi sorotan utama dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang mencatat bahwa tahun 2014 timbulan sampah Kota Malang 1800 m³/hari atau sekitar 607,44 ton/hari. Sampah tersebut berasal dari setiap kecamatan yang ada di kota Malang. Berdasarkan jenisnya sampah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Sampah Berdasarkan Jenisnya di Kota Malang

No	Jenis Sampah	Volume
1	Sampah Organik	1.152 m ³ /hari
2	Kertas	90 m ³ /hari
3	Plastik	450 m ³ /hari
4	Logam/Besi	18 m ³ /hari
5	Kaca	27 m ³ /hari
6	Karet	18 m ³ /hari
7	Kain	18 m ³ /hari

8	Dan lain-lain	27 m ³ /hari
Jumlah		1.800 m ³ /hari

Sumber: Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Malang (2014)

Berdasarkan dari tabel diatas, jenis sampah yang paling dominan di Kota Malang tahun 2014 berasal dari jenis sampah organik sebesar 1.152 m³/hari. Sedangkan jenis-jenis sampah yang lain jumlahnya jauh dibawah sampah organik. Sampah organik tersebut adalah sampah dapur yang sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga. Sampah organik adalah yang paling dominan, sehingga hanya dengan memilah sampah organik dan anorganik dari sumbernya yakni rumah tangga sebenarnya akan dapat mengurangi sampah yang harus dikumpulkan untuk proses lebih lanjut.

Kota Malang pada tahun 2014 tercatat memiliki 68 TPS, (Kota Malang Dalam Angka, 2014). Jumlah TPS pada tahun 2014 ada penurunan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2014, 13 dari 68 TPS yang ada di ubah menjadi TPS 3R. Pembangunan TPS 3R merupakan strategi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DKP untuk mengelolah sampah di TPS. Konsep pengelolaan sampah di TPS dengan cara mengurangi, mendaur ulang dan mengguna ulang sampah ditujukan untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk TPA.

TPA Supit Urang merupakan satu-satunya tempat pembuangan akhir yang ada di Kota Malang, yang terletak di kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang tahun 2014 mencatat bahwa setiap harinya sampah yang masuk ke TPA Supit Urang sebesar 420,48 ton. Dari volume itu 65%

merupakan sampah organik dan 35% sampah anorganik. Pengelolaan sampah di TPA Supiturang dilakukan dengan sistem *Open Dumping*, merupakan sistem pengelolaan sampah yang paling sederhana, yakni sampah hanya ditumpuk dan setelah itu dilakukan penguburan atau sistem pengurangan sampah secara terbuka dilahan TPA. Teknik *Open Dumping* menyebabkan umur TPA pendek, dan menimbulkan masalah pencemaran air dan bau pada lingkungan sekitar.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang tahun 2014 TPA Supiturang memiliki luas 15,2 Ha. Dimana luas kantor dan taman 2,75 Ha, sel aktif 3,20 Ha, sel pasif 8,25Ha dan IPLT 1,00 Ha. Melihat kondisi dari TPA Supiturang yang semakin penuh dengan tumpukan sampah, sudah seharusnya pemerintah mengganti paradigma lama dimana sampah dikumpul, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ketempat pembuangan akhir. Secara teoritik, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan dilakukan pergeseran pendekatan dari paradigma lama ke pendekatan sumber. Dengan pendekatan sumber, maka sampah akan ditangani pada hulu atau sumber sebelum sampah itu sampai ketempat pengolahan akhir atau hilir. Pada prinsipnya, pendekatan sumber menghendaki dikurangnya produk sampah yang akan dikirim ke tempat pengolahan akhir. Cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi sampah antara lain pemilahan sampah dan penerapan prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah.

Kunci utama dari pengelolaan sampah adalah masyarakat itu sendiri, pengelolaan sampah tidak bisa lepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat, misalnya bagaimana mengubah kebiasaan orang untuk tidak membuang sampah

sembarangan, memisahkan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik, serta memanfaatkan kembali sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat agar sadar lingkungan dan sampah. Sampah harus sudah dipisahkan menjadi dua bagian yaitu sampah organik/basah dan sampah anorganik/kering. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses selanjutnya karena tak perlu dilakukan pemilahan lagi, sampah langsung di proses atau di daur ulang.

Persepsi kita tentang sampah yang tidak berharga harus kita ubah menjadi sampah itu memiliki potensi *value* atau harga. Caranya dengan mengolah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, bisa dimanfaatkan kembali, dan tidak berbahaya bagi lingkungan hidup. Bahkan sampah dapat memiliki nilai artistik dengan memberinya sentuhan seni, misalnya dengan membuat karya seni dari sampah kering dan sampah elektronik yang mempunyai nilai jual. Sampah bukan sesuatu hal yang harus di jauhi. Pengelolaan sampah harus dipandang sebagai suatu kegiatan *cost recovery*. Apabila kita melakukan pengelolaan kembali sampah, maka manfaat yang didapatkan antara lain berupa sumber pendapatan, penghematan sumberdaya alam, penghematan energi, penghematan lahan TPA, dan tentunya lingkungan yang bersih dan sehat.

Penanganan sampah tidak akan tuntas hanya dengan menerapkan satu metode saja, tetapi harus dengan kombinasi dari berbagai metode, yang disebut sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sejati, 2009:41). Pengelolaan sampah terpadu dapat dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai cara pengelolaan sampah seperti daur ulang, *recycling center*, pengomposan, pembuatan kerajinan sampah, sampai dengan pembangkit listrik tenaga sampah dan energi biogas dari sampah. Pengelolaan sampah

terpadu akan menekan volume sampah yang masuk ke TPA dan memanfaatkan timbulan sampah yang ada di TPA.

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur mengalami berbagai sektor pembangunan yang sangat pesat seperti industri, mal/supermarket, tempat dan pelayanan jasa rekreasi, perkantoran, kampus, dan lain-lain. Malang selain sebagai kota pelajar, juga merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur. Semua sektor itu berdampak pada volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Walaupun demikian berdasarkan pengamatan, dapat dikatakan kondisi kota Malang masih relatif bersih dari sampah. Akan tetapi pengelolaan akhir pada sampah masih sangat jauh dari harapan, hal ini dapat dilihat pada tempat pembuangan akhir. Kurangnya pengolahan membuat volume timbulan sampah semakin besar.

Berbagai kebijakan sebagai langkah tindakan untuk mengatasi permasalahan sampah sudah dibuat oleh pemerintah kota Malang. Anderson (dalam Wahab, 2012:8) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Kebijakan yang sudah diambil oleh DKP sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dengan menerapkan tiga strategi sistem pengelolaan sampah, yaitu pada tingkat hulu, tingkat antara, dan tingkat hilir.

Pengelolaan sampah rumah tangga masuk dalam strategi pengelolaan sampah pada tingkat hulu, yaitu strategi pengelolaan sampah yang dilakukan pada sumber timbulan. Strategi pengelolaan yang dilakukan pada tingkat hulu ini salah satunya adalah Bank Sampah Malang (BSM). Bank Sampah Malang (BSM) merupakan

lembaga yang berbadan hukum koperasi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang dan CSR PT. PLN Distribusi Jawa Timur, didirikan sebagai wadah untuk membina, melatih, mendampingi sekaligus membeli dan memasarkan hasil dari kegiatan pengelolaan sampah dari hulu/sumber masyarakat Kota Malang dalam rangka pengurangan sampah di TPS/TPA dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sampah dengan program 3R (reduce, reuse dan recycle) serta perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan Kota Malang yang ber BSM, Bersih, Sejuk dan Manfaat. BSM yang didirikan pada tahun 2011 itu menurut data dari DKP pada tahun 2014 ini tercatat baru hanya memiliki nasabah sebanyak 23.000. Baru dimanfaatkan oleh sedikit masyarakat yang ada di Kota Malang.

Strategi lain yang dilakukan pada tingkat hulu adalah pembuatan kompos dan budidaya cacing dengan memanfaatkan sampah organik. Budidaya cacing keberhasilannya saat ini baru mencapai 5-10%, kerna usaha ini baru pada tahap awal. Pembuatan kompos semuanya diserahkan kepada masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan oleh DKP adalah berupa pembinaan dan pelatihan.

Dengan strategi sistem pengelolaan sampah yang diterapkan itu, Kota Malang meraih penghargaan Adipura Kencana, yaitu penghargaan dibidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah Kota Malang sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun perlu diteliti lebih lanjut bahwa strategi yang digunakan oleh DKP perlu ditingkat kan lagi, terutama pengelolaan sampah ditingkat hulu. Pengelolaan sampah pada tingkat hulu belum terlalu efektif, sampah yang berhasil diolah oleh masyarakat masih jauh dari

harapan, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya timbulan sampah yang masuk ke TPS.

Maka kerna itu kebijakan yang sudah ada perlu di analisis lebih lanjut untuk mengetahui sebab, akibat, dan kinerja kebijakan itu. Peneliti melihat bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat menggunakan skenario untuk mengatasi permasalahan tersebut. Skenario dapat membantu dalam memberikan peta jalan atau manajemen dari pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Skenario merupakan gambaran nyata mengenai kemungkinan dimasa akan datang (Lindgren dan Bandhold, 2003:26). Skenario membantu kita mengetahui apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi, dan sangat efektif untuk perencanaan. Skenario bukanlah proses meramal kondisi masa depan, tetapi berusaha untuk meletakkan kebijakan yang menghasilkan *drivers of change* bagi pembuat kebijakan untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada, seperti masalah pengelolaan sampah. Skenario akan membantu memberikan usulan dan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan mengenai metode yang tepat untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik, terukur dan komprehensif, sehingga bisa menjadi acuan tangguh dalam membuat kebijakan.

Skenario merupakan alat perencanaan strategis yang efektif untuk perencanaan jangka menengah hingga jangka panjang dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Skenario sangat membantu untuk membuat startegi, menyusun rencana untuk hal-hal yang tidak diduga serta menuntun untuk selalu berada di arah dan isu yang benar. Berangkat dari argumentasi tersebut, peneliti mencoba untuk mengangkat judul penelitian “**Skenario Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah**

Tangga Guna Menanggulangi Timbulan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”. Kemampuannya dalam mengidentifikasi lingkungan kebijakan, ketidakpastian, perubahan-perubahan dimasa depan merupakan alasan terbaik digunakannya skenario dalam penelitian ini. Karena dengan mengetahui lingkungan kebijakan yang mungkin muncul, DKP selaku perumus kebijakan tentang pengelolaan sampah dapat menyusun langkah-langkah dan strategi untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah potret pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang saat ini?
2. Bagaimanakah perumusan skenario kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian diharapkan dapat menjawab pertanyaan masalah penelitian seperti;

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis potret pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Malang saat ini.
2. Membangun skenario kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat baik secara akademis maupun praktis terhadap pembuatan kebijakan pengelolaan sampah.

Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan baru dalam cara berpikir, analisis dan mengilustrasikan kondisi pengelolaan sampah yang sebenarnya di lapangan, serta sebagai sarana latihan dalam mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis untuk memecahkan suatu permasalahan dengan metode-metode ilmiah yang logis.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi dan kajian lebih lanjut tentang skenario kebijakan, khususnya dalam pengelolaan sampah

2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Malang dalam pengelolaan sampah.
- b. Memberikan gambaran bahwa skenario kebijakan pengelolaan sampah ini penting untuk mengatasi masalah-masalah tak terduga yang akan datang dalam pengelolaan sampah.

- c. Diharapkan mampu membuka wawasan tentang pentingnya pembuatan skenario sebagai suatu alat perencanaan strategi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penelitian tentang skenario pengelolaan sampah rumah tangga kota Malang, serta juga dijelaskan mengenai rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori dan pernyataan pakar mengenai kebijakan publik, analisis kebijakan, skenario kebijakan, dan pengelolaan sampah. teori tersebut digunakan untuk memperkuat hasil analisis yang ada di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Termasuk didalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup penyajian data mengenai gambaran umum lokasi dan situs penelitian, penyajian data, serta analisis dan interpretasi data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang disertakan saran dan rekomendasi atas skenario kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga Kota Malang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini memfokuskan pada skenario kebijakan pengelolaan sampah. Dengan demikian ada tiga aspek penting yang menjadi landasan pemikiran dan bangunan konsep dalam penelitian ini, yaitu kebijakan publik, pengelolaan sampah, dan skenario kebijakan. Berbagai pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kerangka berpikir untuk membahas pertanyaan penelitian yang diajukan.

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Kebijakan publik merupakan bagian, atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Bahkan, dapat dikatakan bahwa publik adalah *melting pot* atau hasil sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial, dan kultural tempat kebijakan itu sendiri berada (Nugroho 2011:92). Senada dengan apa yang dikatakan Subarsono (2005:1) kebijakan publik merupakan bagian dari studi ilmu administrasi negara, tetapi bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi.

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick (dalam Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Selanjutnya Nugroho (2011:96) mengatakan kebijakan publik terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik.

Kebijakan (*policy*) adalah “*an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*”. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekadar *stakeholders*. Publik adalah “*a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*”. Jadi, *public policy* adalah: “*any of state or government (as the holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society)*”.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah startegi untuk mengatur

masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Agustino 2008:7) kebijakan publik adalah “apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Definisi kebijakan publik Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa

dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Senada dengan definisi Dye dan Easton, Edwards III dan Ira Sharkansky (dalam Suwitri 2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dihasilkan dari tindakan berbagai aktor yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai masalah politik maupun sosial. Sebagaimana definisi ini diperkuat oleh Agustino (2008:8) yang membuat kesimpulan dari beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik, antara lain:

- a) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
- b) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada

keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

- c) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-undangan. ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.
- d) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

- e) Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2. Model Kebijakan Publik

Model kebijakan (*Policy models*) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu, (Dunn, 2003:232). Model kebijakan dapat disajikan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematis, yang digunakan untuk menggambarkan, menerangkan dan memprediksi unsur-unsur dari suatu situasi problematis, serta untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan publik tersebut dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk mengatasi masalah tertentu. Berikut tipe-tipe model kebijakan dunn.

- a. Model Deskriptif

Atas dasar tujuannya model kebijakan dapat dibedakan antara model deskriptif dan model normatif. Model deskriptif adalah untuk menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif sering digunakan untuk memonitor outcomes dari tindakan-tindakan kebijakan.

- b. Model Normatif

Model ini selain untuk menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan, juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu manfaat tertentu.

Model kebijakan, baik deskriptif maupun normatif dapat juga dibedakan menurut bentuk ekspresinya, yaitu dapat diekspresikan dalam bentuk verbal, simbolis, dan prosedural. Dimensi lain yang penting dari model-model kebijakan berhubungan dengan asumsi mereka. Model kebijakan, lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya, dapat dipandang sebagai pengganti atau sebagai perspektif. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Sebaliknya model perspektif dipandang sebagai satu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantif.

Dalam perumusan kebijakan, Nugroho (2012:545) membagi model kebijakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok elite dan kelompok pluralis. Kelompok elite didominasi oleh elit politik, termasuk disini model institutional, proses, kelompok, elite, rasional, inkremental, dan pengamatan terpadu. Sedangkan kelompok pluralis mempercayai pada subsistem-subsistem yang ada dalam demokrasi, termasuk disini model teori permainan, pilihan publik, sistem, demokratis, strategis, deliberatif, dan model tong sampah. dijumlahkan semuanya ada tiga belas macam model perumusan kebijakan.

a. Model kelembagaan

Model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi, apa pun yang dibuat pemerintah dengan cara apa pun adalah kebijakan publik. Prosesnya mengandaikan bahwa tugas formulasi kebijakan

adalah tugas lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya.

b. Dalam model ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan.

c. Model teori kelompok

Model pengambilan kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti gagasannya adalah bahwa interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik.

d. Model teori elite

Teori ini mengembangkan diri pada kenyataan bahwa sedemokratis apa pun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan referensi politik dari para elite, tidak lebih.

e. Model teori rasionalisme

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberi manfaat optimum bagi masyarakat.

f. Model inkrementalis

Model ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan kebijakan dimasa lalu. Model ini dapat dikatakan model pragmatis/praktis.

g. Model pengamatan terpadu (*Mixed-scanning*)

Model ini ibaratkan pendekatan dengan dua kamera, kamera dengan *wide angle* untuk melihat keseluruhan dan kamera dengan *zoom* untuk melihat detailnya.

h. Model demokratis

Model demokratis dalam pengambilan keputusan menghendaki agar setiap pemilik hak demokrasi diikuti sertakan sebanyak-banyaknya.

i. Model strategis

Intinya adalah pendekatan ini menggunakan rumusan runtutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Perencanaan strategi lebih memfokuskan pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, menekankan pada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi, dan berorientasi pada tindakan.

j. Model teori permainan

Gagasan pokok kebijakan dalam teori permainan adalah pertama, formulasi kebijakan berada dalam situasi kompetisi yang intensif, dan kedua, para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independen ke dependen melainkan situasi pilihan yang sama-sama bebas atau independen.

k. Model pilihan publik

Model ini intinya melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut.

l. Model sistem

Dalam pendekatan ini dikenal tiga komponen, yaitu input, proses, dan output. Formulasi kebijakan dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik).

m. Model deliberatif

Model ini beranggapan bahwa pemerintah adalah sebuah lembaga yang muncul dari kontrak sosial di antara individu-individu warga masyarakat. Secara umum, ini adalah konsep formulasi kebijakan paling demokratis karena memberi ruang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum mengambil keputusan.

n. Model garbage can

Model ini dipopulerkan oleh John W. Kingdom. Kingdom menemukan bahwa proses pembuatan kebijakan berjalan pada tiga rel, yaitu relpermasalahn kebijakan, rel kebijakan, dan rel politik.

3. Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian beberapa ahli mungkin

membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Dunn (2003:24) menjelaskan karakteristik tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Formulasi kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keutusan peradilan, dan tindakan legislatif.

c. Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

e. Penilaian kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Sementara itu Nugroho (2011:185) menjelaskan pemahaman dasar proses kebijakan sebagai berikut:



Gambar 2 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan

Sumber: Nugroho (2011)

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut:

- a. Isu kebijakan. Disebut *isu* apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-serorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada *permasalahan yang muncul pada kehidupan publik*, dan dapat pula berorientasi pada *goal atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan*

politik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan dari pada *antisipasi ke depan* dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani.

- b. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya- termasuk pimpinan negara.
- c. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan rakyat.
- d. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- e. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
- f. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

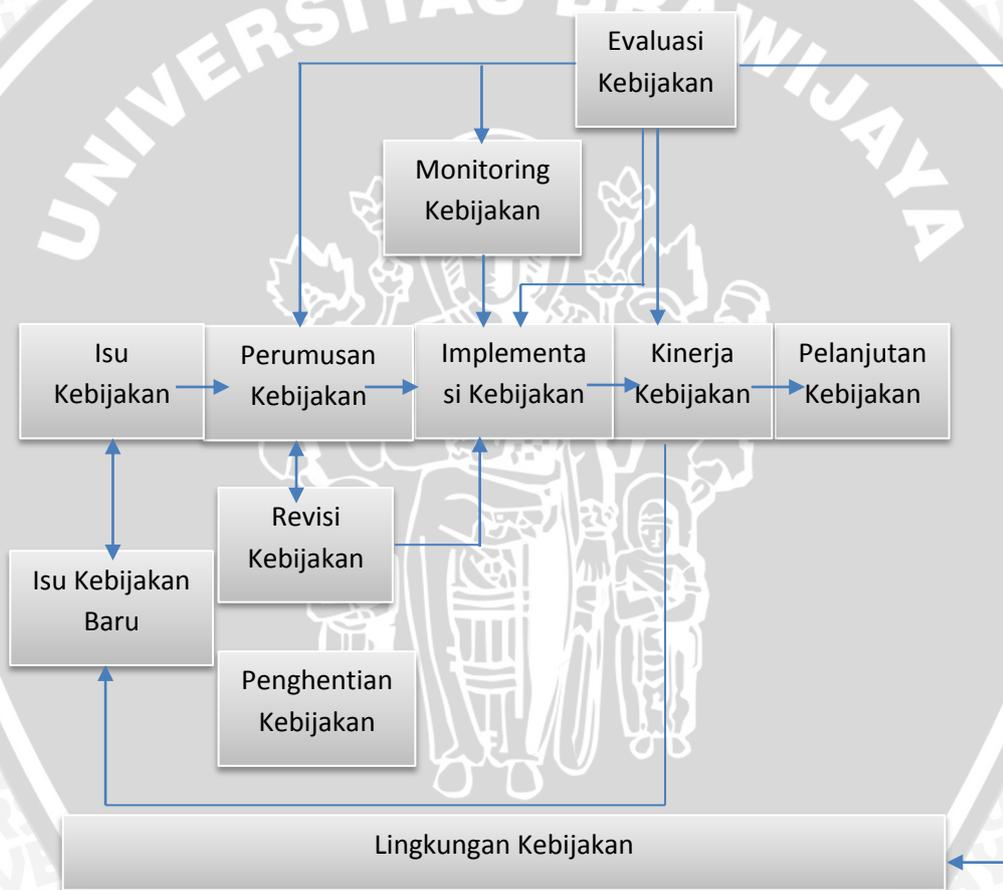
Dengan melihat skema diatas, kita melihat bahwa ada tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan
- b. Implementasi kebijakan
- c. Evaluasi kebijakan

Dan, dengan penambahan:

- d. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Pemahaman sederhana tersebut sebenarnya mempunyai bentuk yang lengkap sebagai berikut:



Gambar 3 Proses Kebijakan Secara Umum

Sumber: Riant Nugroho (2011)

Sebuah isu, baik berupa masalah bersama maupun tujuan bersama, ditetapkan sebagai suatu isu kebijakan. Dengan isu kebijakan ini, dirumuskan

dan ditetapkan kebijakan publik. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan atau implementasi kebijakan. Pada saat implementasi dilakukan pemantauan atau monitoring untuk memastikan implementasi kebijakan konsisten dengan rumusan kebijakan. Hasil implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan. Pada saat inilah diperlukan evaluasi kebijakan. Evaluasi yang pertama berkenaan dengan kinerja kebijakan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi secara paralel pada implementasi kebijakan, rumusan kebijakan, dan lingkungan tempat kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan berkinerja. Hasil evaluasi menentukan apakah kebijakan dilanjutkan ataukah membawa isu kebijakan yang baru, yang mengarah pada dua pilihan: diperbaiki atau revisi kebijakan, ataukah dihentikan, penghentian kebijakan (Nugroho 2011:187).

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, karena tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap dimana dikembangkannya sejumlah alternatif untuk menyelesaikan masalah publik. Selain itu juga dihasilkannya sejumlah usulan kebijakan yang akan diputuskan untuk diambil oleh pemerintah. Maka dapat dipahami bahwa tahap perumusan kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam menentukan sebuah kebijakan publik. suatu kebijakan yang diimplementasikan berawal dari perumusan atau pengidentifikasian masalah-masalah (issue-issue) publik. Ini merupakan proses yang cukup fundamental, dimana kesalahan dalam perumusan masalah akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah.

B. Analisis Kebijakan

1. Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan publik. Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan. Sehingga dalam hal ini penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik. Senada dengan Dunn (2003:44) yang membuat istilah analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan didalam proses kebijakan.

Lebih lanjut mengenai analisis kebijakan publik, Parsons (2008:56) mengatakan analisis mengandung tujuan dan relasi yang berbeda dengan proses kebijakan, selanjutnya menganggap jenis analisis kebijakan ini sebagai terdiri dari rangkaian aktivitas pada spektrum pengetahuan dalam proses kebijakan, pengetahuan untuk proses kebijakan, dan pengetahuan tentang proses kebijakan. Gordon *et al* (dalam Parsons 2008:56-57) secara defenitif menetapkan variasi analisis kebijakan di sepanjang sebuah kontinum, sebagai berikut:

Analisis kebijakan		Analisis untuk kebijakan		
1	2	3	4	5
Analisis determinasi kebijakan	Analisis isi kebijakan	Monitoring dan evaluasi kebijakan	Informasi untuk kebijakan	Advokasi kebijakan

Gambar 4 Variasi Analisis Kebijakan

Sumber: Gordon, *et al* (dalam Parsons 2008:57)

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut

a. Analisis kebijakan

Analisis ini mencakup:

- 1) Determinasi kebijakan: ini adalah analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan dibuat.
- 2) Isi kebijakan: analisis ini mencakup deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubungannya dengan kebijakan sebelumnya, atau analisis ini bisa juga didasari oleh informasi yang disediakan oleh kerangka nilai/teoritis yang mencoba memberikan kritik terhadap kebijakan.

b. Monitoring dan evaluasi kebijakan

Fokus analisis ini adalah mengkaji bagaimana kinerja kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan, dan apa dampak kebijakan terhadap suatu persoalan tertentu.

c. Analisis untuk kebijakan

Analisis ini mencakup:

- 1) Advokasi kebijakan: berupa riset dan argumen yang dimaksudkan untuk memengaruhi agenda kebijakan di dalam atau di luar pemerintahan.
- 2) Informasi untuk kebijakan: sebetulnya analisis yang dimaksudkan untuk memberi informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan. Ini bisa berbentuk anjuran atau riset eksternal/internal yang terperinci tentang aspek kualitatif dari suatu kebijakan.

Senada dengan apa yang dikatakan Hill (dalam Nugroho 2008:203) bahwa terdapat perbedaan antara analisis kebijakan (*analysis of policy*) dan analisis untuk kebijakan (*analysis for policy*). Perbedaannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2 Perbedaan antara *Analysis of Policy* dan *Analysis for Policy*

<i>Analysis of Policy</i>	<i>Analysis for Policy</i>
Penelitian tentang isi kebijakan	Analisis untuk merumuskan kebijakan
Penelitian tentang implementasi kebijakan	Analisis untuk memprediksi dampak kebijakan
Penelitian tentang kinerja kebijakan	Analisis untuk memperbaiki isi kebijakan
Penelitian tentang lingkungan kebijakan	Analisis untuk memperbaiki implementasi kebijakan
Penelitian tentang proses kebijakan	Analisis untuk memperbaiki proses kebijakan

Sumber: Riant Nugroho (2008)



Dilihat dari tabel diatas dapat ditarek kesimpulan bahwa penelitian kebijakan pada dasarnya dapat dilakukan baik sebelum, ketika, ataupun sesudah kebijakan diambil. Hal ini diperkuat oleh Dunn (2003:117) bahwa terdapat tiga bentuk utama analisis kebijakan, yaitu:

1) Analisis kebijakan prospektif

Produksi, dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2) Analisis kebijakan restropektif

Produksi dan transformasi sesudah tindakan-tindakan kebijakan diambil. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Analisis retrospektif merupakan yang paling penting di dalam pengaruhnya terhadap prioritas dan pemahaman intelektual, dan tidak begitu efektif dalam menawarkan solusi terhadap masalah-masalah politik yang spesifik.

3) Analisis kebijakan yang terintegrasi

Produksi dan transformasi informasi baik sebelum maupun sesudah aksi kebijakan diambil. Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh

perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Analisis kebijakan yang terintegrasi mempunyai semua kelebihan yang dimiliki oleh semua metodologi analisis prospektif dan retrospektif, tetapi tidak satupun dari kelemahan mereka. Analisis yang terintegrasi melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus sepanjang waktu.

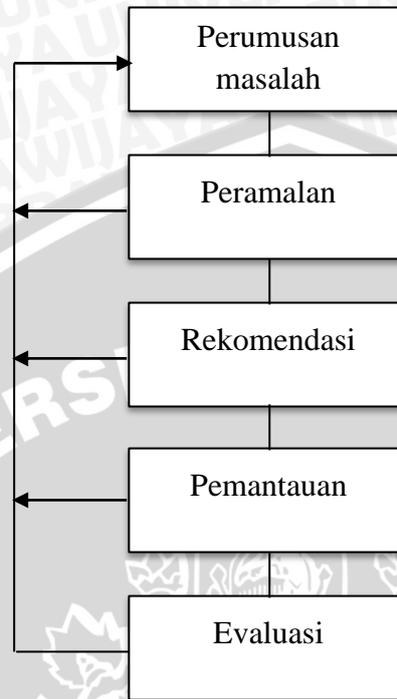
Dari paparan para ahli di atas mengenai analisis kebijakan dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Didalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan masalah-masalah serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Pada intinya analisis kebijakan menghasilkan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan untuk membuat pilihan kebijakan yang lebih baik ketimbang yang dibuat pihak lain atau yang sudah ada sebelumnya.

2. Prosedur Analisis Kebijakan Publik

Dunn (2003:20) prosedur merupakan subordinat dari standar plausibilitas dan relevansi kebijakan, dan terhadap tuntutan umum atau aturan

multiplisme kritis; peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, dan kinerja kebijakan. Selanjutnya Dunn (2003:131) mendefinisikan analisiskebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Senada dengan Dror (dalam Wahab 2012:40) yang mendefenisikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendisain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks.

Dunn dan Dror sama-sama mengatakan analisis kebijakan sebagai suatu metodologi. Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusi: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yaitu perumusan masalah (definisi), peramalan (prediksi), rekomendasi (preskripsi), pemantauan (deskripsi), dan evaluasi. Kelima prosedur analisis kebijakan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5 Prosedur Analisis Kebijakan

Sumber: William N. Dunn (2003:25)

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut:

a. Perumusan masalah

Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengistemasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan

rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuain antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai beberapa jauh masalah telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

C. Skenario Kebijakan

1. Pengertian Skenario

Lindgren dan Bandhold (2003:21) mengatakan tidak ada definisi tunggal baik skenario atau perencanaan skenario. Pemikir yang berbeda telah membuat definisi mereka sendiri tentang *scenario* dan *scenario planning*:

- 1) *An internally consistent view of what the future might turn out to be* (Michael Porter 1985).
- 2) *A tool for ordering one's perceptions about alternative future environments in which one's decision might be played out right* (Peter Schwartz 1991).

- 3) *A disciplined method for imaging possible futures in which organizational decisions may be played out* (Paul Shoemaker 1995).

Berdasarkan defenisi diatas dapat dipahami bahwa skenario merupakan alat untuk mengarahkan persepsi seseorang mengenai lingkungan masa depan yang mungkin akan terjadi dan dimana keputusan organisasi dapat dimainkan. Skenario bukanlah ramalan, dalam arti deskripsi proyeksi yang relatif tidak mengejutkan masa sekarang. Bukan pula visi, tetapi masa depan yang diinginkan. Hal ini juga jelas bahwa *scenario planning* tidak hanya tentang menulis skenario, tapi sesuatu yang lebih, sesuatu yang berhubungan lebih erat dengan perencanaan strategis. *Scenario planning* merupakan alat perencanaan strategis yang efektif untuk perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang dalam kondisi yang tidak pasti.

Sedangkan Ringland (2002:2) mendefinisikan *scenario planning* sebagai *that part of strategic planning which relates to the tools and technologies for managing the uncertainties of the future*, (bagian dari perencanaan strategis yang berkaitan dengan alat dan teknologi untuk mengelola ketidakpastian masa depan). Fahey dan Randall (2008:4) mendefinisikan skenario learning sebagai “a methodology that combines scenario development with decision making processes of strategic management” (sebuah metodologi yang mengkombinasikan pembangunan skenario dengan proses pembuatan keputusan pada manajemen strategi). Van der Heijden (2005:15) mengatakan bahwa *scenario planning* dapat pula

dipersamakan dengan *scenario learning*, *scenario planning is organisational learning*.

Studi tentang perencanaan skenario adalah studi tentang pembelajaran organisasi. Organisasi belajar melibatkan keseluruhan sistem, dengan asumsi bahwa karakteristik seluruh sistem menjadi jelas melalui interaksi dengan lingkungannya, berdasarkan pengamatan empiris Van der Heijden (2005:8). Perencanaan skenario membedakan dirinya dari pendekatan yang lebih tradisional untuk perencanaan strategis melalui pendekatan eksplisit terhadap ambiguitas dan ketidakpastian dalam pertanyaan strategis. Aspek yang paling mendasar memperkenalkan ketidakpastian dalam persamaan strategis adalah bahwa ternyata perencanaan untuk masa depan dari once-off aktivitas episodik menjadi proposisi pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam situasi ketidakpastian perencanaan menjadi pembelajaran, yang tidak pernah berhenti.

Pada konsep skenario kebijakan, peneliti lebih cenderung menggunakan teori yang dikembangkan oleh Ringland (2002:2) yang mengutip beberapa pendapat ahli seperti Michael Porter yang mengatakan skenario adalah “... *an internally consistent view of what the future might turn out to be not a forecast, but one possible future outcome*” (“...secara lebih dalam menggambarkan apa yang akan dihasilkan pada masa yang akan mendatang, namun itu bukan proses peramalan, tetapi suatu kemungkinan hasil yang akan terjadi pada masa yang akan datang”). Skenario lebih memaparkan kondisi yang rasional dan masuk akal, dimana dipaparkannya berbagai kemungkinan di masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa

skenario yang dimaksud dalam *scenario planning* maupun *scenario learning* adalah sebuah metode dalam menyusun perencanaan strategis dan sebuah proses pembelajaran dimana persepsi seseorang diarahkan untuk melihat gambaran masa depan yang mungkin akan terjadi atau masa depan yang diinginkan.

Skenario dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Skenario dapat berfungsi sebagai inspirasi untuk menghasilkan suatu ide dan kebijakan. Ringland (2002:6) lebih lanjut menyatakan penggunaan skenario dalam sektor publik bertujuan untuk:

- 1) *Imagine new customers and new political environments* (“membayangkan pelanggan dan lingkungan politik yang baru”).
- 2) *To deal with the new challenges, such as e-commerce and e government* (“untuk mempersiapkan diri dengan tantangan baru, seperti *e-commerce* dan *e government*”).
- 3) *To encourage participation and debate about the future in countries, cities and regions* (“untuk mendorong partisipasi dan diskusi mengenai masa depan dalam level negara, provinsi, dan kabupaten/kota”).

2. Langkah-langkah Pembuatan Skenario Kebijakan

Ada beberapa pendapat ahli dalam merumuskan langkah-langkah dalam melakukan suatu skenario kebijakan. Schwartz (dalam Ringland, 2002:59) mengemukakan langkah-langkah dalam pembuatan skenario adalah sebagai berikut:

a. *Identify focal issue or decision*

Mengidentifikasi isu atau masalah secara spesifik, dimana kita harus mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya.

b. *Key forces in the local environment*

Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi focal issue di masa yang akan datang.

c. *Driving forces*

Mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan *key forces* di atas. Secara umum, dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, *driving forces* yang sering sekali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor politik dan faktor ekonomi. *Driving force* merupakan alat untuk membantu faktor-faktor apa saja yang akan memberikan hasil yang signifikan dan faktor-faktor apa saja yang tidak.

d. *Rank by importance and uncertainty*

Mengklasifikasikan antara yang penting dan yang tidak penting. Di dalam langkah ini, kita harus mencoba mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan *driving forces* di atas (sosial, lingkungan, teknologi, politik, dan ekonomi).

e. *Selecting the scenario logics*

Menetapkan logika skenario untuk memilih beberapa skenario yang relevan.

f. *Fleshing out the scenario*

Tahap ini merupakan tahap penguatan scenario. Pada tahap ini, perumus skenario dapat menambahkan berbagai data sekunder dan trennya untuk memperkuat berbagai pendapat dari narasumber dan para ahli yang sudah didapat dan ditulis pada tahap sebelumnya.

g. *Implication for strategy*

Implikasi dari sebuah strategi. Setelah suatu skenario dikembangkan secara mendetail, perlu dilihat kembali langkah pertama, yakni fokus masalah. Hal yang dilakukan adalah melihat bagaimana suatu keputusan akan terlihat dari setiap skenario yang akan dibangun, apakah hanya terlihat tepat dalam satu atau dua skenario.

h. *Selecting of leading indicators and signposts*

Memilih indikator atau petunjuk yang paling menonjol. Indikator yang realistis dan dapat diandalkan seperti apa yang akan digunakan untuk memantau rencana.

i. *Feed the scenarios back to those consuled* (Memasukan skenario kembali untuk dikonsultasikan ulang)

j. *Discuss the startegic options* (mendiskusiakn pilihan-pilihan strategi)

k. *Agree the implementation plan* (penyetujuan pelaksanaan rencana)

l. *Publize the scenarios* (publikasi skenario)

Selain itu, Lindgren dan Banhold (2003:47) juga menggunakan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penyusunan skenario kebijakan, yang mereka namakan sebagai TAIDA (*Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, and Acting*).



Gambar 6 Proses TAIDA

Sumber: Lindgern dan Bandhold (2003)

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut:

a. *Tracking*

Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menelusuri dan menggambarkan perubahan di dunia sekitarnya yang mungkin berdampak pada pertanyaan fokus. Dalam *tracking* dilakukan penelusuran perubahan dan tanda-tanda keberadaan tantangan dan peluang, selain juga mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. *Tracking* adalah tentang menemukan tren, driver dan ketidakpastian yang perlu dipertimbangkan dalam pekerjaan, karena mereka mempengaruhi masa depan dari pembuatan skenario. Tren yang dimaksud disini adalah sesuatu yang merupakan perubahan yang lebih dalam, bukan sekedar iseng saja. Tren dapat ditemukan dalam pengetahuan orang-orang dalam organisasi melalui brainstorming misalnya, dengan melakukan scan media, pencarian di internet,

jaringan proesinal, dan metode delphi yang dikemukakan oleh Lindgren dan Bandhold.

b. *Analyzing*

Pada tahap ini dilakukakan analisis mengenai konsekuensi yang dapat muncul akibat keberadaan tantangan dan peluang. *The analyzing phase is about identifying drivers and consequences in order to understand how the identified trends interact* (Lindgren dan Bandhold 2003:60). Pada tahap ini logika skenario mulai dikembangkan. Jika dalam tahap *tracking* telah dilakukan pengidentifikasian mengenai perubahan, penemuan pola, kecenderungan, ancaman dan peluang, tahap *analyzing* merupakan tahap menemukan konsekuensi yang terjadi terhadap masa depan dengan melihat kondisi atau perubahan di masa sekarang. Tahap *analyzing* termasuk tahap lebih jauh dari apa yang disebut pelacakan atau *tracking*. Tahap *analyzing* juga dapat bertujuan menggali lebih dalam kreatifitas dan intuitif yang dihasilkan dalam pembentukan model dan visi skenario.

c. *Imaging*

Tahap *imaging* merupakan tahap identifikasi kemungkinan dan membangun visi mengenai apa yang diharapkan. Visi adalah gagasan positif yang dimuat dari masa depan yang diinginkan. Collins dan Porras (dalam Lindgren dan Bandhold, 2003:76) mengidentifikasi visi sebagai bayangan masa depan yang terdiri dari dua bagian. Pertama sebagai “*Big Hairy Audacious 10 to 30 year Goal*” (BHAG), Sebuah BHAG jelas bukan tujuan jangka pendek; mungkin diperlukan waktu

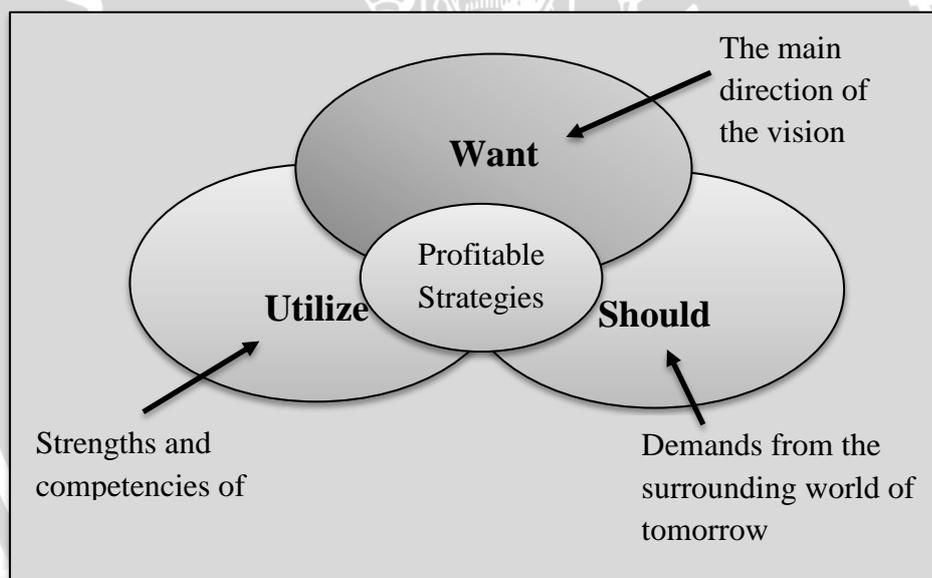
hingga puluhan tahun untuk mencapainya. Ini juga akan menjadi nyata, sangat memotivasi, terfokus dan begitu jelas bahwa hal itu tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kedua, sebagai deskripsi yang jelas tentang apa yang akan terjadi ketika tujuan tercapai.

d. *Deciding*

Deciding adalah fase di mana semuanya disatukan. Keadaan masa depan ditelusuri dan dianalisis berdasarkan visi. Pada tahap ini dilakukan pengambilan keputusan mengenai skenario apa yang akan diambil sebagai alternative kebijakan dan strategi apa yang digunakan untuk menghadapi ancaman dan mencapai *vision* dan *goals*. tentunya dalam hal ini kita harus mengambil strategi baru untuk mendukung skenario tersebut, Lindgren dan Bandhold mengatakan jika kita ingin menemukan strategi baru kita harus meninggalkan pemikiran top-down dan mulai berpikir bottom-up . Ini berarti bahwa kita harus mulai dengan ide-ide kecil untuk mencari solusi , dan dari titik awal membangun teka-teki sampai menunjukkan pola-pola baru . Pola-pola ini dapat menjadi embrio dari strategi baru . Ide-ide tersebut bisa datang dari berbagai sumber, sehingga para pembuat kebijakan harus teliti dalam mengambil ide sesuai dengan kecenderungan kondisi masa depan dan analisi skenario. Strategi bisa datang dari kecendrungan yang diidentifikasi selama tahap penelusuran, skenario, sumberdaya organisasi, visi, atau dari pengumpulan ide yang ada.

Lindgren dan Bandhold (2003:86) mengemukakan analisis untuk menentukan strategi, yaitu analisis WUS; analisis dampak-tunggal yang berhubungan dengan tiga dimensi (*Want*, *Utilize*, dan *Should*). Analisis ini akan memberi jawaban yang cukup cepat untuk tiga pertanyaan.

- 1) Apakah strategi sudah dikonstruksikan pada tujuan yang diinginkan organisasi (*Want*)?
- 2) Apakah hal ini berguna bagi kekuatan yang ada saat ini atau aset organisasi (*Utilize*)?
- 3) Apakah hal itu sesuai dengan lingkungan masa depan (*Should*)?



Gambar 7 WUS Model

Sumber: Lindgren and Bandhold (2003)

e. *Acting*

'Acting' dapat memiliki dua arti yang berbeda dalam proses perencanaan skenario. Pertama adalah menempatkan strategi yang telah diputuskan ke dalam tindakan. Kedua berkaitan tindak lanjut

yang berkesinambungan dari proses perencanaan skenario seperti memantau perubahan lingkungan, mendefinisikan proses untuk pemindaian lingkungan berkelanjutan, perencanaan skenario dan sebagainya. Tahap ini merupakan tahap implementasi strategi yang telah mengintegrasikan skenario sekaligus tahap pembelajaran organisasi atau institusi untuk terus menyesuaikan diri.

Melihat pendapat para ahli dalam merumuskan langkah-langkah dalam melakukan skenario, pada dasarnya perbedaan yang ada hanya pada penamaan semata. Dapat dipahami bahwa proses skenario selalu dimulai dengan mengenali kondisi internal dan terutama lingkungan luar organisasi, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat menjadi pendorong perubahan organisasi, untuk selanjutnya faktor-faktor tersebut digunakan untuk membangun logika skenario. Logika skenario yang terbangun memerlukan deskripsi naratif, terutama mengenai konsekuensi yang dihadapi masing-masing alur. Setelah memahami masing-masing alur dalam skenario, maka dilakukan pemilihan alur skenario terbaik dan penyusunan strategi guna mencapainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk skenario kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga kota Malang yang pada akhirnya membentuk strategi kebijakan ke depan. Skenario juga merupakan proses pembelajaran, oleh karena itu tujuannya adalah mencapai perubahan dengan adanya paradigma baru. Setelah menentukan tujuan dari skenario, maka langkah selanjutnya adalah membangun skenario. Dalam membangun skenario, peneliti akan menggunakan langkah dari Lindgrend dan banhold.

Peneliti menilai alur skenario yang dibuat oleh Lindgrend dan banhold lebih cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini.

Lindgrend dan banhold memaparkan lima langkah dalam pembuatan skenario yang disebut dengan TAIDA, sedangkan Schwartz dalam Ringland mengemukakan dua belas langkah dalam pembuatan skenario. Peneliti menilai kedua langkah tersebut memiliki tujuan dan makna yang sama, hanya saja Lindgrend dan banhold lebih menyederhanakan langkah tersebut dengan penamaan yang lebih mudah dimengerti. Seperti pada tahap *tracking*, merupakan penggabungan *Identify focal issue or decision, Key forces in the local environment Driving forces* dari langkah yang dikemukakan oleh Schwartz.

3. Aktor Dalam Pembuatan Skenario Planning

Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa *Scenario* merupakan alat perencanaan strategis yang efektif untuk perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang dalam kondisi yang tidak pasti. Perencanaan (Planning) diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam setiap jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan dimasyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa melakukannya”.

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Hani Handoko, 2011:77-78). Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan.

Van Der Heijden (2005:136) mengatakan bahwa perencana skenario atau aktor perencana adalah orang (atau sekelompok orang) yang terlibat dalam *promoting and facilitating the learning process*. Ini bisa siapa saja dalam organisasi, seorang staf yang berdedikasi, anggota dari tim manajemen atau CEO dari organisasi itu sendiri. Atau bisa juga konsultan dari luar yang dibawa untuk acara ini.

Aktor lain yang Van Der Heijden sebut klien. Ini adalah individu atau sekelompok orang berjuang dengan pertanyaan strategi itu sendiri dan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari pemikiran seperti itu berkembang. Biasanya itu bisa menjadi tim manajemen yang tertarik dalam memahami lebih baik perkembangan di dunia luar, dengan tujuan meninjau dorong strategis umum organisasi. Atau bisa menjadi tim yang mencoba untuk mengembangkan proyek tertentu penting dan strategis. Perencana skenario dan klien harus bekerja sama untuk dapat menunjukkan jalan dengan menetapkan agenda skenario. Hal ini dapat dilakukan atas dasar pengetahuan intuitif klien, dibawa ke permukaan oleh perencana skenario melalui penerapan teknik elisitasi.

Handoko (2011) mengatakan ada tiga tingkatan aktor perencana dalam organisasi.

- 1) Manajer puncak (Presiden, direktur, wakil direktur, manajer umum, kepala atau manajer divisi), bertugas merencanakan kegiatan dan strategi organisasi secara umum dan mengarahkan jalannya organisasi.
- 2) Manajer tingkat menengah (kepala bagian), mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya.
- 3) Manajer lini-pertama (pimpinan kelompok), dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses mengimplementasikan kebijaksanaan, penugasan kerja dan metoda kerja baru.

D. Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah, sesuatu yang bisa kita lihat kapan dan dimana pun kita berada. Namun, apakah arti sebenarnya dari sampah itu? Basriyanta (2007:17) menuliskan beberapa definisi sampah menurut para ahli, diantaranya:

- 1) Kamus lingkungan (1994), sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, materi berlebihan atau buangan.

- 2) Tanjung, Dr.M.sc., sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula.
- 3) Radyastuti, W. Prof.Ir. (1996), sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

Sampah memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya sampah merupakan material atau bahan sisa yang terbuang atau dibuang dari sumber aktifitas manusia maupun proses alam. Namun, yang pasti hingga saat ini masih beredar anggapan bahwa sampah merupakan barang sisa yang sudah tidak berguna lagi dan harus dibuang. Padahal sebetulnya sampah merupakan mutiara terpendam yang akan memancarkan kilaunya kalau dikelola secara tepat. Hal ini diperkuat oleh Basriyanta (2007:18) yang mengatakan sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar.

2. Jenis dan Sumber Sampah

Bila dilihat dari sumbernya, maka sampah yang dikelola oleh pemerintah kota di Indonesia biasanya dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Dalam UU-18/2008 tentang pengelolaan sampah, kelompok tersebut dibedakan menjadi: sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

a. Sampah rumah tangga

Merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga. Dari kelompok sumber ini umumnya dihasilkan

sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton/dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Merupakan sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah spesifik

Merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, sampah yang timbul akibat bencana, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul tidak secara periodik.

Selanjutnya tentang jenis sampah, Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut (Basriyanta, 2007:18):

a. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan

bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

b. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

3. Pengelolaan Sampah

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai payung hukum yang mendasari pengelolaan sampah, yaitu tertuang dalam Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengertian pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti

bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan sampah tersebut. Damanhuri dan Padmi (2011:49) mengatakan bahwa menurut Undang-undang no.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terdapat dua kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu:

a. Pengurangan sampah

UU-18/2008 ini menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (*treatment*) maupun pengurangan (*landfilling*). Pengurangan sampah menurut UU-18/2008 dapat dilakukan melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*).

1). *Reduce*: mengupayakan agar sampah yang dihasilkan sesedikit mungkin.

2). *Reuse*: bila sampah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan sampah tersebut secara langsung.

3). *Recycle*: sampah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai energi.

b. Penanganan sampah

Penanganan sampah merupakan langkah lanjut untuk menangani sampah yang berasal dari kegiatan hierarhi sebelumnya, yaitu

pengurangan sampah. Aktivitas ini merupakan prosedur baku yang dikenal sebagai teknik operasional pengelolaan sampah dalam pengelolaan sampah di Indonesia, yang terdiri dari:

1) Pewadahan

Merupakan langkah awal yang harus dilakukan setelah sampah terbentuk, yaitu menyiapkan wadah yang sesuai dengan karakter sampah, termasuk pemberian warna yang berbeda serta penempatan yang sesuai dengan peran dan fungsinya. Pola pewadahan dikelompokkan menjadi dua. Pertama pola pewadahan individual, diperuntukan bagi daerah pemukiman berpenghasilan tinggi dan daerah komersial. Kedua pola pewadahan komunal, diperuntukan bagi daerah pemukiman sedang/kumuh, taman kota, jalan, pasar.

2) Pengumpulan

Kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Subsistem pengumpulan sampah mengenal beberapa pola, yang sering disebut adalah pola individual dan pola komunal, dengan penjelasan:

a) Pola individual

Pada pola ini dilakukan pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut jarak pendek

seperti gerobak atau yang lainnya untuk diangkut ke sub-sistem pemindahan penampungan sementara.

b) Pola komunal

Pada pola ini pengumpulan sampah dari beberapa rumah dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah, menuju ke sebuah titik yang bersifat komunal.

3) Pemindahan dan pengangkutan

Kegiatan penanganan sampah yang membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, baik yang dilakukan oleh swadaya penghasil sampah maupun pemerintah kota. Titik terjadi perpindahan dari pengumpulan ke pengangkutan disebut pemindahan.

4) Pengolahan

Kegiatan yang dilakukan untuk mengubah atau mentransformasikan karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar lebih mudah ditangani, atau lebih aman bilamana akan dikembalikan ke lingkungan.

5) Pemrosesan akhir

Kegiatan akhir yang dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian. Oleh karena itu penentuan metode yang digunakan merupakan langkah penting dalam suatu penelitian, karena setiap masalah yang diteliti memerlukan metode yang sesuai agar dapat diperoleh hasil penelitian yang valid dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Sugiyono (2011:2) mengatakan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam bab ini berisi rumusan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Meleong (2012:4) mengatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini memiliki tujuan menggambarkan suatu fenomena sosial. Dipertegas oleh Nasir (2005:63) bahwa metode deskriptif

merupakan metode yang meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung (Sukmadinata, 2006:72). Dengan menggunakan metode dan jenis penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan penulis dapat menggambarkan dan mendeskripsikan secara faktual dan akurat mengenai fenomena sosial, yakni gambaran atau potret kebijakan pengelolaan sampah kota Malang yang ada saat ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang diteliti tidak melebar dan terlalu luas dari konteks yang diteliti. Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Penentuan fokus penelitian secara efektif dapat membantu tercapainya tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Potret kebijakan pengelolaan sampah saat ini dilihat dari:
 - a. Program-program apa saja yang telah dilakukan DKP dalam pengelolaan sampah.
 - b. Teknik operasional pengelolaan sampah
 - c. Dampak dari program-program yang sudah dilaksanakn DKP dalam pengelolaan sampah.
2. Skenario kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dilihat dari langkah-langkah:
 - a. *Tracking*; mengidentifikasi tren, *focal issue* (pemasalahan utama), *constraints* (kendala), dan *driving forces* (kekuatan pendorong yang akan mempengaruhi masa depan).
 - b. *Analysing*; menganalisis perubahan dan membangun skenario.
 - c. *Imaging*; membuat gambaran masa depan yang di inginkan.
 - d. *Deciding*, tahap pengambilan keputusan dan strategi
 - e. *Acting*, pengambilan langkah sebagai sebuah tindakan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti disini adalah ruang atau tempat untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Malang, Jawa Timur. Alasan pemilihan Kota Malang sebagai lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan, karena Kota Malang merupakan kota terbesar ke dua di Jawa Timur dan dianggap sebagai kota pelajar dan kota tujuan wisata. Hal ini

menyebabkan melonjaknya jumlah penduduk kota Malang setiap tahunnya, sehingga Kota Malang mengalami berbagai sektor pembangunan yang sangat pesat seperti industri, hotel, mal/supermarket, tempat dan pelayanan jasa rekreasi, perkantoran, kampus, dan lain-lain. Semua sektor itu berdampak pada volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Padatnya penduduk dan pesatnya pembangunan disuatu kota akan berdampak buruk pada lingkungan sekitarnya, kerna besar dan beragamnya jenis limbah yang dihasilkan. Selain itu Kota Malang tahun 2014 ini meraih penghargaan Adipura Kencana, yaitu penghargaan di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kota Malang juga dijadikan *pilot project* Nasional pusat energi ramah lingkungan dalam program Provinsi Jawa Timur. Kota Malang dipilih karena pusat energi yang diadopsi dari teknologi Jerman menggunakan material limbah, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, limbah rumah sakit, hingga limbah industri kecil menengah.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan atau fenomena sesungguhnya dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Bank Samah Malang (BSM), dan TPA Supiturang. Alasan pemilihan situs penelitian tersebut dikarenakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Bank Samah Malang (BSM), dan TPA Supiturang adalah institusi dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Idrus (2009:37) data merupakan bahan atau keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan memberikan keterangan yang dapat berupa catatan dalam bentuk buku atau file. Sumber data menurut derajat sumbernya dapat dibagi menjadi (Indrus, 2009:38):

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat dan pihak yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Data sekunder dapat diperoleh dari koran, internet, dokumen-dokumen lain yang relevan dengan fenomena yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari manakah data tersebut diperoleh atau didapatkan. Sumber data dapat berupa informan dan didukung dengan dokumen yang berupa data tertulis. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Informan

Informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Idrus, 2009:40). Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terdapat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang untuk memperoleh data mengenai kebijakan pengelolaan sampah saat ini.

b. Dokumen

Dokumen yang digunakan adalah yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian. Dokumen ini diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

c. Peristiwa

Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah temuan-temuan langsung oleh peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data (Arikunto, 2006:134). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak melalui tanya jawab, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Pewawancara disini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber sabagai terwawancara untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan data yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan dilapangan dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk mengetahui segala peristiwa yang terjadi di dalam lokasi penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh data sekunder daerah penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau menggunakan laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan obyek penelitian, guna mendukung data yang ada.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam proses data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat dan lengkap serta sistematis sehingga mudah di olah (Arikunto, 2006:150). Dengan kata lain, instrumen penelitian merupakan alat untuk membantu

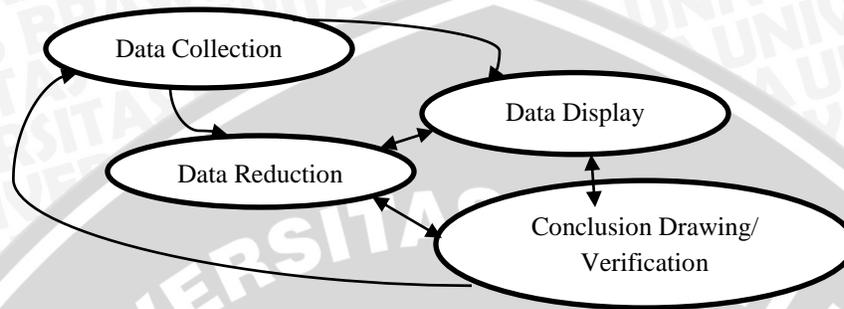
peneliti dalam menggali data dan informasi pada saat penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpul data utama, karena peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.
2. Pedoman wawancara, merupakan kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian. Hal ini berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pencarian data supaya tidak terjebak oleh data-data yang kurang mendukung dan kurang valid pada saat wawancara pencarian data dilakukan.
3. Catatan lapangan, merupakan catatan kecil selama berada dilapangan untuk mencatat semua informasi dari apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam pengumpulan data dilapangan.
4. Perangkat penunjang, meliputi alat tulis menulis untuk membantu dalam hal pencatatan hal-hal penting dilapangan, serta alat perekam untuk mendokumentasikan informasi dan data yang ditemui dilapangan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau thema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendetail dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan, dan

pada akhirnya dapat menjawab masalah yang diangkat dalam perumusan masalah. Oleh karena itu metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Model Interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari:



Gambar 8 Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Sugiyono (2011:247)

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan dan Verifikasi)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Dan ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih ter arah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Keadaan Geografis

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada periode 2013-2018 ini Kota Malang dipimpin oleh Walikota H. Muhammad Anton dan Wakil Walikota Drs. Sutiaji. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Sebagai kota pelajar, Kota Malang memiliki penduduk tidak tetap sebesar 300.000 jiwa pertahun, sedangkan Jumlah penduduk tetap pada tahun 2012 sebesar 895.338 jiwa.

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang.
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km² yang terbagi dalam lima kecamatan, yaitu; Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Belimbing, dan Lowokwaru. Terdiri dari 57 Kelurahan, 505 RW dan 3.649 RT.

b. Visi dan Misi Kota Malang

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. Visi Kota Malang adalah “ Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”.

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-

keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: BERSih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Visi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah terdapat pada akronim bersih dan asri. Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, terutama visi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sampah maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.

Misi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mengembangkan potensi Kota Malang, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Diharapkan, semakin tumbuh dan berkembangnya lapangan pekerjaan baru yang berkembang dari pengelolaan potensi daerah. Investasi-investasi bisnis distimulasi dan pemanfaatannya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya. Misi ini juga memperhatikan potensi daerah yang berupa sumber daya manusia. Predikat sebagai Kota Pendidikan memiliki makna bahwa Kota Malang memiliki sumber daya manusia terdidik yang melimpah ruah yang siap untuk dikembangkan, tidak saja untuk mendukung pembangunan kota, namun juga untuk meningkatkan prestasi yang membanggakan Kota Malang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Misi ini juga menekankan perlunya strategi pembangunan daerah yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Ke depan, diharapkan tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran lingkungan, disertai dengan meningkatnya luas lahan yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kawasan resapan air sebagai pencegahan terhadap

bencana banjir. Strategi implementasi dari misi ini antara lain berupa penataan industri dan kawasan industri.

- 2) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.

Misi ini mendorong untuk ditumbuhkannya rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan, melalui keamanan, kenyamanan, dan keasrian Kota Malang. Kesan negatif terhadap keamanan kota, semacam tindakan kriminalitas akan ditangani dengan serius. Melalui misi ini, upaya-upaya serius akan dilakukan agar berbagai persoalan yang membuat wisatawan tidak nyaman, semacam: kemacetan, tumpukan sampah, dan banjir, dapat diatasi dengan baik.

- 3) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan.

Misi ini juga mengarahkan pada peningkatan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kebersihan serta keasrian kota, utamanya oleh pelaku usaha industri berskala besar. Pendirian dan pengoperasian pabrik industri harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan kota. Pemerintah Kota Malang harus melakukan kontrol yang kuat terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kalangan industri.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian (Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
- 2) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
- 3) pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi

Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.

- 4) Pelaksanaan fasilitasi dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
- 5) Pelaksanaan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
- 6) Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga Bank Sampah dan lembaga pengolah sampah lainnya;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap kader lingkungan dan organisasi masyarakat lainnya di bidang pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup;
- 8) pemberian pertimbangan teknis perizinan dan pencabutnya di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan Lumpur Tinja;
- 9) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

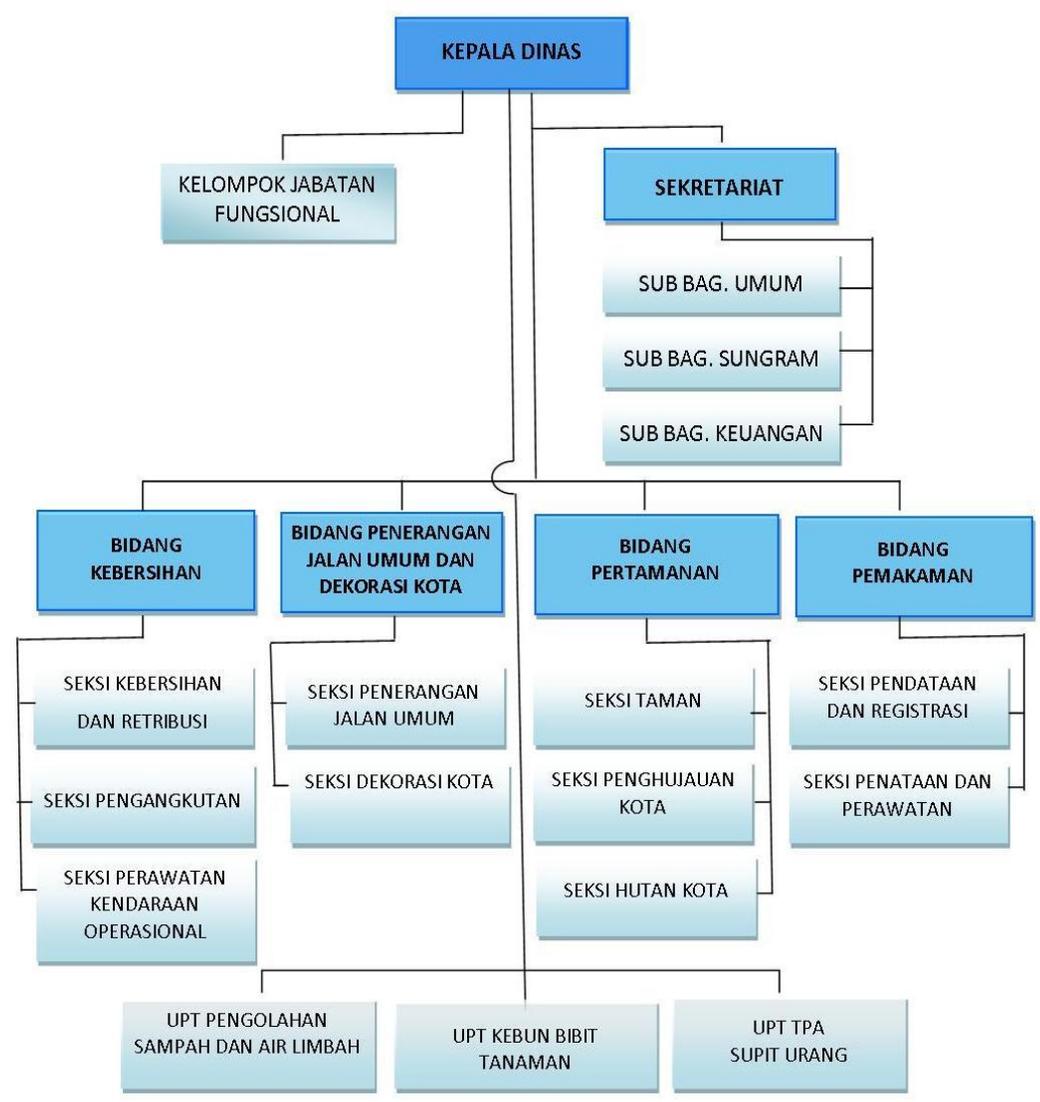
- 10) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 11) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 12) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 13) pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- 14) pelaksanaan pemungutan penerimaan retribusi daerah;
- 15) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 16) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 17) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 18) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 19) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakamandan penanganan lumpur tinja;
- 20) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

- 21) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 22) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 23) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

b. Kepegawaian dan Struktur Organisasi

Jumlah pegawai yang ada pada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang (Mei 2014) sebanyak 1188 orang. Kondisi aparatur berdasarkan golongan ruang; Golongan IV 5 orang, Golongan III 41 orang, Golongan II 334 orang, Golongan I 664 orang, dan PTT 164 orang. Terbagi dalam beberapa unit kerja;

- 1) Sekretariat, 49 Orang
- 2) Bidang kebersihan, 840 orang
- 3) Bidang PJU dan DK, 21 orang
- 4) Bidang pertamanan, 114 orang
- 5) Bidang pemakaman, 52 orang
- 6) UPT PSAL, 69 orang
- 7) UPT kebun bibit tanaman, 16 orang
- 8) UPT TPA, 27 orang



Gambar 9 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang:2014

c. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang adalah Mewujudkan Kota Malang sebagai kota yang bersih, nyaman, asri, dan ijo royo-royo menuju malang berkicau.

Pokok – pokok visi adalah sebagai berikut :

1) Bersih

- a. Terpeliharanya kebersihan jalan dan lingkungan, yang dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Tereduksinya timbulan sampah melalui penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat hulu atau rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. Terkelolanya sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai prinsip-prinsip sanitasi lingkungan yang baik dengan menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- d. Terkelolanya air limbah rumah tangga dan lumpur tinja secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

2) Nyaman

- a. Tersedianya penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menciptakan kenyamanan pengguna jalan dan laju perekonomian serta optimalisasi tampilan keindahan kota di malam hari;

- b. Tersedianya dekorasi dan ornamen kota yang menarik, semarak dan memadai dalam rangka penguatan karakter Kota Malang dengan memperhatikan nilai-nilai lokal;
 - c. Terlaksananya pelayanan pemakaman yang memudahkan masyarakat dan pemeliharaan lahan makam secara optimal dalam rangka mewujudkan kondisi pemakaman yang tertata.
- 3) Asri
- a. Tersedia dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang turut difungsikan sebagai taman kota, hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijauan lainnya;
 - b. Tersedianya daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Terciptanya lingkungan yang indah, teduh, sejuk dan segar selaras dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan.
- 4) Ijo Royo-royo
- a. Terwujudnya kondisi Kota Malang dengan keanekaragaman vegetasi/tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang melalui pemanfaatan dan pengoptimalan ruang-ruang publik yang tersedia sebagai pensuplai oksigen dan pengikat gas karbon;
 - b. Tumbuhnya kesadaran segenap elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan penganekaragaman tanaman di ruang-ruang privat sebagai upaya mendukung penghijauan kota dan pelestarian lingkungan.

5) Malang Berkicau

Merupakan gambaran kondisi lingkungan yang ideal dan sangat didambakan, yang terbangun setelah terwujudnya kondisi lingkungan yang bersih, asri, nyaman dan ijo-royo-royo, ditandai dengan hidup dan berkembangnya berbagai jenis hewan dalam ekosistem yang terlestari. Kata “BERKICAU” terinspirasi dan dijiwai dari kicauan burung yang menandai bahwa suatu lingkungan sangat nyaman untuk ditinggali, tidak hanya oleh manusia namun bahkan oleh burung, sehingga menunjukkan bahwa manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut telah terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya.

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, menerapkan pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan menambah pendapatan, dan mengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aktif, serta menjaga ketersediaan daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan suasana yang rindang, teduh dan sejuk;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota yang hemat energi dan berwawasan

- lingkungan, untuk mendukung kenyamanan, keselamatan pengguna jalan dan laju perekonomian di malam hari, serta memperindah tampilan kota melalui penguatan karakter kawasan;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemakaman pada persediaan makam, pendataan dan perijinan, sarana dan prasarana yang memadai untuk menuju kenyamanan, keamanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Malang yang meninggal dunia;
 - 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah rumah tangga dan lumpur tinja dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan;
 - 6) Meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan.

B. Penyajian Data

1. Potret pengelolaan sampah Kota Malang

a. Program-program pengelolaan sampah Kota Malang

Berdasarkan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah kota berkomitmen menuangkan dalam kebijakan menjadikan Kota Malang yang clean and green, sehingga pemerintah kota akan melanjutkan dan mengembangkan program ini. Dalam penanganan masalah sampah yang menyeluruh dari hulu hingga hilir, pemerintah kota mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- 1) Di tingkat hulu, pemerintah kota mendirikan BSM, kompos yang dibuat oleh masyarakat akan dibeli oleh DKP, kemudian saat ini pun sedang dikembangkan budidaya cacing, dan diadakan berbagai lomba kebersihan.
- 2) Di tingkat antara/TPS, dari 73 TPS yang ada, pemerintah kota mendampingi 12 TPS, rumah-rumah kompos, dan mengadakan pembinaan bagi para pemulung.
- 3) Di tingkat hilir, mulai tahun 2012 pemerintah kota secara swakelola telah memanfaatkan penangkapan gas metan yang dihasilkan oleh timbunan sampah di TPA Siputurang. Pemanfaatan gas metan ini telah disalurkan ke 300 KK menggantikan fungsi gas elpiji di sekitar TPA Siputurang, bahkan ada yang memanfaatkannya untuk usaha tambal ban. DKP sedang melakukan uji coba memasukkan gas metan ke tabung gas dan sebagai sumber bahan bakar motor.

1) Tingkat hulu

Pengelolaan sampah tingkat hulu adalah strategi pengelolaan sampah yang dilakukan pada sumber timbulan sampah yaitu pada tingkat rumah tangga. Pada tahap ini rumah tangga berperan dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan cara pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang (DKP) dengan masyarakat atau rumah tangga sebagai penghasil sampah akan membuat pengelolaan sampah akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Berikut adalah strategi yang dilakukan ditingkat hulu:

a) Bank Sampah Malang (BSM)

Bank Sampah Malang atau disingkat BSM di dirikan pada tanggal 26 Juli 2011 dengan bentuk kelembagaan koperasi. BSM diaktekan ke Notaris pada tanggal 12 Agustus 2011 dan mendapat pengesahan dari Walikota Malang pada tanggal 16 Agustus 2011, sebelum diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 15 November 2011. Berdirinya BSM difasilitasi oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang bersama dengan Kader Lingkungan. Seperti yang di ungkapkan oleh DS (L, 61 tahun), Divisi Pemberdayaan dan Pengangkutan;

BSM berawal dari inisiatif penggiat lingkungan, kita berasal dari kader lingkungan binaan DKP, dimana Bapak Wasto (Kepala DKP Kota Malang) sebagai penasehat dan Bapak Rahmat (yang sekarang Ketua sekaligus Direktur BSM) sebagai pembina. Kami dibina dan diajak studi banding ke daerah-daerah, yang pertama ke Pacitan. Pada bulan November 2011 kami diajak Rakernas Bank Sampah pertama di Yogyakarta, sekaligus studi banding ke pendiri bank sampah di Yogyakarta, namanya Bapak Bambang Swedan (pencetus bank sampah seluruh Indonesia). Sepulang dari yogyakarta kami disuruh untuk magang di Surabaya di salah satu Bank Sampah milik swasta untuk mengetahui jenis-jenis sampah. setelah itu kami baru berembuk mengenai masalah pendirian Bank sampah dirumah pak Rahmat. Atas petunjuk bapak Bambang selaku pegawai Dinas Koperasi, lebih baik dianjurkan supaya membentuk koperasi bank sampah dulu (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2014 jam 9.30).

Dengan berbadan hukum koperasi, maka BSM diperuntukkan sebagai wadah untuk membina, mengumpulkan, dan mengelolaa sampah rumah tangga yang bertujuan sebagai untuk membantu tugas pemerintah Kota Malang dalam penyadaran masyarakat untuk memilih dan mengolah sampah dari sumber (rumah tangga) dalam rangka mengurangi sampah yang masuk

ke TPA Supiturang. Membuka ilmu pengelolaan sampah kepada masyarakat Kota Malang untuk menambah nilai ekonomis dan nilai lingkungan yang bersih dan sehat. Serta BSM mampu membantu Pemerintah Kota Malang dalam membina, melatih, dan mendampingi masyarakat Kota Malang yang tergabung dalam nasabah BSM dalam pengelolaan sampah 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dari sumber (Rumah Tangga).

Bank Sampah Malang atau BSM Pusat berbadan hukum Koperasi adalah sebuah wadah untuk membina, melatih/mendidik dan pendampingi serta menerima/membeli hasil kegiatan pengelolaan sampah tersebut kepada masyarakat/lembaga/unit-unit yang melakukan pengelolaan sampah dengan manajemen BSM. Sebagai wadah untuk membina dan mendidik masyarakat, Pemerintah Kota Malang bersama Kader Lingkungan dan BSM melakukan sosialisasi dengan memperkenalkan metode 3R dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat. BSM bekerjasama dengan Ketua PKK dan Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat, terutama ibu-ibu dan anak-anak sekolah. Sosialisasi terus dikembangkan dengan menggandeng Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang dan media cetak maupun elektronik lokal. BSM dan DKP mensosialisasikan perda tentang pengelolaan sampah dan gerakan menabung dengan sampah, bayar listrik dengan sampah, rekreasi sekolah dengan sampah, beli pulsa dengan sampah dan lain sebagainya.

Bank Sampah Kota Malang merupakan icon bank sampah di Indonesia dan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain dalam pengelolaan bank

sampah. Hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah yang mendukung dan membimbing sepenuhnya program-program dari BSM, mulai dari pengenalan BSM ke masyarakat hingga pemberian dana untuk pengembangan BSM . Hal ini sesuai dengan pernyataan DS (L, 61 tahun)

Divisi Pemberdayaan dan Pengangkutan, sebagai berikut:

Pengenalan BSM ke masyarakat itu adalah Pemerintah Walikota mengintruksikan kepada SKPD terkait sampai ke RT/RW. Peran tugas pak Lurah sangat dominan pada waktu itu, memberikan himbauan kepada RT/RW sekelurahan masing-masing supaya mendirikan unit-unit bank sampah. Kepala Dinas Pendidikan juga berperan dalam mengintruksikan kepada UPT dan Kepala Sekolah seluruh Kota Malang untuk Jum'at bersih supaya membawa sampah untuk di tabung di BSM. Peran serta Pemerintah ini sangat dominan, saya sudah pergi ke beberapa daerah untuk mengisi seminar tentang BSM, dan saya lihat pada akhirnya mereka gagal dalam mengembangkan Bank Sampah kerna tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah masing-masing (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2014 jam 9.30).

Selanjutnya Pemerintah Kota Malang memberikan dukungan berupa finansial dalam bentuk dana hibah pada tahun 2011 senilai Rp 250.000.000,- , pada tahun 2013 sebesar Rp 150.000.000,- yang diperoleh dengan mengajukan proposal terlebih dahulu. Selain itu BSM juga mendapat dukungan berupa sumber daya manusia dari DKP, dimana DKP menugaskan 3 PNS yang dulunya bekerja di DKP di mutilasi ke BSM untuk membantu mengembangkan BSM. Hal ini sesuai dengan pernyataan DS (L, 61 tahun)

Divisi Pemberdayaan dan Pengangkutan, sebagai berikut:

BSM diresmikan oleh Bapak Walikota pada tanggal 26 Juli 2011, sambil diresmikan itu kami membuat proposal yang ditujukan pada walikota untuk mendapatkan dana hiba guna pengembangan BSM. Tanggal 17 Agustus atas nama BSM kami menerima uang sebesar Rp 250.000.000,- tunai (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2014 jam 9.30).

BSM melakukan kerjasama dengan perusahaan milik negara, yaitu PT. PLN melalui program CSR. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu BSM terutama dalam bidang finansial. Bagi PLN sendiri CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, dimana PLN berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PLN bertekad menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam penyediaan listrik. Oleh karena itu PLN mengembangkan program CSR sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu program kerjasama yang dilakukan PLN dengan BSM yaitu bayar listrik dengan sampah. DS (L, 61 tahun) Divisi Pemberdayaan dan Pengangkutan, mengatakan:

Kita bekerjasama dengan PLN dalam bentuk CSR setelah kita punya sesuatu yang bisa dikemukakan, istilahnya BSM yang kita kembangkan sudah jelas keberadaannya dan punya dedikasi yang tinggi. Kita tunjukkan dulu kinerja kita, setelah itu PLN berani mengasih kita CSR (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2014 jam 9.30).

Kerjasama BSM dan PLN memberikan keuntungan berupa finansial bagi BSM. Bantuan finansial berupa CSR dari PLN pada tahun 2011 sebesar Rp. 30.000.000,-, pada tahun 2012 sebesar Rp. 93.000.000,-, pada tahun 2013 sebesar Rp. 140.000.000,- dan terakhir pada tahun 2014 BSM akan mendapatkan mobil untuk operasional senilai RP. 264.000.000,-. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh PLN berupa promosi, dimana BSM bergerak dengan menggunakan atribut dari PLN, seperti logo PLN pada

kantor BSM, logo PLN pada baju seragam pegawai BSM, dan pada mobil operasional juga terdapat logo dari PLN. Nama baik PLN akan terangkat seiring dari bagusnya perkembangan dari BSM itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan DS (L, 61 tahun) Divisi Pemberdayaan dan Pengangkutan, sebagai berikut:

Kalau berbicara keuntungan kerjasama kedua belah pihak yaitu antara BSM dan PLN dalam bentuk CSR. Bagi BSM sendiri keuntungannya jelas, berupa bantuan finansial setiap tahunnya. Sedangkan keuntungan bagi PLN, nama baiknya PLN dimana logo-logo dan atribut PLN dipasang disetiap aktifitas kami, baju aja dari PLN. Dimana-mana diacara seminar dan pameran yang kami lakukan nama PLN selalu disebut. Terkadang ada orang yang bilang BSM ini seperti miliknya PLN, walaupun demikian PLN tidak ada ikut campurnya dalam pengurusan organisasi (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2014 jam 9.30).

Selain menjalin kerjasama dengan PLN berupa CSR, BSM juga bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dengan masalah sampah. BSM menjalin hubungan kemitraan, bukan persaingan, dengan lapak-lapak pemulung yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Umumnya lapak-lapak berfungsi mengumpulkan barang bekas dengan jenis yang terbatas dan bertransaksi jual-putus. Sementara, BSM menerima semua jenis sampah, kecuali steroform, dan juga dapat memproduksi. Oleh karena itu lapak-lapak tersebut seringkali menawarkan barang kumpulannya kepada BSM. Selain itu BSM sudah memiliki alat pencacah botol plastik sumbangan dari DKP, oleh karena itu hasil cacahan botol plastik dari BSM akan dijual kepada pabrik-pabrik. Hal ini sesuai dengan pernyataan DS (L, 61 tahun) Divisi Pemberdayaan dan Pengangkutan, sebagai berikut:

BSM juga bekerjasama dengan para pengepul sampah dan lapak-lapak, mereka menjual sampah yang dikumpulkannya ke BSM. Selain itu kita juga bekerjasama dengan pabrik-pabrik untuk menjual hasil gilingan sampah dari BSM ini, salah satunya kami bekerjasama dengan pabrik sulfat. Tiga bulan sebelum BSM berdiri kita sudah survei ke pabrik-pabrik, lapak-lapak seluruh Jawa Timur untuk pemasaran. Sehingga marketing sudah kita kuasai dan tidak ada kesulitan sama sekali (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2014 jam 9.30).

Sampai bulan November 2014, sudah ada 381 unit BSM masyarakat, 191 unit BSM sekolah, 40 BSM instansi baik pemerintah maupun swasta, 785 BSM individu, dan nasabahnya mencapai 23 ribu (Bank Sampah Malang, 21 November 2014). Nasabah individu adalah nasabah perorangan yang langsung datang ke BSM dengan membawa sampah terpilah yang sudah ditetapkan BSM dan Foto Copy KTP. Sedangkan nasabah unit BSM adalah nasabah dari kelompok masyarakat RT/RW dengan membentuk pengurus minimal dengan jajaran ketua, sekretaris, bendahara, dan anggotanya minimal 20 orang, dimana sampahnya diambil ditempat minimal 50 Kg dan jadwal pengambilan mengikuti ketentuan yang ditetapkan BSM.

Nasabah BSM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan layanan BSM dilingkungan tempat mereka tinggal. Ketersediaan fasilitas akan menggerakkan masyarakat ikut berpartisipasi pada program pemerintah dalam pengelolaan sampah. Nasabah BSM individu rata-rata di ikuti oleh warga yang berada disekitar kantor BSM kerna mudah untuk dicapai, seperti yang diungkapkan LE (43) Warga kelurahan sukun.

BSM ini sangat membantu bagi saya pribadi, saya menjadi nasabah mulai dari awal 2014. Biasanya sampah yang saya tukarkan ke BSM berupa botol-botol minuman dan beberapa jenis kertas seperti karton. Saya lebih memilih menjual sampah ke BSM dari pada ke lapak kerna

di BSM banyak jenis tabungan yang bisa digunakan oleh nasabah dan juga bisa melakukan peminjaman. Disamping itu BSM ini juga tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal, bisa diakses hanya lima menit sepedaan (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2015 jam 15.00).

Bagi nasabah BSM yang jauh dari BSM, bisa memanfaatkan unit BSM yang ada disekitar tempat mereka tinggal. Namun hal ini tidaklah semudah mengakses BSM pusat kerna banyaknya kendala, seperti yang diungkapkan TM (L,39) pengurus unit BSM kelurahan Tlogomas.

Unit BSM dikelurahan ini ada dua, yang satunya ada di RW 03. Kami akui bahwa unit BSM ini tidak terlalu banyak menjangkau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Kami hanya mempunyai sekitar 40 anggota yang mendaftar menjadi nasabah, hal itu sangat jauh dari jumlah kepala keluarga yang ada di sini. Semua anggota tersebut tidaklah selalu aktif. Anggota kebanyakan berasal dari kalangan menengah kebawah, jadi warga menengah keatas belum memanfaatkan BSM sama sekali. Terlebih lagi pengambilan sampah ke unit BSM oleh BSM pusat dilakukan dua kali dalam sebulan, hal ini menyulitkan kami untuk menyimpan sampah kerna bangunannya hanya kecil dan semi permanen. Jika tempat menyimpan sampah penuh, kami terpaksa menutup transaksi sampah di unit BSM ini, yang ujung-ujungnya juga menyulitkan masyarakat (Hasil wawancara pada tanggal 2 Desember 2015 jam 10.00).



Berikut adalah mekanisme nasabah BSM:

MEKANISME NASABAH BSM PADA KELOMPOK BINAAN



KETERANGAN :

1. Untuk menjadi Kelompok Binaan BSM, bentuklah pengurus Kelompok Binaan dan mencari anggota binaan.
2. Daftarkan Kelompok Binaan pada BSM untuk mendapatkan Pelatihan Teknis dan Pembinaan dari BSM sampai fungsi kelompok binaan berjalan.

Gambar 10 Mekanisme Pengelolaan Sampah Kota Malang

Sumber: BSM, 2014

Mekanisme kerja unit BSM dan BSM adalah dimana anggota mengumpulkan sampah rumah tangga dan memilahnya. Sampah yang dipilah harus sesuai dengan jenisnya, terdapat 70 jenis sampah di BSM. Jenis sampah tersebut dibagi kedalam kelompok plastik, kelompok kertas, kelompok logam, dan kelompok botol kaca.

Sampah yang sudah dipilah oleh anggota unit BSM disetorkan dan ditimbang ke pengurus unit BSM 1 s/d 2 minggu sekali ketempat yang ditentukan. Sampah yang dikumpulkan oleh pengurus unit BSM diambil dan ditimbang oleh petugas BSM pada waktu yang telah dttapkan dan diberikan nota penimbangan. Petugas BSM akan membawa ke gudang BSM dan dipilah, dipacking dan ditimbang oleh petugas gudang serta dimasukkan ke stok gudang. Nota penimbangan dari pengurus Unit BSM diserahkan ke teller untuk dinilai rupiahnya dan dimasukkan ke buku tabungan unt BSM.

Berikut adalah jenis tabungan di BSM:

1) Tabungan reguler

Tabungan ini dapat diambil sewaktu-waktu.

2) Tabungan pendidikan

Tabungan yang diambil pada saat tahun ajaran baru atau bila ada kebutuhan pada pembiayaan sekolah anak.

3) Tabungan lebaran

Tabungan di ambil pada saat menjelang lebaran atau digunakan untuk kebutuhan lebaran.

4) Tabungan sembako

Tabungan ini diambil bukan berupa uang tetapi dalam bentuk sembako sesuai dengan permintaan nasabah pada waktu tertentu sesuai kesepakatan dan nilai tabungan.

5) Tabungan kepedulian sosial

Tabungan ini ditujukan untuk memberikan bantuan beasiswa, yatim piatu, pembangunan masjid, dan kegiatan amal lainnya.

6) Tabungan lingkungan

Tabungan ini ditujukan untuk pembiayaan pengelolaan lingkungan kelompok binaan, seperti pembelian tanaman, pengadaan tong sampah, gerobak, komposter, mesin daur ulang, dan lain sebagainya sesuai dengan permintaan nasabah dan nilai tabungan.

7) Tabungan asuransi kesehatan

Tabungan ini ditujukan untuk membayar asuransi kesehatan dengan membayar sampah senilai yang telah ditetapkan dan akan mendapat fasilitas kesehatan secara gratis.

b) Pembuatan kompos

Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembap, dan aerobik atau anaerobik. Sedangkan pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Pengomposan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam mengatasi jumlah timbulan sampah yang semakin tinggi. Seperti yang diungkapkan YW (L, 34) UPT pengolahan sampah dan air limbah DKP Malang.

Jumlah timbulan sampah setiap tahun pasti meningkat. Kaitannya dengan jumlah pertumbuhan penduduk, dengan bertambahnya penduduk sampah pun bertambah, itu sudah pasti. Selain itu, pemerintah pembangunannya semakin baik, tingkat perekonomian semakin tinggi, dengan perekonomian masyarakat semakin tinggi itu menyebabkan jumlah timbulan sampah pasti bertambah, karena masyarakat makin konsumtif. Saat ini penambahan TPS, armada, kemudian kapasitas TPA tidak bisa bertambah sesuai dengan jumlah timbulan sampah yang terus bertambah, kejar-kejaran terus. Penambahan jumlah timbulan sampah lebih banyak ketimbang penambahan armada, SDM, dan sarana prasaranan sehingga solusinya bagaimana caranya sampah dari tingkat rumah tangga sampai ke TPS harus ditekan, salah satunya adalah dengan pengomposan (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2014 jam 9.30).

Dari 68 TPS yang ada di Kota Malang, 12 diantaranya dilengkapi dengan rumah kompos. Rumah kompos ini fungsinya adalah mereduksi sebagian dari sampah yang masuk ke TPS, sampah direduksi sesuai dengan kapasitas masing-masing rumah kompos. Sisa sampah yang tidak tereduksi akan diangkut ke TPA.

Karakteristik bahan untuk membuat kompos organik dari pengelolaan sampah tidak bisa berasal dari semua jenis sampah, sampah yang dapat dijadikan kompos adalah sisa sayuran, buah, serta dedaunan perkarangan rumah atau kebun. Oleh karena itu, sampah yang ada di TPS tidak bisa langsung direduksi melainkan harus melakukan proses pemisahan terlebih dahulu antara sampah organik dan anorganik, pemisahan ini langsung dilakukan oleh pegawai DKP yang bertugas di rumah kompos. Seperti yang diungkapkan YW (L, 34) UPT pengolahan sampah dan air limbah DKP Malang.

Jujur dari masyarakat kita sendiri kebanyakan masih belum melakukan pemilahan sampah, intinya sampah yang masuk ke TPS biasanya

tercampur. Petugas yang melakukan pemilahan di TPS untuk di jadikan kompos adalah pegawai DKP sendiri (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2014 jam 9.30).

Selain itu juga ada kebijakan dari DKP yang di tujukan untuk menanggulangi timbulan sampah, yaitu langsung pada rumah tangga dengan pengomposan langsung oleh masyarakat. Masyarakat didorong untuk melakukan pengomposan skala rumah tangga, dimana hasil pengomposan dari masyarakat bisa dijual ke DKP. Hasil pembelian kompos oleh DKP akan digunakan untuk pupuk tanaman di taman-taman Kota Malang. Hasil pengomposan juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk penghijauan lingkungan. Seperti yang diungkapkan YW (L, 34) UPT pengolahan sampah dan air limbah DKP Malang.

Hasil kompos skala rumah tangga setidaknya bagi kami arahnya ada dua. Pertama, pertama penghijauan lingkungan, kami mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan lingkungan melali lomba kampung bersinar antar RW setiap tahunnya, dengan tujuan untuk memotivasi masyarakat supaya memperbaiki lingkungan. Kedua, hasil pengomposan bisa dijual ke DKP yang di koordinir oleh kader lingkungan (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2014 jam 9.30).

Pengelolaan sampah melalui pengomposan kurang populer dikalangan masyarakat, hal ini disebabkan pengelolaan sampah melalui kompos lebih sulit dan tidak menghasilkan uang bagi masyarakat. seperti yang diungkapkan BA (L,50) Warga Sukun.

Pemilahan sampah mulai saya lakukan dari 2013, awalnya dulu ada lomba lingkungan bersih antar RW, warga-warga disosialisasikan untuk memilah sampah dan menjualnya ke BSM. Saya hanya memilah sampah anorganik berupa botol-botol dan sampah kering lainnya. Sampah basah dari sisa dapur tidak diolah kerna sedikit

rumit dan juga harga jualnya yang murah (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2015 jam 14.00).

Pengelolaan sampah dengan pengomposan ditingkat rumah tangga tidaklah terlalu banyak membantu mengurangi timbulan sampah pada TPS/TPA. Hal ini disebabkan kurangnya masyarakat yang berminat dalam melakukan pengomposan, seperti yang diungkapkan KM (L,49) ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Tlogomas.

Warga yang ada di RT ini saya lihat belum ada yang memanfaatkan sampah dijadikan kompos, namun beberapa sudah ada yang menjual sampah ke BSM. BSM tidak menerima penjualan kompos, warga sulit untuk menjualnya dan proses pembuatannya juga lama dan rumit. Menurut saya pengomposan skala rumah tangga tidaklah membantu dalam pengurangan sampah, jikalau DKP ingin membuat kompos seharusnya memberikan kebijakan yang tegas kepada masyarakat untuk memisahkan sampah dan organik dan anorganik. Jadi sampah organik bisa dikumpulkan di TPS 3R dan dilakukan pengomposan disana oleh DKP. Menurut saya baiknya begitu, kerna tidak ada warga yang mengolah sampah menjadi kompos (Hasil wawancara pada tanggal 2 Desember 2015 jam 16.30).

Peran DKP dalam pengelolaan sampah menjadi kompos adalah sebagai pembina dan memberikan pelatihan. Pembinaan dan pelatihan diberikan kepada kader lingkungan tingkat RT sampai kader lingkungan tingkat kota dan masyarakat. Pembinaan dilakukan dengan cara sosialisasi, seminar, dan *workshop*. Selain itu DKP setiap tahun juga menargetkan untuk memberikan hibah berupa tong komposter pada masyarakat.

c) **Budidaya cacing**

Budidaya cacing merupakan salah satu inovasi masyarakat dalam upaya untuk memanfaatkan sampah anorganik menjadi salah satu barang

yang mempunyai nilai jual. Budidaya cacing dalam bahasa Inggris disebut *Vermicomposting* yang artinya proses pembuatan kompos melalui budidaya cacing. Produk yang dihasilkan melalui budidaya cacing ini adalah biomassa cacing dan bekas cacing atau kasting.

Cacing yang dihasilkan dari budidaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Salah satu contohnya adalah bisa dimanfaatkan sebagai makanan ternak ikan seperti lele, dimana cacing organik ini dapat mempercepat usia panen ikan lele. Sedangkan kasting dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk pertanian organik. Kasting mempunyai kandungan yang bermanfaat bagi tanaman. Saat ini kasting sudah dimanfaatkan untuk pertanian organik seperti tanaman cabe dan kacang-kacangan.

Melihat manfaat dari budidaya cacing, DKP mendorong semua masyarakat Kota Malang untuk melakukan budidaya cacing tersebut. DKP berharap dengan maraknya budidaya cacing ini dapat mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPS, terutama sampah organik. Sampah organik yang dihasilkan rumah tangga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bahan pembuatan budidaya cacing sehingga volume sampah dari rumah tangga yang masuk ke TPS jadi berkurang. Seperti yang diungkapkan YW (L, 34) UPT pengolahan sampah dan air limbah DKP Malang.

Budidaya cacing ini cukup membantu dalam pengurangan volume timbulan sampah anorganik, karena berdasarkan teorinya 1 kg cacing memerlukan pakan atau limbah organik seberat $\frac{1}{2}$ kg atau setengah

berat badannya. Dengan begitu jelas pakan untuk cacing memerlukan sampah organik yang cukup banyak, sehingga ada beberapa RW yang masyarakatnya menggiatkan budidaya cacing ini malah kekurangan pakan atau sampah organik, dan mereka mencari pakan dari RW lain (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2014 jam 9.30).

Peran pemerintah Kota Malang dalam pengolahan sampah organik melalui budidaya cacing hanya sebatas memberi informasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai seminar dan pelatihan bagaimana cara budidaya cacing yang benar. Semua diserahkan pada masyarakat mulai dari penyediaan tempat, pembelian bibit sampai penjualan. DKP sendiri tidak membeli hasil dari budidaya masyarakat, DKP hanya memfasilitasi atau mengenalkan masyarakat dengan pelaku budidaya cacing yang sudah lama melakukan kegiatan itu. Seperti yang diungkapkan YW (L, 34) UPT pengolahan sampah dan air limbah DKP Malang.

Peran DKP dalam budidaya cacing, yang jelas kita menginformasikan itu kepada masyarakat. Kemudian kita mengenalkan dan mendekati masyarakat dengan pelaku-pelaku budidaya cacing yang ada, yang memberlakukan sistem inti plasma. Jadi pelaku budidaya cacing yang ada saat ini mereka menjadi inti dan kemudian membuat jaring-jaring atau plasma untuk pelaku-pelaku atau masyarakat yang ingin budidaya cacing. Masyarakat yang ingin budidaya cacing bisa mengambil bibit dan menjual hasilnya kesana. DKP sendiri tidak membeli cacing masyarakat, kita lebih menyebarluaskan informasi itu (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2014 jam 9.30).

Jadi intinya masyarakat mendapatkan informasi budidaya cacing dari pemerintah Kota Malang, setelah itu masyarakat berperan sendiri dalam pengelolaannya. Seperti yang diungkapkan AS (L,47) Warga Kelurahan Merjosari.

Budidaya cacing ini sudah saya tekuni dari dua tahun terakhir, saya memulai usaha ini kerna ajakan teman dan juga saya mendapatkan sosialisasi dari DKP. Sampah organik yang digunakan diambil dari sampah sehari-hari dan sampah dari pasar. Budidayanya tidaklah terlalu sulit, namun masalah yang kita hadapi pada proses penjualan, pada awal-awalnya kita kesulitan untuk mencari orang yang mau membeli cacing dan jikalau pun ada hal tersebut tidak berkelanjutan. kami juga menginginkan budidaya cacing ini menjadi program dari BSM, dan kami bisa menjual kesana dengan harga yang stabil tidak seperti yang kita hadapi sekarang harganya cenderung naik turun (Hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2015 jam 10.00).

Cacing yang dihasilkan dari budidaya ini, masyarakat mencari sendiri tempat untuk menjualnya, bisa seperti yang di informasikan oleh DKP atau masyarakat langsung menjual pada peternak yang menggunakan cacing sebagai pakannya. Selain cacing hasil lain dari budidaya ini adalah kasting. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kasting adalah sisa dari bekas cacing dan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Kasting ini bisa dimanfaatkan sendiri untuk tanaman organik atau juga bisa dijual kepada pelaku-pelaku pertanian organik.

d) Lomba lingkungan bersih antar RW

Lomba lingkungan bersih ini bertujuan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya, sehingga masyarakat dapat merawat lingkungannya menjadi bersih dan nyaman. Melalui lomba ini masyarakat tergerak dan termotivasi untuk menjadikan lingkungan tempat mereka tinggal menjadi bersih dan terbebas dari sampah. Pemerintah Kota Malang berharap semua RW disetiap kelurahan berpartisipasi dalam lomba ini, sehingga semua warga Kota Malang berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, terutama sampah. Sesuai

dengan Undang-undang No 18 Tahun 2008 diamanatkan bahwa dalam pengelolaan sampah harus ada partisipasi masyarakat.

Lomba lingkungan bersih pertama kali dimulai pada tahun 2011, dan lomba ini digelar satu kali dalam satu tahun. Sampai sekarang sudah ada tiga lomba lingkungan bersih, yaitu lomba *green and clean city*, lomba kampung bersinar, dan yang terakhir lomba kampung *zero waste*. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Sampai sekarang itu kita sudah ada tiga kali lomba yang pertama itu adalah *green and clean*, indikatornya masih sederhana, yaitu penghijauan dan kebersihan saja. Selanjutnya lomba kampung bersinar. Lomba sudah meningkat dengan banyak indikator penilaian seperti bank sampah, inovasi pengolahan sampah. Terakhir adalah lomba kampung *zero waste*, dimana indikator penilaiannya sudah sedikit diatas kampung bersinar, dan oleh karena itu hanya diikuti oleh RW yang pengelolaan lingkungannya sudah cukup baik saja (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Lomba *Clean and Green City* dimaksudkan untuk membersihkan dan menghijaukan kembali kota Malang yang akhir-akhir ini semakin tidak hijau dan tidak bersih. Kondisi kota Malang yang dulu hijau, sejuk dan nyaman sekarang berkurang drastis. Kemajuan teknologi ternyata berimbas signifikan terhadap kelestarian alam kota Malang. Bangunan-bangunan megah banyak berdiri di kota Malang ini sebagai wujud dari era globalisasi di jaman sekarang. Tapi hal ini justru semakin membuat kota Malang semakin kehilangan hijaunya. Dari kondisi itu Pemkot Malang menggelar Lomba Bersih dan Hijau (*Clean and Green*).

Penilaian pada lomba *Clean And Green City* antar RW se Kota Malang ini dibagi dalam tiga tahap dengan selang waktu satu bulan

setiap tahapnya. Adapun kriteria penilaian lomba adalah pengelolaan sampah, penghijauan dan keasrian. Untuk penghijauan sendiri Pemkot Malang mencanangkan kembali maskotnya yaitu bunga andong merah, bunga puring atau bunga cepiring dan bunga kulbanda atau kol londo. Untuk pengelolaan sampah diharuskan adanya pemisahan sampah kering, sampah basah yang bisa didaur ulang dan sampah buang. Lomba *Clean And Green City* yang diikuti oleh 125 RW se Kota Malang ini akhirnya dimenangkan oleh RW 03 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.

Setelah sukses dengan lomba *Clean and Green City* pada tahun 2011, selanjutnya Pemerintah Kota Malang menggelar lomba Kampung Bersinar (Bersih, Sehat, Indah, Asri dan Rapi). Lomba kampung bersinar ini sudah lebih meningkat dari lomba sebelumnya, seperti indikator penilaian jauh lebih banyak dari lomba sebelumnya. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Pada lomba kampung bersinar ini kita menghadap pada indikator-indikator penilaian yang ada pada indikator penilaian adipura, jadi lomba ini sudah ada peningkatan dari lomba sebelumnya (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Lomba kampung bersinar diikuti oleh 168 RW di kota Malang, didukung oleh Malang Post dan CSR dari PT PLN. Penilaian lomba kampung bersinar ini dilakukan dalam tiga tahap, tahap pertama dilakukan November 2013, tahap kedua pada Februari 2014, dan tahap ketiga dilakukan pada April 2014. Tim juri yang menilai lomba ini

berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, Bank Sampah Malang (BSM), PKK, Malang Post dan Kader Lingkungan.

Sukses menggelar Kampung Bersinar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang selanjutnya menggelar lomba *Zero Waste*. Tujuan digelarnya Lomba *Zero Waste* ini diantaranya untuk terwujudnya Kampung Bebas Sampah dengan 3R (reduce, reuse, recycle) serta memanfaatkan sampah sebagai media dan alat untuk budidaya tanaman organik. Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui daur ulang sampah dan budidaya tanaman organik dari media sampah dan memperpanjang masa pakai sarana dan prasarana persampahan.

Lomba *Zero Waste* hanya bisa diikuti oleh para pemenang Lomba Kampung Bersinar. Diantaranya RW 03 Kelurahan Sukun, RW 13 Kelurahan Bunulrejo, RW 06 Kelurahan Tlogomas, RW 04 Kelurahan Wonokoyo. Peserta adalah pemenang lomba-lomba kebersihan Kampung Bersinar sebanyak lima RW dan para RW pelaksana Program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Lomba kampung *Zero Waste* indikatornya sedikit diatas kampung bersinar dan oleh karena itu hanya di ikuti oleh RW yang pengelolaannya sudah cukup baik saja, yaitu RW-RW yang memenangkan lomba kampung bersinar sebelumnya. Jadi misis kita itu benar-benar *Zero Waste* tidak ada sampah yang diangkut ke TPS, semua sampah habis diolah di tempat (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Sistem penilaian dilakukan tim juri yang berkompeten di bidangnya dan berasal dari berbagai unsur. Diantaranya yakni DKP, Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan, Bank Sampah Malang (BSM) dan media massa. "Penilaian dilakukan hanya dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pertengahan Februari dan tahap kedua sebelum penilaian Adipura Kencana. Sementara untuk indikator penilaian yang dirumuskan tim juri dengan sekurang-kurangnya memperhatikan aspek kebersihan dan penghijauan lingkungan, pemilahan dan pembatasan timbulan sampah, peranserta aktif masyarakat. Selain itu juga kreasi atau inovasi yang bertujuan mengkonversi sampah menjadi sumber daya atau sumber energi terbarukan. Hadiah yang diberikan cukup besar, yakni juara pertama Rp 8,5 juta, juara kedua Rp 7 juta, juara ketiga Rp 5,5 juta, juara harapan I Rp 4,5 juta dan juara harapan II Rp 4 juta.

e) **Kader Lingkungan**

Kader lingkungan adalah masyarakat atau aktifis pecinta lingkungan yang mengabdikan dirinya secara sukarela untuk membantu menciptakan kebersihan dilingkungan tempat tinggalnya. Kader lingkungan ini dibentuk oleh DKP pada tahun 2010. DKP mengajak masyarakat dan pecinta lingkungan untuk bergabung menjadi kader lingkungan dengan mengadakan sosialisasi melalui sekolah-sekolah, universitas, kecamatan, kelurahan sampai RW/RT. Kader lingkungan anggotanya berasal dari semua lapisan masyarakat baik itu mahasiswa, PNS, masyarakat biasa tidak ada persyaratan secara khusus untuk bisa

bergabung dengan kader lingkungan. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Dalam uu no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah diamanatkan bahwa pengelolaan sampah harus ada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu untuk menunjukkan partisipasi masyarakat DKP melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat turun ikut serta menjaga lingkungan dengan mengelolah sampah. sosialisasi ini tidak efektif, kenapa? kerna Setelah melakukan sosialisasi hanya selesai begitu saja tanpa ada pergerakan dari masyarakat. DKP mempunyai ide untuk membuat kader lingkungan untuk selalu mengawal terus masyarakat dilapangan dan mengajak melakukan apa yang sudah di sosialisasikan oleh DKP (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Kader lingkungan layaknya kepanjangan tangan dari DKP, yang merupakan mitra kerja dimasyarakat. Kader lingkungan diberikan pelatihan tentang lingkungan, mulai dari kebersihan, penghijauan, dan pengelolaan sampah. Tugas kader lingkungan yaitu untuk memotivasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Misalkan ada sosialisasi pengelolaan sampah kita sekarang cukup mengundang ketua RW dan anggota kader lingkungan, nantinya mereka melalui PKK dan rapat-rapr RT mensosialisasikan pada masyarakat apa yg telah kami sampaikan pada mereka. Kader lingkungan sebagai perpanjangan tangan dari DKP, sehingga ketika ada informasi di DKP yang terkait dengan pengelolaan sampah masyarakat bisa tau dari kader lingkungan (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Kader lingkungan yang terdaftar di DKP diberi kartu anggota yang ditandatangani oleh Walikota Malang, Kapolres Malang, dan Kodim Kota Malang. Kader lingkungan terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkat Kota yang dikoordinasikan langsung oleh DKP, ada kader

lingkungan tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW memiliki struktur organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jumlah keseluruhan kader lingkungan sampai saat ini sekitar 20.000 orang mulai dari tingkat RT sampai tingkat Kota.

Kader lingkungan bekerja dengan sukarela tanpa digaji oleh DKP, DKP hanya sebagai pembina. Dalam menjalankan program-programnya kader lingkungan meminta dana pada pemerintah daerah dengan cara pembuatan proposal kegiatan. Program kerja diserahkan pada Kesra Pemerintahan Kota Malang untuk diajukan penganggaran, sementara untuk tingkat kelurahan melalui dana yang dikelola kelurahan.

2) Tingkat Antara

Tingkat antara merupakan tempat dimana sampah dari tingkat hulu dikumpulkan, dilakukan pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan merupakan wadah penampung sebelum sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir. Ditingkat antara terdapat TPS, TPS 3R, SPA (Stasiun Peralihan Antara, dan pemberdayaan pengulung.

a) Pembangunan TPS, TPS 3R, dan SPA

TPS merupakan tempat penampungan sementara sampah dari rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pada TPS tidak ada kegiatan pengelolaan sampah dari DKP sama sekali, sampah hanya ditumpuk setelah itu diangkut ke TPA. Seperti yang diungkapkan DP (L,49) Koordinator lapangan UPT TPA Supiturang.

TPS murni hanya meanpung sampah, TPS ada yang berupa bangunan kemudian di isi kontainer dan ada juga TPS yang tidak ada bangunannya. Kita meminta lahan kosong pada masyarakat dan dengan se izin masyarakat kita menjadikannya sebagai TPS dengan hanya meletakkan sebuah Kontainer disana tanpa adanya bangunan (Hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2014 jam 09.30).

Berbeda dengan TPS 3R, dimana dilakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Jumlah TPS di Kota Malang sampai saat ini adalah 68 dan 12 diantaranya merupakan TPS 3R. Beda fisik dari TPS 3R dan TPS biasa dimana TPS 3R mempunyai rumah kompos sebagai tempat pengolahan sampah menjadi kompos. TPS 3R ini berperan penting dalam pengurangan timbulan sampah yang ada di TPA, sampah yang masuk ke TPS 3R dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik, sampah anorganik dijual ke BSM untuk di daur ulang sedangkan sampah organik dimanfaatkan untuk pembuatan kompos. Sisa dari pemilahan sampah tersebut yang sudah tidak bisa dimanfaatkan baru di bawa ke TPA.

Selain TPS dan TPS 3R ada stasiun peralihan antara atau SPA. SPA terdapat di TPS Velodrom kurang lebih sama dengan TPS 3R, namun yang membedakannya adalah terdapat alat untuk pengempresan sampah. Sampah yang masuk kesana di padatkan sehingga mampu mengurangi volume sampah yang akan diangkut ke TPA. Metode pengolahan dengan alat pres ini baru ada di tiga kota di Indonesia yaitu Malang, Surabaya, dan Gresik. Alat pres ini mampu mengurangi volume sampah

hingga sepertiga berat awalnya. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Alat pres ini sangat membantu, misalnya sampah dengan kapasitas 3 truk di pres bisa menjadi muat satu truk saja. Hal ini sangat efisiensi tenaga, hemat BBM kerna tidak perlu mengangkut sampah berulang kali ke TPA (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Alat pres yang ada di SPA tersebut adalah alat hibah dari kementerian PU, bukan dari anggaran APBD kerna biayanya cukup besar. Pemberian alat ini didasarkan atas terpilihnya Kota Malang sebagai wilayah yang dijadikan *pilot project* Kementerian PU. Rencanya jika program *pilot project* ini berhasil maka selanjutnya akan diterapkan disemua wilayah Indonesia.

b) **Pemberdayaan Pemulung**

Pemulung mempunyai peran yang cukup besar dalam pengelolaan sampah ditingkat antara, terutama pada TPS. Banyaknya sampah yang masuk ke TPS merupakan mata pencarian bagi pemulung. DKP melihat peluang dengan adanya pemulung akan membantu memilah dan mengurangi volume sampah yang akan dibawa ke TPA, oleh kerna itu DKP memberdayakan pemulung untuk dijadikan mitra dalam pengolahan sampah di TPS.

DKP memperbolehkan pemulung memasuki area TPS dikarenakan banyaknya timbulan sampah yang ada bisa dimanfaatkan oleh pemulung untuk dipilah dan dijual ke lapak ataupun BSM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemulung. Selain itu juga untuk

mengurangi timbulan sampah anorganik yang susah teruraikan agar tidak masuk semua ke TPS, kerna biasanya pemulung mengambil sampah anorganik yang lebih mudah untuk dijual. Agar terkendalinya kegiatan pemulung, DKP mengajak pemulung bersama-sama untuk menjaga fasilitas yang sudah ada, baik itu fasilitas yang ada di TPS maupun fasilitas yang digunakan pemulung dalam pemilahan sampah.

3) Tingkat Hilir

Pengelolaan tingkat hilir adalah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DKP pada tempat pembuangan akhir. Ini adalah usaha atau titik terakhir bagi DKP dalam mengelolah sampah untuk mengurangi timbulan sampah yang ada pada TPA tersebut. Sampai saat ini TPA Supiturang menampung sampah 420,48 ton/hari dengan luas TPA 31,25 Ha, terpakai 15,6 Ha dan selebihnya tanah kosong.

Dalam upaya mengurangi timbulan dan meminimalisir dampak dari timbulan sampah maka DKP menggunakan strategi *control landfill*. Pada metode *Control landfill*, sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel. Kemudian, sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan. Selain itu, dibuat juga saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindi (leachate) dan instalasi

pengolahannya, pos pengendalian operasional, dan fasilitas pengendalian gas metan. Seperti yang diungkapkan DP (L,49) Koordinator lapangan UPT TPA Supiturang.

Pengelolaan sampah di TPA dilakukan dengan sistem *control landfill* yang artinya lahan terkendali. Jadi maksud dan tujuannya lingkungan di TPA terkendali dengan kita melakukan pengerukan dan penimbunan dan dampak dari timbulan sampah kita minimalisir. Dengan sistem *control landfill* ini diperkirakan umur TPA bisa mencapai 20 hingga 30 tahun kedepan (Hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2014 jam 09.30).

Gas metan yang terakumulasi pada lapisan-lapisan tumpukan sampah yang berada pada lahan TPA jika terbebas ke lingkungan adalah merupakan salah satu kontributor efek gas rumah kaca, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efek pemanasan global di bumi. Akhirnya pemukiman di sekitar TPA yang menguap liar akan menimbulkan efek kebakaran. Oleh kerna itu maka kandungan gas metan yang ada di TPA Supiturang dimanfaatkan menjadi bahan bakar pembangkit energi alternatif.

Gas yang timbul dari proses penguraian sampah diambil melalui instalasi pengambilan gas metan kemudian dialirkan menuju instalasi pemisah gas dan air melalui jaringan pipa. Gas metan hanya bisa dimanfaatkan apabila telah terpisah dari air lindi karenanya dilakukan instalasi pemurnian gas metan pada tahap selanjutnya. Dengan dilakukannya tahap tersebut maka gas metan murni dapat dimanfaatkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan manusia, namun dibalik pemenuhan tersebut tetap ada sistem kendali agar gas metan tersebut

tidak mencemari lingkungan dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut dengan berbagai inovasi.

Inovasi yang dilakukan Kota Malang dari hasil tangkapan gas metan adalah dengan memanfaatkan gas tersebut untuk memasak. Gas metan tersebut dialirkan ke rumah-rumah warga yang ada disekitar TPA Supiturang. Sampai saat ini sudah ada 408 kepala keluarga yang sudah memanfaatkan gas metan untuk memasak. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Gas metan murni yang dihasilkan dari proses instalasi sudah bisa dialirkan ke rumah-rumah yang ada di sekitar TPA melalui pipa. Gas metan sudah dimanfaatkan oleh 408 KK sebagai bahan bakar untuk memasak, jadi warga tidak perlu membeli gas LPG lagi. Warga hanya cukup membayar iuran rutin sebesar Rp 10.000,- perumah tangga setiap bulannya (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Pengaliran gas metan dari TPA kerumah tangga disambut baik oleh warga, namun warga tidak bisa sepenuhnya bergantung pada gas metan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak kendala yang terjadi dialami oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan EM (W,45) Warga sekitar TPA Supiturang.

Gas metan dari TPA sudah cukup lama disalurkan kerumah kami, namun belakangan ini kami sudah mencopot kembali dan banyak juga warga lain yang melakukan hal tersebut. Hal ini disebabkan gas metan yang dialiri kerumah warga tidak selalu tersedia, terkadang waktunya tidak menentu gas tersebut mati sedangkan kami membutuhkan untuk memasak, oleh sebab itu kami tidak bisa bergantung pada gas metan dan terpaksa kami juga membeli gas elpiji. Memang biaya iuran yang dikenakan tidak terlalu membebankan hanya Rp 10.000. Kedepannya yang kami harapkan gas yang dialiri bisa terus tersedia untuk kegiatan memasak, jadi kami tidak harus membeli elpiji lagi sebagai pengganti gas jika gas metan tidak tersedia (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2015 jam 10.30).

Pemanfaatan gas metan di TPA Supiturang baru mencapai 5%, sisanya masih terbuang dan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jika gas metan bisa ditangkap secara maksimal maka bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik atau di kenal dengan istilah Eds (Energi dari sampah). Pemerintah sangat mendukung pengembangan energi dari sumber renewable ini, salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah adalah dengan diterbitkannya Permen ESDM no 19 Tahun 2013, tentang Feed in Tariff untuk listrik yang dihasilkan dari sampah, yaitu sebesar Rp1.450/kWh dan Rp1.798/kWh untuk zero waste, serta Rp1.250 dan Rp1.598 untuk listrik dari sanitary landfill. Potensi landfill gas di Indonesia sangat besar, mencapai lebih dari 600 MW electricity bisa dihasilkan, sedangkan pemanfaatannya masih sangat minim. Dengan potensi yang besar ini, didukung dengan kebijakan yang sangat kompetitif, maka sudah saatnya Energi dari Sampah ini menjadi prioritas bagi pihak-pihak yang berkepentingan (bppt.go.id diakses pada tanggal 12 Januari 2015).

MCTAP sebagai bagian dari project nasional untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, telah melakukan studi, survey dan perhitungan di beberapa lokasi TPA Potensial untuk pengembangan Energi dari Sampah. Salah satunya adalah TPA Supit Urang, Kota Malang. TPA Supit Urang Kota Malang telah memasuki rencana untuk menjadi full sanitary landfill, dimana saat ini sedang di

lakukan tender untuk proyek tersebut. Jika teknologi RSL (sustainable wet-cell) diterapkan disini, maka lokasi ini dapat dikonversikan menjadi lokasi pembangkit energy terbarukan berkelanjutan, yaitu Landfill-Gas to Energy dan Gasification. Gas landfill yang dihasilkan dapat dipakai sebagian untuk menjalankan operasi truk sampah, BBG untuk penduduk sekitarnya dan untuk pembangkit listrik.

b. Teknik operasional Persampahan Kota Malang

1) Pewadahan

Di Kota Malang pewadahan merupakan tanggung jawab setiap rumah tangga dimana mereka menyediakan tempat pewadahan untuk menampung sampah yang mereka hasilkan setiap harinya. Wadah-wadah untuk menampung sampah diletakan didepan rumah. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Pewadahan dilakukan oleh warga sendiri, bukan difasilitasi oleh pihak DKP. Kami mensosialisasikan pada masyarakat untuk setiap rumah wajib menyediakan setidaknya dua wadah sampah, yaitu untuk sampah organik dan sampah anorganik (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

2) Pengumpulan

Pengumpulan merupakan rangkaian untuk memindahkan sampah dari sub sistem pewadahan ke sub sistem tempat penampungan sementara (TPS). Pada tahap ini sebelum sampah diangkut ke tempat pemrosesan atau ke tempat pembuangan akhir, sampah dari masing-masing sumber akan dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul. Di Kota Malang

Petugas pengumpul sampah dari setiap rumah dilakukan oleh petugas kebersihan dari masyarakat (swadaya masyarakat) yang di koordinir oleh RW dan RT setempat, dan digaji langsung dari iuran warga. Sampah diambil dari rumah kerumah oleh petugas kebersihan menggunakan gerobak sampah ataupun motor sampah. Sampah-sampah dari rumah penduduk dan jalan yang diangkut dijadikan satu di TPS setiap kelurahan. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun)

KABID Kebersihan.

Sampah yang sudah ada didepan rumah warga diangkut oleh petugas grobak RW, ini adalah murni orang diluar DKP. Jadi orang yang ditunjuk sendiri oleh RW setempat dan digaji oleh warga sendiri melalui iuran bulanan. Kita dari DKP hanya memfasilitasi angkutannya saja seperti gerobak dan seragam, tetapi juga ada beberapa RW yang swadaya menyediakan gerobak sendiri (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

3) Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah sub-sitem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan di Kota Malang dengan sistem truk, *dump truck* dan *Arm-roll Truck*. *Arm-roll Truck* adalah truk pengangkut yang dilengkapi mesin pengangkat kontainer. Sampah yang sudah terkumpul di TPS dimuat kedalam kontainer yang sudah disediakan disetiap TPS, pada saat *Arm-roll Truck* datang untuk mengangkut sampah, tinggal melepaskan kontainer kosong yang

dibawanya dan diganti dengan kontainer yang sudah terisi sampah. Hal ini sangat efektif kerna tidak perlu mengisi ulang bak truk lagi. Sampah yang sudah dimuat kedalam truk terakhir diangkut ke TPA Supiturang untuk pemerosasan akhir.

Tabel 3a Tabel 3: Jumlah Timbulan Sampah di Kota Malang Tahun 2014

No	Asal Sampah	Jumlah Ton/Hari
1	Penduduk Kota Malang : $898.558 \times 0.5 \text{ Kg}$	449,28
2	Warga bukan sebagai penduduk : $300.000 \times 0.5 \text{ Kg}$	150,00
3	Jalan, komersial/pasar dan industri ($10\% \times \text{pddk}$)	44,93
4	Sampah dari sumber lain	15,00
Jumlah		659,21
Jumlah sampah yang terangkut ke TPS		492, 35 Ton/hari
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA		464,74 Ton/hari

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, 2014

Jumlah timbulan sampah di Kota Malang dipastikan akan terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan penduduk (baik penduduk tetap maupun pendatang, pertumbuhan ekonomi masyarakat serta aktivitas kota Malang sebagai kota besar menuju kota metropolitan.

c. Dampak dari program-program pengelolaan sampah Kota Malang

Program-program pengelolaan sampah dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kebersihan Kota Malang dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat dari sampah tersebut. Program pengelolaan sampah dengan tiga strategi (tingkat hulu, tingkat antara, dan tingkat hilir) sudah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat kota Malang. Dampak dari program pengelolaan sampah tersebut dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan;

1) Sosial

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan tanggungjawab dari semua masyarakat Indonesia, oleh sebab itu masyarakat diwajibkan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah. Dalam upaya menjalankan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Malang membuat strategi dengan cara merangkul masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah.

DKP sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah memberikan pengetahuan melalui sosialisasi ke kelurahan, RT/RW tentang bahaya dan manfaat dari sampah. Dari situ munculah penggiat-penggiat lingkungan skala kelurahan maupun RW. Cara pandang masyarakat terhadap sampah sudah mulai berubah, dimana masyarakat menganggap sampah bisa menjadi sebagai barang yang

bernilai ekonomi. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah meningkat, terbukti dengan bertambahnya jumlah nasabah BSM. Serta meningkatnya peserta lomba kampung bersih, ini disebabkan timbulnya kesadaran dalam pengelolaan sampah hingga mereka berpacu untuk mewujudkan lingkungan hijau dan bersih sampah (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Lomba kampung bersih merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan sampah. Lomba kampung bersih memupuk rasa guyub rukun dan gotong royong diantara masyarakat. Masyarakat saling bahu membahu membangun lingkungan yang hijau dan bersih, serta saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Inovasi-inovasi pengelolaan sampah banyak terlahir dari lomba kampung bersih ini, sebagai contoh yaitu budidaya cacing. Jika inovasi dari masyarakat bisa diterapkan tingkat daerah, maka DKP akan memasukan inovasi tersebut kedalam program-program pengelolaan sampah.

Selain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, melalui program-program pengelolaan sampahnya pemerintah Kota Malang juga mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari hasil kerja kerasnya, diantaranya yaitu meraih penghargaan Adipura Kencana di tahun 2014 yang merupakan penghargaan di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup, penghargaan Otonomi Awards dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) yang merupakan penghargaan pemberdayaan ekonomi lokal berupa piala

silver, dan grand award pengembangan ekonomi Jatim berupa piala gold, Penghargaan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) untuk inisiatif dan inovator pembangunan air minum dan sanitasi yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kota Malang juga dijadikan percontohan pengelolaan sampah nasional, hal ini tidak terlepas dari kesuksesan Kota Malang dalam pengelolaan sampah sehingga bisa memiliki nilai ekonomi tinggi membuat Kota Malang mendapat perhatian tersendiri. Banyak daerah-daerah lain yang datang ke DKP untuk belajar tentang pengelolaan sampah dan juga seringkali DKP Kota Malang diundang ke berbagai daerah untuk mengisis seminar tentang pengelolaan sampah. BSM juga menjadi percontohan nasional, tidak hanya bermanfaat bagi warga kota Malang dari aspek ekonomi dan lingkungan, namun juga mengundang prestasi tingkat regional hingga nasional. Beberapa kota di Indonesia juga melakukan studi banding di BSM dan mengundang tim BSM untuk presentasi di kotanya masing-masing, ingin belajar tentang konsep dan aplikasi BSM Malang.

2) **Ekonomi**

Persepsi masyarakat tentang sampah yang tidak mempunyai nilai telah mulai berubah dan sekarang sebagian masyarakat sadar bahwa sampah itu mempunyai potensi nilai jual atau harga. Sebagian masyarakat sudah mengolah sampah menjadi material yang memiliki

nilai ekonomis, bisa dimanfaatkan kembali, dan tidak berbahaya bagi lingkungan hidup. Bahkan sekarang masyarakat dapat mengolah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai artistik dengan memberinya sentuhan seni, misalnya dengan membuat karya seni dari sampah kering dan sampah elektronik yang mempunyai nilai jual.

Pemisahan sampah organik dan anorganik merupakan hal yang penting dalam upaya untuk menjadikan sampah mempunyai nilai jual. Masyarakat yang memandang sampah memiliki nilai jual memisahkan sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik berupa plastik, kertas, dan sebagainya bisa dijual ke lapak maupun BSM sebagai organisasi berupa koperasi yang merupakan salah satu program pengelolaan sampah Kota Malang.

Semua masyarakat Kota Malang bisa bergabung menjadi nasabah di BSM. Hanya cukup dengan menabung sampah masyarakat bisa membeli sembako dengan sampah, membayar listrik dengan sampah, dan sampah tersebut bisa ditabung dan sewaktu-waktu bisa diambil berupa uang untuk berbagai keperluan nasabah. Bagi masyarakat yang memanfaatkan sampah sedikit banyaknya sudah mampu mengangkat tingkat kesejahteraannya. BSM sebagai lembaga koperasi dalam pengelolaan sampah mendapatkan penghargaan Otonomi Awards dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) yang merupakan penghargaan pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain dari memanfaatkan sampah anorganik, masyarakat juga telah memanfaatkan sampah anorganik untuk dijadikan pupuk organik dan budidaya cacing. Pupuk organik bisa digunakan sendiri oleh masyarakat untuk perkebunan dan pertanian, dengan adanya pupuk organik bisa menghemat pengeluaran petani kerna tidak perlu membeli pupuk lagi, pupuk organik juga bisa dijual ke DKP untuk menghasilkan uang bagi masyarakat.

Masih memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan budidaya cacing bisa menambah pendapatan masyarakat yang mana harga cacing bisa mencapai Rp 35.000,-/Kg. Masyarakat sudah mengetahui bagaimana cara membudidayakan cacing melalui sosialisasi yang dilakukan oleh DKP, selain itu DKP juga mencarikan agen pembeli cacing hasil budidaya dari masyarakat sehingga masyarakat sangat terbantu dan tidak bingung kemana hasil budidaya cacingnya dijual.

Dampak ekonomi lainnya dari pengelolaan sampah adalah dengan penangkapan gas metan pada TPA. Gas metan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar TPA Supiturang yang disalurkan melalui pipa kerumah-rumah. Gas metan ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk memasak sehari-hari, jadi masyarakat tidak perlu membeli gas elpiji lagi dimana gas elpiji skarang sudah sangat mahal. Masyarakat hanya perlu membayar uang iuran Rp 10.000,- setiap bulannya dan sudah bisa menggunakan gas untuk memasak sepuasnya.

Dampak ekonomi bagi DKP selaku instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah dari program-program yang sudah diterapkan adalah sedikit banyaknya sudah bisa mengurangi biaya dibidang operasional, misalnya jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA jadi berkurang dikarenakan timbulan sampah yang ada di TPS sebagiannya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Umur TPA juga bisa bertambah panjang kerna jumlah sampah yang diangkut ke TPA sudah mengalami pengurangan.

3) Lingkungan

Pengelolaan sampah yang baik akan berpengaruh pada kelestarian lingkungan, kualitas air, udara dan tanah. Melalui program-program pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang sedikit banyaknya telah merubah wajah Kota Malang menjadi lebih baik. Melalui program kampung bersih yang di ikuti oleh setiap kelurahan di Kota Malang telah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Masyarakat berlomba-lomba untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya bersih dari sampah untuk mendapatkan juara, sehingga lingkungan tempat tinggalnya dirawat sedemikian baik.

Kader lingkungan juga sangat berperan dalam usaha menjaga lingkungan, kader lingkungan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah kesungai. Salah satu program dari kader lingkungan bersama DKP adalah gerakan membersihkan kali brantas. Kegiatan ini dapat mencegah dan mengurangi pencemaran air. Terbukti dengan

kualitas air disungai Berantas oksigen terlarutnya di atas baku mutu, dan secara umum kualitas air masih bagus (Kepala Bagian Lingkungan Perum Jasa Tirta I, Inni Dian Rohani. <http://www.greeners.co/>).

Pemanfaatan gas metan di TPA Supiturang juga telah membantu pencemaran udara. Sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik. Proses itu menghasilkan gas metana (CH_4). Gas CH_4 mempunyai kekuatan merusak 20 kali lipat dari gas CO_2 , dan merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca. Pemanfaatan gas metan untuk dijadikan energi alternatif telah mencegas lepasnya gas metan tersebut ke udara yang nantinya akan berdampak buruk bagi lingkungan. Dampak lain dari pemanfaatan gas metan yaitu, sampai sekarang belum pernah terjadi kecelakaan di TPA, seperti yang terjadi di Bandung dimana terjadi ledakan akibat gas metan yang tidak ditangani dengan baik, dan ledakan tersebut menyebabkan timbulan sampah longsor dan menimbum pemukiman warga.

2. Skenario Kebijakan Pengelolaan Sampah Sampah Kota Malang

Langkah awal dari pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun setiap permasalahan publik yang terjadi. Dalam upaya untuk membuat skenario kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan pengelolaan sampah yang dialami Kota Malang saat ini. Perumusan masalah dapat memasok

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting) (Dunn, 2003:26). Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam merumuskan skenario kebijakan pengelolaan sampah secara makro dan dengan konsep yang sederhana, maka peneliti menggunakan konsep langkah-langkah pembuatan skenario dari Lindgren dan Banhold yang dinamakan TAIDA (*Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting*).

a. *Tracking*

Tahap *tracking* memberikan pembelajaran tentang masalah pengelolaan sampah Kota Malang. Dalam tahap ini peneliti mengidentifikasi tren, *focal issue* (pemasalahan utama), *constraints* (kendala), dan *driving forces* (kekuatan pendorong) yang akan mempengaruhi masa depan. Tren dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang saat ini adalah pengelolaan sampah terpadu dan pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif.

Pengelolaan sampah terpadu adalah pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dimana masyarakat dituntut untuk memilah, memanfaatkan, dan mengolah sampah. Pengelolaan sampah terpadu di Kota Malang dilaksanakan dalam bentuk pemilahan antara sampah organik dan

anorganik oleh masyarakat. Sampah organik dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan kompos dan sebagai bahan untuk budidaya cacing, dan sampah anorganik dijual ke DKP adapun yang memanfaatkan sampah anorganik untuk dijadikan kerajinan.

Pengelolaan sampah terpadu menuntut masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Seperti yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Malang no 10 tahun 2010 pasal 11 ayat 1 tentang pengelolaan sampah yang mengatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Masyarakat sebagai penghasil sampah memang harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya untuk mengurangi timbulan sampah. Program-program ataupun strategi pengelolaan sampah Kota Malang melihat bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk berjalannya program tersebut dengan baik. Seperti yang diungkapkan DP (L.49) Koordinator lapangan UPT TPA Supiturang.

Dari program-program yang sudah ada kita mengharapkan masyarakat mempunyai kesadaran untuk memisahkan sampah dari rumah tangga. Meskipun kita akui belum semua warga itu melaksanakan tapi sudah ada bibit warga yang sudah mengelolah sampah. Tergantung dengan kesadaran mereka, sesuai dengan UU bahwa pengelolaan sampah tidak hanya tanggungjawab pemerintah semata, tapi juga masyarakat. Untuk menjalankan amanat uu sudah seharusnya masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan sampah tapi masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahkan tidak peduli, kerna belum ada sanksi bagi masyarakat yang tidak peduli terhadap kebersihan, termasuk juga tidak ada sanksi bagi

masyarakat yang tidak memilah sampah rumah tangga mereka masing-masing (Hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2014 jam 09.30).

Permasalahan utama dari program pengelolaan sampah terpadu di kota Malang adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemisahan sampah anorganik dan organik. Pada peraturan daerah Kota Malang no 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah juga telah dijelaskan dalam pasal 12 ayat 3 bahwa setiap orang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Sampah yang sudah dipilah dari rumahtangga akan sangat memudahkan dalam proses pengolahan sampah selanjutnya.

Permasalahan yang muncul dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah adalah banyaknya timbulan sampah di TPS yang mana sudah tercampur antara sampah organik dan anorganik. Sampah yang sudah tercampur tersebut akan susah untuk diolah dan solusinya hanya diangkut ke TPA. Seperti yang diungkapkan YW (L, 34) UPT pengolahan sampah dan air limbah DKP Malang.

Jujur saja, dari masyarakat kita sendiri kebanyakan sampahnya masih belum dipilah, intinya sampah yang masuk ke TPS biasanya sudah tercampur. Untuk pengelolaan sampah dijadikan kompos di TPS, sampah yang sudah tercampur dipisah sebisanya oleh pegawai dari DKP (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Tren selanjutnya adalah mengkonversi sampah menjadi energi alternatif. Pemerintah Kota Malang sudah mulai melakukan konversi sampah menjadi biogas atau sering disebut dengan gas metan. Konversi sampah menjadi gas metan dilakukan di TPA Supiturang, sampai saat sekarang pemanfaatan gas metan sudah bisa dirasakan oleh 300 lebih kepala keluarga

sekitar TPA. Gas metan di aliri kerumah-rumah dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak bagi rumahtangga.

Pengelolaan sampah menjadi energi alternatif membutuhkan banyak biaya. Pengelolaan sampah Kota Malang sepenuhnya masih dikelola oleh pemerintah daerah. Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan permasalahan klasik yang selalu menjadi kendala. Sebagian besar dana yang digunakan dalam pengelolaan sampah sudah terserap habis oleh operasional dan membangun sarana dan fasilitas pengelolaan sampah. Banyak program-program yang sudah direncanakan oleh DKP tidak berjalan karena besarnya anggaran, seperti pemanfaatan limbah hasil presan sampah di SPA, dan juga belum adanya anggaran untuk pengelolaan sampah dengan metode *sanitary landfill* untuk dapat memanfaatkan sampah untuk dikonversi menjadi gas metan di TPA. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

Kita masih punya kendala di terbatasnya anggaran untuk pengelolaan sampah, kita belum bisa menerapkan teknologi yang lebih canggih dalam pengelolaan sampah, bahkan untuk *sanitary landfill* kita belum bisa karena butuh biaya yang besar, sementara anggaran kita sudah terserap untuk angkutan rutin seperti BBM, perawatan alat, serta untuk operasional penyapuan jalan (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Adapun faktor pendorong dari pengelolaan sampah Kota Malang adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah Kota Malang sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah merupakan kekuatan pengelolaan sampah Kota Malang. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah

didukung dengan adanya edukasi pemilahan sampah dan seminar serta pelatihan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Edukasi dan pelatihan sudah membangkitkan semangat cinta lingkungan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah.

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DKP, misalnya seperti dalam mengikuti lomba lingkungan setiap tahunnya semakin meningkat. Selain itu juga bisa dilihat dari partisipasi masyarakat dalam bank sampah, unit bank sampah tersebar sudah hampir disetiap RW yang ada di Kota Malang. Bank sampah ini semakin berkembang karena paradigma masyarakat tentang sampah sudah berubah, dimana masyarakat yang awalnya anti dalam pengelolaan sampah menjadi tertarik dan berpartisipasi aktif karena mereka juga merasa mendapatkan keuntungan dari segi ekonomis. Hal ini melihat bahwa Kota Malang telah berhasil melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat kota malang sudah memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang yang berguna, hal ini juga merupakan kekuatan dari pengelolaan sampah Kota Malang. Pemanfaatan sampah meliputi proses mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. Sampah jika tidak diperlakukan dengan benar dapat menimbulkan masalah yang serius bagi manusia, oleh karenanya sampah harus diperlakukan dengan benar dan ditangani dengan serius dengan memanfaatkan sampah tersebut sebaik

ungkinan. Pemerintah Kota Malang melalui DKP sudah berhasil memanfaatkan sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, dapat dilihat dari volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Malang setiap harinya dan sampah yang masuk ke TPA, dimana. volume sampah yang dihasilkan setiap harinya adalah 659,21 ton dan sampah yang masuk ke TPA sekitar 464,74 ton setiap harinya. Pemanfaatan sampah mengurangi jumlah timbulan sampah yang akan masuk ke TPA dan berdampak ketersediaan lahan di TPA bisa berlangsung cukup lama.

Bentuk pemanfaatan sampah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang diantaranya adalah pemanfaatan sampah organik untuk pembuatan kompos dan budidaya cacing kompos dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman karena dapat memperbaiki struktur tanah, dan cacing hasil budidaya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti ternak lele. Sampah anorganik dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk berbagai kerajinan, selain itu sampah anorganik melalui BSM dimanfaatkan untuk di daur ulang. Selain itu sampah juga dimanfaatkan untuk membuat energi alternatif, yaitu pemanfaatan gas metan dari timbulan sampah untuk dijadikan bahan bakar rumah tangga menggantikan minyak tanah ataupun elpiji.

b. Analysing

Langkah selanjutnya dari TAIDA adalah *analysing*. Pada tahap *tracking* telah dilakukan identifikasi tren, *focal issue* (pemasalahan utama),

constraints (kendala), dan *driving forces* (kekuatan pendorong) yang akan mempengaruhi masa depan, maka pada tahap *analysing* bertujuan untuk menemukan konsekuensi masa depan dari perubahan di masa sekarang, dan interaksi antara tren dan kecenderungan. Pada tahap *tracking* sudah dipaparkan bahwa tren dalam pengelolaan sampah saat ini adalah pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan konversi sampah menjadi energi alternatif.

Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Dalam pengertian ini pemeran (kekuatan utama) dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat. Bukan pemerintah atau lembaga lainnya seperti LSM dan lain-lain. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Fungsi fasilitator adalah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah secara baik dan berkesinambungan. Jika masyarakat mempunyai kelemahan dibidang teknik pemilahan dan pengomposan maka tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan masyarakat dengan berbagai cara misalnya dengan memberikan pelatihan, begitu juga jika masyarakat lemah dalam hal pendanaan, maka tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar masyarakat mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan.

Bentuk usaha pemerintah sebagai fasilitator adalah dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang

pengelolaan sampah. Selain itu pemerintah juga telah memberikan bantuan bagi RW-RW berupa tong komposer beserta gerobak untuk pengelolaan sampah. Pemerintah juga telah mendirikan kader lingkungan sebagai lembaga untuk memotivator masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah terpadu dilakukan dengan konsep 3R yang diharapkan dapat memenuhi konsep pengelolaan sampah menuju zero waste. Konsep 3R yang berprinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah dapat mereduksi timbulan sampah, sehingga dengan diterapkannya sistem pengelolan sampah terpadu berbasis 3R dapat mengurangi timbulan sampah mulai dari sumbernya.

Adapaun kecendrungan yang terjadi dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2008 dan peraturan daerah Kota Malang nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab dari pemerintah Kota Malang. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, tentunya kebijakan dan strategi ini harus mengikuti atau berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

Tren selanjutnya adalah konversi sampah menjadi energi alternatif. Namun kecendrungan yang terjadi adalah terbatasnya anggaran untuk

pengelolaan sampah. Terbatasnya anggaran sudah merupakan alasan klasik yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah. Anggaran pengelolaan sampah sepenuhnya masih dari pemerintah daerah kerna belum adanya kerjasama dengan pihak swasta. Anggaran yang ada sebagian besar selalu terpakai untuk kepentingan operasional pengelolaan sampah. Anggaran sangat menentukan kearah manah pengelolaan sampah akan dibawa, apakah kearah yang modern dengan teknologi yang canggih atau kearah tradisional dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan semaksimal mungkin. Seperti yang diungkapkan YW (L, 34) UPT pengolahan sampah dan air limbah DKP Malang.

Untuk melakukan pengelolaan sampah yang terbaik, DKP memiliki kendala seperti keterbatasan alat dan dana, kerna untuk mendatangkan alat dengan teknologi yang lebih maju seperti alat penghancur sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh kerna itu, DKP berusaha menggunakan sumberdaya yang ada dengan biaya yang relatif murah, seperti pemanfaatan sampah organik untuk dijadikan kompos. Opsi ini juga tidak terlalu banyak membantu pencegahan penumpukan sampah pada TPS, dikarenakan terbatasnya SDM dan bahan yang digunakan untuk pembuatan kompos susah dipisahkan kerna di TPS sampah organik dan anorganik sudah tercampur (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2014 jam 9.30).

Terbatasnya anggaran tidak memungkinkan pengelolaan sampah Kota Malang untuk menggunakan teknologi yang lebih modern dan canggih, oleh kerna itu pemerintah Kota Malang harus memanfaatkan teknologi sederhana seefektif mungkin dalam upaya pengelolaan sampah. Teknologi sederhana seperti apa? Disini pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, masyarakat sebagai penghasil sampah wajib memisahkan sampah organik dan anorganik dari sumbernya. Jika sampah organik dan anorganik

sudah dipisah dari sumbernya sampah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi penumpukan di TPS maupun di TPA.

c. *Imaging*

Langkah selanjutnya dalam TAIDA adalah *imaging*, yaitu penggambaran masa depan atau visi. Visi yang dimaksud disini adalah keadaan yang diinginkan pada masa yang datang. Visi Kota Malang berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2013-2018 adalah terwujudnya Kota Malang sebagai kota “BERMARTABAT”. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. Seperti yang diungkapkan LP (P, 50 tahun) KABID Kebersihan.

RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan kepala daerah terpilih, periode sekarang tahun 2013-2018. RPJMD dijabarkan oleh Walikota yang berpedoman kepada RPJPD, RPJPD atau rencana pembangunan jangka panjang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Setelah penjabaran atau penyusunan RPJMD selesai selanjutnya dijadikan perda dan disahkan oleh DPRD (Hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2014 jam 10.00).

Visi Kota Malang yang tercantum dalam RPJMD adalah untuk mewujudkan Kota Malang BERMARTABAT. Visi BERMARTABAT dapat

menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: BERSih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Sesuai dengan visi tersebut pemerintah periode sekarang ingin mewujudkan kota yang bersih, lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah. Sehingga Kota Malang menjadi Kota yang aman untuk ditinggali, terbebas dari gangguan seperti bau dari tumpukan sampah. Selain itu masyarakat Kota Malang juga mendambakan kota yang asri dimana terdapat keindahan, kesegaran udara dan kebersihan lingkungan. Untuk mewujudkan semua itu pemerintah Kota Malang juga menekankan masyarakat yang berbudaya, yaitu masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan budaya gotong royong.

d. Deciding

Visi Kota Malang yang terdapat dalam draf RPJMD memuat dua poin yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, yaitu bersih dan asri. DKP merupakan dinas yang diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, maka oleh karena itu visi DKP disesuaikan dengan tujuan RPJMD. Dimana visi dari DKP adalah mewujudkan kota malang sebagai kota yang bersih, nyaman, asri dan ijo royo-royo menuju malang berkicau. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka DKP menetapkan misi seperti; Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, menerapkan pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis pemberdayaan masyarakat untuk

menumbuhkan kesadaran dan menambah pendapatan, dan mengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Seperti yang diungkapkan DP (L,49) Koordinator lapangan UPT TPA Supiturang.

Visi DKP ini adalah mewujudkan kota malang sebagai kota yang bersih, nyaman, asri dan ijo royo-royo menuju malang berkicau. Visi ini merupakan bentuk turunan dari Visi yang terdapat dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018. Misi utama DKP adalah meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan dengan menerapkan pengelolaan sampah melalui 3R. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kita melakukan pengelolaan sampah dengan 3 strategi, yaitu strategi pada tingkat hulu, antara, dan hilir. Nanti pada tingkat hulu hingga hilir juga mempunyai strategi-strateginya sendiri.

Strategi pengelolaan sampah Kota Malang saat ini yang beranjak dari misi untuk menerapkan pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan menambah pendapatan adalah dengan mendirikan BSM, pembuatan kompos, budidaya cacing, lombah lingkungan bersih, dan membuat kader lingkungan.

e. Acting

Acting merupakan langkah terakhir dalam TAIDA, tahap ini menempatkan strategi yang telah diputuskan ke dalam sebuah tindakan. Strategi yang telah digunakan DKP dalam pengelolaan sampah adalah mendirikan BSM, pembuatan kompos, budidaya cacing, lombah lingkungan bersih, dan membuat kader lingkungan. Maka tindakan yang diambil oleh DKP untuk mendukung terwujudnya strategi tersebut adalah dengan

mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Langkah yang sudah diambil DKP adalah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah. Seperti yang diungkapkan DP (L,49) Koordinator lapangan UPT TPA Supiturang.

Kami melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, masyarakat diajarkan bahwa sampah mempunyai nilai ekonomi yang bisa menambah pendapatan. Kami juga menjelaskan macam-macam jenis sampah dan juga proses pengolahannya (Hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2014 jam 09.30).

Selain itu DKP juga memfasilitasi masyarakat dengan alat-alat yang diperlukan untuk mengolah sampah. Seperti yang diungkapkan YW (L, 34) UPT pengolahan sampah dan air limbah DKP Malang.

Kami tidak hanya memberikan sosialisasi tetapi juga menghibahkan beberapa peralatan pengelolaan sampah kepada RW-RW, seperti memberikan tong komposer yang bisa digunakan untuk pembuatan kompos (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2014 jam 9.30).

C. Analisis Data

1. Potret pengelolaan sampah Kota Malang

a. Program-program pengelolaan sampah Kota Malang

Sampah saat ini telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Semakin tingginya jumlah penduduk dan aktivitasnya, membuat volume sampah terus meningkat. Kota Malang sebagai kota terbesar nomor dua di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 895.338 jiwa dan penduduk tidak tetap dengan jumlah 300.000 jiwa setiap tahunnya. Besarnya jumlah penduduk tidak tetap

dikarenakan Kota Malang merupakan kota pelajar dan kota tujuan pariwisata. Sebagai kota pelajar dan kota tujuan pariwisata, Kota Malang mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan pembangunan dimana-mana. Pembangunan dan tingginya jumlah penduduk berdampak pada volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Apabila sampah-sampah tersebut dibiarkan, akan terjadi penimbunan sampah yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Selain itu, polusi udara, tanah, dan air yang disebabkan oleh sampah juga dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia.

Bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam mengatasi dan mengelola persoalan mengenai sampah adalah telah dirumuskannya Peraturan daerah Kota Malang nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Perda pengelolaan sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah yang dimaksud meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya serta pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara kemudian ke tempat pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga harus

bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Ini berarti harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah. Mengacu pada Perda pengelolaan sampah, untuk mengatasi masalah dibutuhkan program-program pengelolaan sampah agar tidak hanya menjadi timbunan sampah di TPA, tetapi menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai guna dan nilai jual.

Basriyanta (2011:18) mendefenisikan sampah sebagai barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Apabila sampah dikelola secara benar dan tepat akan memiliki peluang untuk dimanfaatkan lebih lanjut dan bernilai ekonomi. Maka dari itu persepsi kita tentang sampah yang tidak berharga harus kita ubah menjadi sampah itu memiliki potensi *value* atau harga. Caranya dengan mengolah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, bisa dimanfaatkan kembali, dan tidak berbahaya bagi lingkungan hidup.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota yang bersih, nyaman, asri, dan ijo royo-royo menuju Malang berkicau yang merupakan visi dari DKP serta juga menyadarkan masyarakat akan peduli lingkungan dan mengubah persepsi masyarakat tentang sampah yang memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu pemerintah Kota Malang membuat program-program penanganan masalah sampah yang menyeluruh dari hulu hingga hilir yang berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah dan Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Tingkat hulu, merupakan pengelolaan sampah yang dilakukan pada sumber timbulan sampah yaitu pada tingkat rumah tangga. Pemerintah Kota Malang berusaha mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPS/TPA dengan cara mengolah sampah langsung pada sumber dimana sampah dihasilkan. Oleh karena itu masyarakat diminta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, dimana juga tercantum dalam amanat undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang berbunyi “setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.

Masyarakat diwajibkan untuk mengolah sampah yang mereka hasilkan sendiri, Maka dari itu DKP melakukan pemberdayaan masyarakat. Dimana pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya (Wibowo, 2011:415). Pemberdayaan mendorong masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan sampah, menyelesaikan langsung masalah sampah yang mereka hasilkan sendiri dan diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam pengolahan sampah.

Pada intinya sampah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Dalam hal pengelolaan sampah, ada

beberapa alternatif yang bisa diterapkan sesuai dengan jenis sampah. Sampah anorganik bisa dimanfaatkan untuk dipakai ulang, dijual, dan didaur ulang. sedangkan sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai makanan ternak, pengomposan, dan biogas. Dalam upaya untuk mewujudkan itu, pemerintah Kota Malang membuat program-program seperti BSM, pengomposan, budidaya cacing, dan lomba kampung bersih.

Beranjak dari usaha untuk memanfaatkan sampah tersebut, maka dibentuklah BSM sebagai wadah untuk mengolah dan membeli sampah anorganik dari masyarakat. BSM (Bank Sampah Malang) adalah instansi dengan berbadan hukum koperasi yang diperuntukkan sebagai wadah untuk membina, mengumpulkan, dan mengolah sampah rumah tangga yang bertujuan sebagai untuk membantu tugas pemerintah Kota Malang dalam penyadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dari sumber (rumah tangga). Sebagai wadah untuk membina masyarakat, BSM melakukan sosialisasi yang berupa informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dari sampah, cara memilah sampah dan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik sehingga bisa dimanfaatkan.

Berdirinya BSM menjadi momentum awal membina masyarakat untuk mulai memilah dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Sampah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk menunjang perekonomian. Menjadi nasabah BSM sangat membantu perekonomian masyarakat kota malang, terutama masyarakat menengah kebawah. Program-program yang diberikan oleh BSM seperti beli sembako

dengan sampah, bayar listrik dengan sampah, asuransi kesehatan dengan sampah, dan bahkan nasabah bisa menabung dan meminajm uang di BSM. Adanya BSM juga menciptakan peluang usaha bagi masyarakat di bidang kerajinan. Masyarakat bisa mereduksi sampah anorganik menjadi karya seni yang bernilai ekonomis. BSM ada sebagai wadah untuk mempromosikan hasil karya dari masyarakat. Banyaknya manfaat yang dirasakan dari BSM membuat masyarakat Kota Malang mulai membudayakan memilah sampah untuk dimanfaatkan sebagai barang yang bernilai ekonomis.

BSM sangat membantu perekonomian masyarakat mengah kebawah, namun demikian BSM hanya sedikit mengurangi timbulan sampah yang ada. Dari volume sampah sebesar 659,21 ton/hari BSM hanya menampung sampah 3-5 ton/hari. Hal ini masih jauh dari apa yang diharapkan, kurang efektifnya BSM dikarenakan masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk memilah sampah. Selain itu hambatan lainnya seperti luas lahan BSM yang kurang mendukung untuk menampung sampah dan terbatasnya area jangkauan pelayanan BSM.

Program lainnya dari DKP dalam pengelolaan sampah yaitu pengomposan. Sebagai upaya untuk mendukung masyarakat dalam membudayakan memilah sampah, maka pengomposan sebagai alternatif pemanfaatan sampah organik yang sudah dipilah oleh masyarakat. Sampah organik merupakan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat, yaitu sekitar 61,50%. Sampah organik ini dikalngn masyarakat

kurang memiliki nilai ekonomis, kerna pengolahannya cukup susah dan berbeda dari sampah anorganik yang tinggal dipilah dan bernilai ekonomis.

Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Secara alami jika sampah organik dibiarkan terurai dengan sendiri tetap akan menjadi kompos, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh kerna itu, masyarakat didorong untuk melakukan pengomposan skala rumah tangga. Dengan cara seperti itu, banyak manfaat yang bisa diperoleh, seperti lingkungan menjadi bersih dan nyaman, dapat menghasilkan produk yang bermanfaat, dan tentu saja dapat menambah pendapatan warga dari hasil penjualan kompos.

Strategi pengomposan dibagi menjadi pengomposan skala rumah tangga dan pengomposan oleh DKP di tempat pembuangan sementara yang disebut dengan rumah kompos. Pengomposan skala rumah tangga sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, peran pemerintah hanya memberikan pembinaan dan memfasilitasi jika masyarakat ingin menjual hasil kompos. Sedangkan pengomposan oleh DKP di TPS dilakukan sepenuhnya oleh pegawai dari DKP, yang mana hasil dari kompos tersebut dimanfaatkan untuk penghijauan taman kota.

Pengomposan skala rumah tangga masih jauh dari apa yang diharapkan, hanya segelintir kecil masyarakat yang memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan kompos. Hal ini disebabkan kerna terbatasnya lahan maupun tempat untuk pembuatan kompos. Kebanyakan fakta yang ada di

lapangan melihat bahwa pengomposan hanya terjadi pada skala RT/RW, dimana kompos dimanfaatkan untuk penghijauan taman dan sebagai indikator penilaian dari lomba lingkungan yang diadakan oleh DKP.

Kurang diminatinya pengomposan sebagai alternatif pemanfaatan sampah organik, maka muncul inovasi baru dari masyarakat dengan memanfaatkan sampah organik sebagai wadah untuk budidaya cacing. Budidaya cacing dianggap lebih memiliki nilai ekonomis dari pada pengomposan, selain itu sisa bahan dari hasil budidaya cacing yang disebut kasting juga bisa dimanfaatkan sebagai media tanam layaknya pupuk organik. Budidaya cacing mempunyai pasar yang lebih banyak dan beragam. Bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan bahan baku obat-obatan dan kosmetik.

Peran pemerintah dalam upaya untuk mendukung inovasi budidaya cacing dari masyarakat adalah dengan cara memberikan pelatihan agar masyarakat paham secara mendalam mengenai metode dan cara pembudidayaan cacing yang baik. Pelatihan yang diberikan oleh DKP telah mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya cacing, hal ini dikarenakan budidaya cacing merupakan usaha yang berkelanjutan dengan perawatan yang mudah, bahan utama yang sangat mudah ditemukan yaitu hanya memanfaatkan sampah organik dan terlebih lagi berternak cacing kemungkinan untungnya sangat besar. Memelihara cacing sedikit banyaknya dapat membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah

(TPS). Lebih dari itu, juga bisa membuat lingkungan sekitar rumah menjadi lebih bersih. Sebab sampah organik semuanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya cacing.

Inovasi masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti budidaya cacing lahir dari adanya lomba lingkungan bersih antar RW yang di adakan oleh DKP. Lomba lingkungan bersih merupakan salah satu bentuk program terobosan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DKP dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui lomba lingkungan masyarakat digerakan utuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka dan mengolah sampah yang mereka hasilkan dari kegiatan sehari-hari.

Lomba lingkungan bersih sudah dilakukan dalam 3 bentuk lomba, yang pertama adalah lomba *green and clean*, selanjutnya lomba kampung bersinar dan yang terakhir lomba kampung *zero waste*. Lomba lingkungan ini cukup efektif kerna memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan terlihat nyata dengan adanya kemauan dari masyarakat untuk mengolah sampah yang ada dilingkungannya. Hadiah yang ditawarkan DKP dalam lomba ini membuat masyarakat lebih bersemangat untuk membuat lingkungannya menjadi yang terbaik, sehingga banyak terobosan atau inovasi-inovasi terlahir dari masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah. Lomba lingkungan ini merupakan lomba berkelanjutan, kerna penilaiannya dilakukan sebanyak 3 kali dalam rentang waktu tertentu, sehingga masyarakat merawat lingkungannya dengan cara berkelanjutan. Hal ini sangat efektif kerna bisa

menjaga keberlangsungan kebersihan yang sudah dibuat oleh masyarakat dengan cara menjaganya terus-menerus.

Semua program-program yang telah dibuat dan dijalankan oleh pemerintah akan memiliki banyak kendala jika tidak ada yang membantu dilapangan untuk menyampaikan program-program itu ke masyarakat. Maka oleh kerna itu pemerintah membentuk yang namanaya kader lingkungan. Kader lingkungan adalah masyarakat atau aktifis pecinta lingkungan yang mengabdikan dirinya secara sukarela untuk membantu menciptakan kebersihan dilingkungan tempat tinggalnya. Kaderlingkungan ini persisnya adalah kepanjanagn tangan dari DKP yang merupakan mitra kerjanya di masyarakat.

Pemerintah berperan dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi dimasyarakat tentang pengelolaan sampah, maka setelah itu kader lingkunganlah yang berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk menjalankan program-program yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah tersebut. Peran kader lingkungan ini sangat besar dimasyarakat dalam pengelolaan sampah, mereka selalu mengawasi dilapangan agar program-program pemerintah bisa dijalankan dengan baik di masyarakat.

Selanjutnya strategi pengelolaan sampah ditingkat antara, program yang dilakukan oleh DKP adalah dengan membangun TPS ,TPS 3R, stasiun peralihan antara (SPA), dan pemberdayaan pemulung. Dari data tahun 2014, jumlah TPS dikota Malang adalah sebanyak 68, 12 diantaranya merupakan TPS 3R dan satu SPA. TPS 3R dilengkapi dengan rumah kompos, dimana

sampah organik dimanfaatkan untuk dijadikan kompos, berbeda dengan TPS biasa yang hanya ada tempat penampungan sampah. SPA merupakan tempat pembuangan sementara yang dilengkapi dengan mesin untuk memadatkan sampah, sampah yang masuk akan dipadatkan untuk mengurangi volumenya.

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tingkat hulu menyebabkan besarnya timbunan sampah pada TPS. Strategi pengelolaan antara berperan untuk mereduksi sampah yang ada di TPS sehingga dapat mengurangi volume timbunan sampah yang akan masuk ke TPA. Upaya pengelolaan sampah tingkat antara mengalami banyak kendala, hal ini dikarenakan susahnyanya mengolah sampah yang sudah tercampur antara sampah organik dan anorganik, sehingga hanya sebagian kecil yang bisa dipisahkan oleh petugas untuk dimanfaatkan sebagai kompos. Hal ini juga disebabkan minimnya sumber daya manusia yang ada di TPS.

Pemberdayaan pemulung dilakukan oleh DKP sebagai upaya untuk menambah tenaga dalam upaya pengelolaan sampah tingkat antara. DKP melihat peluang dengan adanya pemulung akan membantu memilah dan mengurangi volume sampah. Pemulung diperbolehkan untuk mengambil sampah yang menurut mereka bisa dimanfaatkan untuk dijadikan uang dengan catatan untuk sasama menjaga fasilitas yang ada di TPS. Pemberdayaan pemulung cukup membantu dalam upaya mengurangi timbunan sampah pada TPS, terutama sampah organik, kerna bagi pmulung sampah organik bisa dijual langsung tanpa perlu pemrosesan lebih lanjut.

Strategi terakhir dari DKP dalam pengelolaan sampah adalah tingkat hilir, pada tingkat ini program pengelolaan sampah yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sampah untuk dijadikan gas metan. Pengelolaan sampah di TPA supiturang menggunakan sistem *controlled landfill*, yaitu dimana sampah dipadatkan menjadi sebuah sel. Kemudian, sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan. Selain itu, dibuat juga saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindi (leachate) dan instalasi pengolahannya, pos pengendalian operasional, dan fasilitas pengendalian gas metan.

Controlled landfill adalah sistem pembuangan yang lebih berkembang dibanding open dumping. Pada Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2008 pemerintah sudah melarang penggunaan sistem *open dumping*, kerna dianggap berbahaya bagi lingkungan. Kenyataannya pada TPA supiturang yang sudah menggunakan sistem *controlled landfill* masih terdapat pengelolaan yang mengarah ke *open dumping*, yaitu masih adanya pembuangan terbuka di TPA Supiturang. Hal ini disebabkan banyaknya volume sampah yang masuk setiapharinya sehingga tidak sesuai dengan sumber daya manusia maupun mesin yang ada di TPA Supiturang untuk mewujudkan terciptanya *controlled landfill* sepenuhnya.

b. Teknik operasional persampahan Kota Malang

Operasional persampahan adalah Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan.

Operasional pengelolaan sampah di kelompokan menjadi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan penyingkiran sampah (Damanhuri dan Padmi, 2011:89).

1) Pewadahan

Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya. Pewadahan dibedakan menjadi dua yaitu pewadahan komunal dan individual. Kota Malang menggunakan pewadahan individual, yaitu dimana wadah untuk pembuangan sampah ditempatkan di depan rumah atau bangunan lainnya, yang merupakan tanggung jawab dari pemilik rumah atau bangunan. Pada umumnya pewadahan tidak dilakukan dengan pemisahan jenis sampah tertentu tetapi pewadahan hanya berbentuk satu tong yang di isi dengan semua jenis sampah, dan adapun rumah tangga yang tidak memiliki wadah sampah yang hanya menggunakan kantong kresek dan digantung di pagar rumah..

2) Pengumpulan

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan sampai ketempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal. Pengumpulan sampah Kota Malang menggunakan pola individual dimana Proses pengumpulan sampah

dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ketempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA. Pengumpulan sampah dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah dan sepeda motor bak tertutup. Gerobak sampah maupun motor bak tertutup tidak dilengkapi dengan pemisah sampah organik dan anorganik, semua sampah yang diambil dari sumbernya akan tercampur dalam gerobak. Jika pun ada sampah yang dipisahkan dari sumbernya, ketika pengumpulan sampah tersebut akan tercampur dalam satu gerobak. Upaya masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik akan menjadi sia-sia.

3) Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Pengangkutan dilakukan menggunakan truk dan *arm-roll*. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Permasalahan sering terjadi dalam proses pengangkutan berupa kurangnya jumlah truk dikarenakan mogok dan alasan lainnya yang menyebabkan terlantarnya sampah di TPS yang akan mengganggu masyarakat disekitarnya kerna bau busuk dari sampah tersebut. Hal lain yang sering terjadi adalah overload dari truk pengangkut yang menyebabkan sampah yang sudah dimuat terkadang bisa jatuh berserakan dijalan kerna kelebihan beban.

c. Dampak dari program-program pengelolaan sampah Kota Malang

Program-program pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang telah membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat. Program-program tersebut telah mempengaruhi dan memberi kesan yang baik sehingga masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Dampak yang sudah dirasakan masyarakat dari program pengelolaan sampah dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

1) Sosial

Program pengelolaan sampah telah merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur. Melalui sosialisasi dan pelatihan, masyarakat diberitahu dampak yang bisa ditimbulkan sampah jika tidak dikelola dengan baik dan juga apa manfaat yang bisa diambil jika sampah dikelola dengan baik. Sosialisasi dan pelatihan telah berhasil membuat masyarakat tersadar akan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah, oleh kerna itu masyarakat sudah mulai berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, walaupun jumlahnya masih relatif kecil. Seperti yang dikatakan Damanhuri dan Tri (2011:8) bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu.

Hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiasakan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan mengadakan lomba lingkungan bersih, dengan adanya lomba ini masyarakat dibiasakan untuk mengelolah sampah yang mereka hasilkan sendiri.

2) Ekonomi

Pada dasarnya, sampah merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Artinya, sampah memiliki nilai ekonomi jika manusia dapat mengolahnya dengan cara atau metode tertentu. Melihat dari jenisnya sampah dapat dimanfaatkan dengan penerapan teknologi pengolahan 3R untuk sampah anorganik, penerapan teknologi pengolahan biologi dengan kompos dan budidaya cacing untuk sampah organik, dan penerapan teknologi pengolahan dengan penimbunan akhir untuk memanfaatkan sampah di TPA yang sudah tercampar untuk ditangkap gas metannya.

Penerapan konsep penanganan sampah dengan pengolahan 3R dan pengolahan kompos berbasis pada aktivitas pemilahan pada pola reduksi di sumber, di mana dilakukan pemisahan terhadap komponen yang masih dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali secara langsung. Sebagian masyarakat sudah mulai paham dan merubah persepsinya bahwa sampah mempunyai nilai ekonomis, oleh kerna itu masyarakat mulai memisahkan antara sampah organik dan anorganik yang bisa dimanfaatkan. Sebagai pendukung dari usaha masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah pemerintah mendirikan BSM

sebagai wadah untuk membina, melatih, mendampingi sekaligus membeli dan memasarkan hasil dari kegiatan pengelolaan sampah dari hulu/sumber masyarakat Kota Malang dalam rangka pengurangan sampah di TPS/TPA dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sampah dengan program 3R (reduce, reuse dan recycle). Usaha ini dinilai cukup berhasil dengan diterimanya penghargaan Otonomi Awards dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), yakni penghargaan pemberdayaan ekonomi lokal berupa piala silver, dan grand award pengembangan ekonomi Jatim berupa piala gold.

2. Skenario Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Malang

Ringland (2002:2) yang mengutip beberapa pendapat ahli seperti Michael Porter mengatakan skenario adalah “... *an internally consistent view of what the future might turn out tu be not a forecast, but one possible future outcome*” (“...secara lebih dalam menggambarkan apa yang akan dihasilkan pada masa yang akan mendatang, namun itu bukan proses peramalan, tetapi suatu kemungkinan hasil yang akan terjadi pada masa yang akan datang”). Skenario lebih memaparkan kondisi yang rasional dan masuk akal, dimana dipaparkannya berbagai kemungkinan di masa depan. Skenario dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Skenario dapat berfungsi sebagai inspirasi untuk menghasilkan suatu ide dan kebijakan. Ringland (2002:6) lebih lanjut menyatakan penggunaan skenario dalam sektor publik bertujuan untuk:

- (1) *Imagine new customers and new political environments* (“membayangkan pelanggan dan lingkungan politik yang baru”).
- (2) *To deal with the new challenges, such as e-commerce and e government* (“untuk mempersiapkan diri dengan tantangan baru, seperti *e-commerce* dan *e government*”).
- (3) *To encourage participation and debate about the future in countries, cities and regions* (“untuk mendorong partisipasi dan diskusi mengenai masa depan dalam level negara, provinsi, dan kabupaten/kota”).

Skenario dengan kemampuan untuk menggambarkan apa yang akan dihasilkan pada masa yang akan datang dapat dimanfaatkan sebagai langkah untuk membuat pilihan-pilihan atau strategi kebijakan untuk kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang. Kemampuannya dalam mengidentifikasi lingkungan kebijakan, ketidakpastian, perubahan-perubahan dimasa depan merupakan alasan terbaik digunakannya skenario dalam penelitian ini. Karena dengan mengetahui lingkungan kebijakan yang mungkin muncul, DKP selaku perumus kebijakan tentang pengelolaan sampah dapat menyusun langkah-langkah dan strategi untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Skenario terbentuk dari beberapa tahapan atau langkah-langkah, begitu juga dengan membangun skenario kebijakan pengelolaan sampah Kota Malang. Berdasarkan proses pembuatan skenario yang digagas oleh Lindgren dan Bandhold terdapat lima tahapan yaitu yang disebut dengan analisis TAIDA (*Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, Acting*). Pada bab ini,

proses pembuatan skenario dibatasi pada tahapan *Tracking*, *Analyzing*, dan *Imaging*. Skenario dibuat sampai tahapan sajian dalam bentuk pilihan-pilihan logis yang membantu memberikan usulan dan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan mengenai metode yang tepat untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik, terukur dan komprehensif, sehingga bisa menjadi acuan tangguh dalam membuat kebijakan.

a. *Tracking*

Langkah pertama dalam menyusun skenario adalah *Tracking*, yaitu dalam tahap ini dilakukan identifikasi isu atau masalah secara spesifik, dimana peneliti harus mengidentifikasi isu utama atau masalah utama, dalam hal ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pengelolaan sampah Kota Malang. Langkah selanjutnya yaitu dengan menetapkan faktor kunci yang diperkirakan dimasa depan bisa mempengaruhi pembuat kebijakan ketika mengambil keputusan. Hal terakhir yang dilakukan dalam *Tracking* adalah penelusuran perubahan dan tanda-tanda keberadaan tantangan dan peluang, serta juga mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Sampah telah menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Semakin tingginya jumlah penduduk dan aktivitasnya, membuat volume sampah terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, yang terbaru adalah dengan mengeluarkan undang-undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang ini mengamanatkan pengelolaan

sampah dengan sistem pengelolaan sampah secara terpadu berbasis masyarakat.

Pengelolaan sampah terpadu adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, dan berbasis masyarakat dimaksudkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. (UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dinilai tepat dan dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan sampah kota. Adapun konsep pengelolaan sampah terpadu meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan. Sistem pengelolaan sampah terpadu merupakan kombinasi dari sistem pengelolaan sampah dengan cara daur ulang, pengomposan dan sistem pembuangan akhir dengan cara landfill.

Kota Malang dengan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah yang berpedoman pada undang-undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga telah menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dengan penanganan masalah sampah yang menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan melakukan program-program seperti BSM, pembuatan kompos, budidaya cacing, lomba lingkungan bersih, pembuatan TPS 3R, dan penangkapan gas metan. Pada tingkat hulu yakni sampah dari rumah tangga masyarakat melakukan kegiatan pemilahan

antara sampah organik dan anorganik, sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan dijual masyarakat ke BSM sedangkan sampah organik diolah untuk dijadikan kompos. Pada tingkat antara, yakni pada TPS masih ada kegiatan pemilahan yang dilakukan oleh pemulung dan pegawai dari DKP. Sedangkan pada tingkat hilir, yakni TPA dilakukan penimbunan dengan sistem *landfill* dan dilakukan penangkapan gas metan.

Penerapan program-program yang telah dibuat pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah dengan sistem terpadu tidaklah berjalan dengan lancar dan mudah, mengalami banyaknya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Permasalahan tersebut terjadi dikendalikan oleh terbatasnya armada pengangkut, terbatasnya anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya, teknologi pengolahan sampah yang masih terbatas, hingga kendala minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) soal penanganan sampah.

Melihat dari permasalahan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa faktor kunci dari pengelolaan sampah Kota Malang ini adalah partisipasi masyarakat dan anggaran. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Anggaran yang cukup besar akan membuat proses pengelolaan sampah akan lebih mudah, dikarenakan bisa mendatangkan alat-alat pengelolaan sampah yang sudah canggih seperti yang digunakan di negara-negara maju. Tapi permasalahannya, Kota Malang hanya memiliki anggaran yang terbatas untuk pengelolaan sampah, oleh kerna itu partisipasi dari masyarakat sangat

dibutuhkan dalam pengelolaan sampah, kerna kunci keberhasilan program-program dari pemerintah adalah justru di pemilahan awal oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi peluang dalam usaha pengelolaan sampah pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Hal ini didukung dengan bahwa sampah sekarang bukanlah barang menjijikan yang tidak mempunyai nilai ekonomi tetapi sampah apabila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selanjutnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana pemerintah mengubah persepsi masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

b. *Analyzing*

Langkah kedua dalam menyusun skenario adalah *analyzing*. Lindgrend and Bandhold (2003:60) mengatakan *The analysing phase is about identifying drivers and consequences in order to understand how the identified trends interact* (Tahap analisis adalah tentang mengidentifikasi driver dan konsekuensi untuk memahami bagaimana tren yang telah diidentifikasi berinteraksi). Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai konsekuensi yang dapat muncul akibat keberadaan tantangan dan peluang. Analisis terhadap konsekuensi tersebut dilakukan melalui identifikasi sumber masalah utama (*focal concern*) pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Malang. Di dalam langkah ini, peneliti mencoba mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan *driving forces*. Secara umum, dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, *driving forces*

yang sering sekali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor politik dan faktor ekonomi.

Sumber masalah utama (*focal concern*) pengelolaan sampah Kota Malang yang sudah ditemukan dalam tahap *tracking* adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan terbatasnya anggaran untuk pengelolaan sampah. Anggaran atau aspek pembiayaan merupakan sumberdaya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan di Kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Damanhuri dan Tri (2013:3) mengatakan sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya manajemen, biaya untuk pengembangan, dan biaya untuk penyuluhan dan pembinaan masyarakat.

Anggaran pengelolaan sampah Kota Malang sepenuhnya masih dari pemerintah daerah kerna belum adanya kerjasama dengan pihak swasta. Anggaran yang ada sebagian besar selalu terpakai untuk kepentingan operasional pengelolaan sampah, sedangkan masih banyak aspek lain yang harus dipenuhi. Aspek yang tidak kalah pentingnya adalah biaya untuk penyuluhan dan pembinaan masyarakat, dengan terbatasnya anggaran maka cakupan masyarakat yang akan dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pengelolaan sampah juga terbatas, hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengerti pentingnya mengelola dan memanfaatkan sampah. Selanjutnya adalah biaya untuk pengembangan, hal ini juga penting mengingat semakin banyaknya jenis sampah yang dihasilkan

oleh masyarakat tentunya juga di imbangi dengan pengembangan teknologi inovatif untuk mengolah jenis sampah yang beragam tersebut, namun hal ini tidak bisa diwujudkan karena terbatasnya anggaran.

Salah satu usaha agar anggaran yang ada tidak selalu terserab habis oleh operasional adalah dengan memanfaatkan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya, yaitu di tingkat rumah tangga. Jika sampah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin maka akan mengurangi volume timbulan sampah di TPS yang akan dibuang ke TPA. Berkurangnya volume sampah yang akan di angkut ke TPA otomatis akan mengurangi biaya operasional untuk pengangkutan atau pembuangan sampah dan bisa digunakan untuk penganggaran aspek yang lainnya. Untuk mewujudkan itu semua tentu perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, yang terjadi di kota malang partisipasi masyarakat masih kurang sehingga menyebabkan pengelolaan sampah kota Malang berkembang dengan sangat lambat.

Selanjutnya untuk memperkuat *focal concern* maka penulis akan mengidentifikasi *driving forces*. *Driving forces* merupakan alat yang membantu memutuskan faktor-faktor apa saja yang akan memberikan hasil yang signifikan dan faktor-faktor apa saja yang tidak. Berdsarkan wawancara mendalam dan telah melakukan observasi maka *driving forces* yang dianggap sangat signifikan dalam mempengaruhi persoalan pengelolaan sampah di Kota Malang adalah faktor politik, sosial, ekonomi dan teknologi.

Faktor politik, bagaimanapun proses kebijakan termasuk kebijakan pengelolaan sampah selalu berkaitan dengan kondisi politik yang mempengaruhinya. Sebuah teori yang pernah berkembang tentang ekonomi politik pernah mengemukakan dengan ide pokok bahwa pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah politik dengan serangkaian keputusan politik dan lobi-lobi politik yang terjadi, khususnya pada negara demokrasi seperti Indonesia. Faktor politik yang mempengaruhi bisa terlihat pada penganggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah. Dalam perspektif mikro, kebijakan anggaran daerah adalah merupakan keputusan politik yang ditetapkan kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah. Sebagai keputusan politik Kebijakan anggaran sering melalui proses politik yang panjang dan kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang dilibatkan, baik sebagai perencana, pelaksana maupun penerima manfaat kebijakan anggaran.

Faktor ekonomi, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru adalah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Persepsi masyarakat mulai berubah tentang sampah, dimana sampah sekarang bukan lagi menjadi barang kotor yang menjijikan dan

harus dibuang. Pola pandang masyarakat sudah melihat sampah sebagai barang yang bisa dimanfaatkan sehingga bernilai ekonomis. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah meamanatkan bahwa sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat bersama. Selama ini pemerintah sudah kesulitan dalam penanganan masalah sampah, maka oleh kerna itu untuk meringankan beban pemerintah dalam mengelola sampah, maka diperlukan peran aktif masyarakat untuk ikut mengelola sampah secara profesional, dan ditangani secara komersial sebagai suatu usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Masyarakat Kota Malang sendiri pada saat ini sudah mulai memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang yang bernilai ekonomis. Sampah organik dimanfaatkan untuk dijadikan kompos dan untuk budidaya cacing, sedangkan sampah anorganik dikumpulkan untuk di daur ulang dan dijadikan untuk bahan kerajinan. Untuk mendukung usaha dari masyarakat dalam mengolah sampah maka pemerintah Kota Malang mendirikan BSM sebagai wadah untuk membina, mengumpulkan, dan mengelolaa sampah rumah tangga.

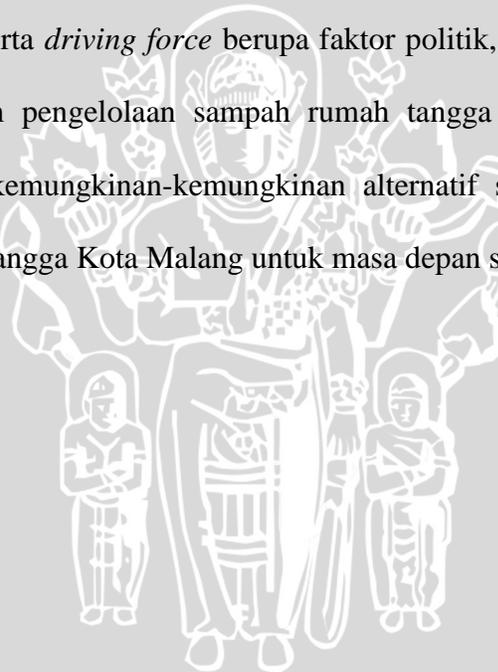
Faktor sosial, masyarakat merupakan aktor utama dalam penghasil sampah, semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi volume sampah yang dihasilkan. Begitu juga Pertumbuhan pembangunan dan teknologi yang pesat menyebabkan semakin banyaknya jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pergerakan perkembangan zaman yang semakin cepat dalam era globalisasi seperti teknologi, populasi, lingkungan telah

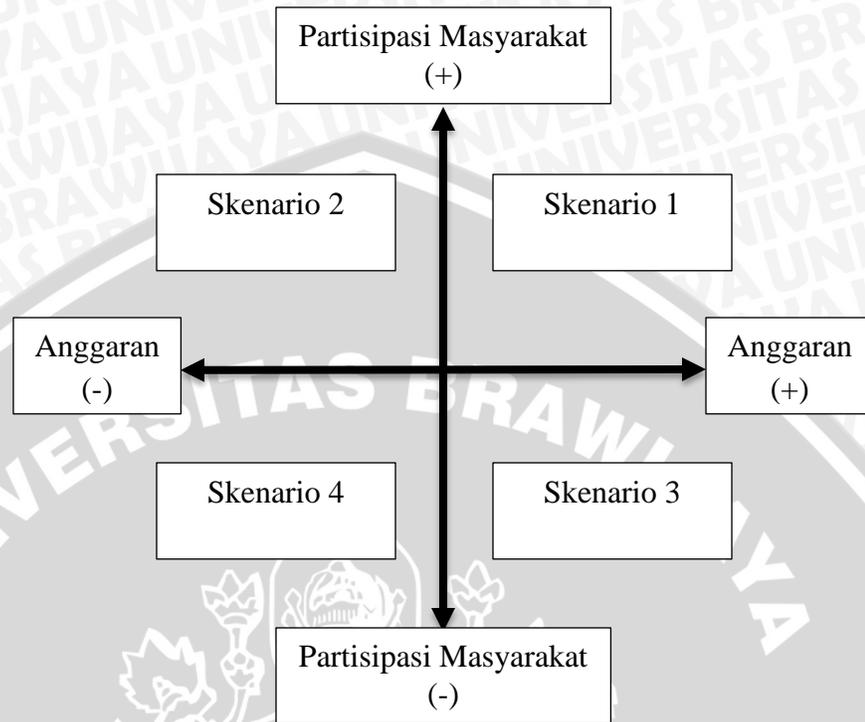
mengakibatkan bergesernya gaya hidup mengikuti perubahan zaman yang terjadi. Gaya hidup konsumtif merupakan salah satu akibat invansi globalisasi yang terjadi di Indonesia. Gaya hidup yang konsumtif itulah yang menyebabkan berkembang pesatnya pertumbuhan volume sampah setiap tahunnya. Parahnya perubahan gaya hidup seperti ini juga diikuti dengan gaya hidup yang tidak peduli dengan lingkungan. Gaya hidup seperti ini diperkirakan akan berlangsung di masa depan yang bila tidak ditangani dengan baik akan berakibat buruk pada lingkungan. Selanjutnya cara pandang, dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah cara pandang seseorang terhadap sampah akan menentukan bagaimana kebijakan pengelolaan sampah akan mengarah. Tren dimasa depan adalah masyarakat telah menyadari bahwa sampah jika diolah dengan benar akan memiliki nilai ekonomis. Namun kesadaran tersebut tak lantas merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Malang. Budaya yang telah mengakar kuat dan kebiasaan yang telah melekat menyebabkan sulitnya mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Faktor teknologi, Pengelolaan sampah pada masyarakat perkotaan bertambah lama bertambah kompleks sejalan dengan kekomplekan masyarakat itu sendiri. Dibutuhkan keterlibatan beragam teknologi dan beragam disiplin ilmu, termasuk di dalamnya teknologi-teknologi yang terkait dengan bagaimana mengontrol timbulan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, pembuangan akhir sampah yang dihasilkan

pada masyarakat tersebut. Trennya pada saat ini dan masa yang akan datang sampah dimanfaatkan sebagai penghasil energi. Untuk mengubah sampah menjadi energi tentunya menggunakan teknologi yang sudah canggih ataupun alat-alat yang di disain khusus. Kota Malang sendiri sudah mencoba memanfaatkan sampah untuk dijadikan energi, yaitu dengan penyulingan sampah menjadi gas metan. Ketersediaan teknologi berperan penting dalam kemana arah kebijakan akan dibawah.

Berdasarkan dua *focal concern* berupa anggaran dan partisipasi masyarakat beserta *driving force* berupa faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dalam pengelolaan sampah rumah tangga kota Malang, maka dapat disusun kemungkinan-kemungkinan alternatif skenario pengelolaan sampah rumah tangga Kota Malang untuk masa depan seperti dibawah ini:





Gambar 11 skenario kebijakan pengelolaan sampah Kota Malang

Sumber: Peneliti

Berdasarkan gambar diatas terdapat 4 skenario yang didapatkan dari *focal concern* yang dominan, antara lain:

1) Skenario 1

Skenario 1 menunjukkan kondisi dimana sumber anggaran mendukung dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Skenario ini menggambarkan pemerintah daerah maupun pusat sadar bahwa sampah merupakan permasalahan strategis yang perlu ditangani dengan serius. Pengelolaan sampah menjadi program pemerintah yang sangat penting yang harus dilakukan terpadu oleh semua

pihak. Pengelolaan sampah harus memiliki manfaat ekonomi dan lingkungan serta harus dapat mengubah perilaku masyarakat. Sampah sebagai barang yang memiliki manfaat ekonomi tidak lagi hanya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang tetapi sudah dilakukan pengolahan, yang mana membutuhkan anggaran lebih. Pemerintah melihat pengelolaan sampah tidak hanya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, namun juga sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah dengan ketersediaan anggaran dapat membuat program-program sebagai strategi untuk pengelolaan sampah.

Skenario 1 juga menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Skenario 1 menggambarkan bahwa dimasa depan persepsi masyarakat tentang sampah berubah, dimana masyarakat sadar pentingnya pengelolaan sampah, yang kemudian mendorong perilaku masyarakat dalam mengelola sampah agar kebersihan lingkungan dapat terus terjaga. Bukan hanya mengenai kebersihan lingkungan, namun masyarakat melihat peluang bahwa sampah memiliki nilai ekonomi jika diolah dengan baik. Persepsi masyarakat tentang sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat tentang cara mengelola sampah, sedangkan pengalaman adalah apa yang pernah di alami pada masa lalu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti proses pembelajaran cara-cara mengolah sampah pada suatu penyuluhan ataupun

praktik pengelolaan sampah yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat. Persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa sampah perlu diolah maka akan ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Skenario ini merupakan skenario terbaik dimana anggaran dan partisipasi masyarakat sama-sama mendukung. Trennya dimasa mendatang adalah memanfaatkan sampah sebagai energi, berbagai program sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, seperti memanfaatkan sampah menjadi bahan bakar dan juga sebagai pembangkit listrik. Anggaran yang cukup akan mendukung berjalannya program-program pemerintah tersebut dengan baik. Selain sebagai energi, sampah juga dimanfaatkan untuk didaur ulang. Proses daur ulang ini didukung dengan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik.

Beranjak dari *focal concern*, *driving force*, dan tren dimasa depan beserta visi DKP Kota Malang dalam pengelolaan sampah maka arah skenario ini adalah memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif berupa biogas dan pembangkit tenaga listrik, serta memanfaatkan sampah sebagai penunjang ekonomi lokal melalui BSM. Dalam upaya untuk menanggulangi timbulan sampah pada tempat pembuangan sementara maka sampah diproses semaksimal mungkin di

sumbernya. Sampah organik dijadikan bahan dasar untuk pembuatan biogas dan pembuatan pupuk organik maupun untuk budidaya cacing. Sementara itu sampah anorganik dijual masyarakat ke BSM.

2) Skenario 2

Pada skenario 2 menunjukkan bahwa masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, namun tidak didukung dengan ketersediaan anggaran. Skenario ini menggambarkan bahwa dimasa depan sampah bukan lagi barang menjijikan yang tidak berguna dan harus dibuang. Sampah dimanfaatkan sebagai barang penunjang perekonomian bagi masyarakat. Trennya pada saat ini dan masa depan adalah *recycle* (daur ulang), pemanfaatan kembali barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang memiliki seni dan bernilai jual. Skala rumah tangga, daur ulang dilakukan dalam bentuk menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai sebagai penunjang perabotan, seperti membuat pot bunga dari barang yang tidak terpakai dan juga memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan kerajinan tas sehingga bernilai ekonomi. Dalam skala besar, sampah sekarang didaur ulang dengan teknologi yang lebih canggih sehingga menjadi barang yang bisa dipakai kembali.

Pada sisi lain dalam skenario 2, terdapat anggaran yang tidak mendukung. Hal ini menggambarkan dimasa depan pemerintah kurang mendapatkan dukungan secara politis, dengan serangkaian keputusan politik dan lobi-lobi politik yang panjang dan kompleks. Terlebih lagi pada saat ini banyak terjadi korupsi di kepala daerah, hal ini

mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penganggaran sebuah program, kerna terjadi ketidakpercayaan terhadap pengguna anggaran.

Meskipun pada skenario ini kecendrungan partisipasi masyarakat akan menunjukkan kondisi yang optimis melalui perubahan paradigma yang mempersepsikan sampah perlu diolah dan mempunyai potensi ekonomi, namun kondisi tersebut tidak diiringi dengan anggaran yang memadai dari pemerintah. Partisipasi masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasaran. Hal ini menjadi sangat penting karena Sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah. Pemerintah perlu menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menampung sampah yang sudah di olah oleh masyarakat.

Pada skenario ini, langkah yang peneliti anggap cocok yang harus diambil oleh pemerintah adalah dengan mengajak pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Skenario ini menekankan sinergisitas pemerintah dengan swasta dalam upaya untuk menutupi kekurangan anggaran yang dialami oleh pemerintah. Sinergisitas pemerintah dan swasta dimisalkan menyerahkan pengelolaan TPA kepada pihak swasta sehingga pemerintah bisa fokus kemasalah yang lain dalam pengelolaan sampah.

3) Skenario 3

Pada skenario 3 menunjukkan bahwa tersedianya anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Skenario

ini menggambarkan pergerakan perkembangan zaman yang semakin cepat dalam era globalisasi seperti teknologi, populasi, lingkungan telah mengakibatkan bergesernya gaya hidup mengikuti perubahan zaman yang terjadi. Gaya hidup konsumtif menjadi tren dimasa mendatang dan parahnya lagi gaya hidup ini di ikuti dengan perilaku yang tidak peduli terhadap lingkungan. Gaya hidup di era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan kurangnya sosialisasi diantara masyarakat, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri dan tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah pada masyarakat akan sangat sulit dikarenakan kehidupan sosial yang tertutup.

Sisi lain pada skenario ini adalah ketersediaan anggaran, sama dengan skenario pertama pemerintah sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Penganggaran pengelolaan sampah tidak lagi beradah pada prioritas yang rendah dalam skala anggaran sebuah kota. Kemungkinan dimasa depan akan terjadi sinergisitas antara pemerintah daerah maupun pusat dengan pihak swasta. Seperti yang ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc bahwa dimasa mendatang pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah (23 juni 2015, ww.menlh.go.id). Kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, akan menghemat pengeluaran anggaran dari pemerintah.

Pada skenario ini, peneliti menginginkan pemerintah dengan ketersediaan anggaran menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, skenario ini juga menginginkan pemerintah menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam pengelolaan sampah, guna menangani sampah yang begitu kompleks kerna tidak adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sampah.

4) Skenari 4

Skenario 4 merupakan skenario terakhir, skenario ini menunjukkan kondisi dan kecendrungan yang pesimis, dimana anggaran dan partisipasi masyarakat tidak mendukung dalam pengelolaan sampah. Skenario ini menggambarkan dimasa depan keadaan pengelolaan sampah makin memprihatinkan, dikarenakan semakin tingginya lonjakan pertumbuhan penduduk terutama di Kota Malang sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Selain pertambahan penduduk yang tinggi di iringi dengan perkembangan era globalisasi yang membuat masyarakat menjadi konsumtif yang nantinya akan menyebabkan tinginya pertumbuhan volume sampah di Kota Malang. Semakin tingginya pertumbuhan volume sampah membuat anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bisa menutupi biaya untuk pengelolaan sampah yang sudah semakin besar volumenya. Hal ini diperparah lagi dengan keadaan masyarakat yang

konsumtif dan tidak peduli terhadap lingkungan apalagi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Skenario ini merupakan skenario terburuk, tetapi dengan melihat perkembangan pengelolaan sampah yang terjadi saat ini dimana setiap daerah sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan pengelolaan sampah terpadu dan di dukung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menegaskan kepada setiap daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan sampah terpadu. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa skenario ini bukanlah skenario yang tepat terjadi dimasa depan. Namun demikian, skenario ini masih dapat terjadi apabila pemerintah tidak benar-benar serius dalam penanganan pengelolaan sampah, kerna sampah merupakan barang yang akan selalu ada selama masih ada manusia di muka bumi ini. Jika kemungkinan skenario ini terjadi, maka skenario yang penulis tawarkan adalah dengan merubah undang-undang yang lebih mengikat masyarakat dalam pengelolaan sampah dan diperkuat dengan sanksi yang tegas.

c. *Imaging*

Tahap selanjutnya dalam penulisan skenario adalah *imaging*. Tahap *imaging* merupakan tahap identifikasi kemungkinan dan membangun visi mengenai apa yang diharapkan. Bagian-bagian dari TAIDA sejauh ini sudah menjelaskan mengenai kemungkinan masa depan, dan telah dilakukan pelacakan dan analisis perubahan-perubahan dan menciptakan empat

skenario alternatif untuk masa depan. Pada tahap *imaging* saatnya untuk melihat apa yang bisa kita lakukan untuk membuat gambaran masa depan yang di inginkan atau disebut dengan visi. Disinilah peneliti melibatkan diri dari apa yang peneliti inginkan dan menciptakan visi. Visi adalah gagasan positif yang dimuat dari masa depan yang diinginkan. Collins dan Porras (dalam Lindgren dan Bandhold, 2003:76) mengidentifikasi visi sebagai bayangan masa depan sebagai deskripsi yang jelas tentang apa yang akan terjadi ketika tujuan tercapai.

Melihat kemungkinan masa depan yang beranjak dari issue, bahwa tren pengelolaan sampah masa depan adalah menuju zero waste dimana sampah tidak tersisa sama sekali dan dimanfaatkan untuk menciptakan energi alternatif. Serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dimana masyarakat sekarang mengaggap sampah mempunyai potensi untuk diubah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu peneliti optimis kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan adalah mengarah pada skenario 1, dimana skenario satu menggambarkan masyarakat dan pemerintah bersama-sama menanggulangi permasalahan sampah. sebagai gagasan yang positif untuk masa depan maka peneliti mempunyai visi pengelolaan sampah Kota Malang menuju *zero waste* dengan pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif dan pemberdayaan ekonomi lokal. Visi yang telah penulis rumuskan akan mendukung visi yang telah dirumuskan oleh DKP sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan

sampah, yang mana visinya tersebut adalah mewujudkan kota malang sebagai kota yang bersih, nyaman, asri dan ijo royo-royo menuju malang berkicau.

d. *Deciding*

Langkah selanjutnya dalam TAIDA adalah *deciding*. *Deciding* adalah fase di mana semuanya disatukan. Keadaan masa depan ditelusuri dan dianalisis berdasarkan visi. Pada tahap ini dilakukan pengambilan keputusan mengenai skenario apa yang akan diambil sebagai alternative kebijakan dan strategi apa yang digunakan untuk menghadapi ancaman dan mencapai *vision* dan *goals*.

Berdasarkan 4 skenario yang telah peneliti paparkan diatas, kondisi yang mungkin terjadi dan dianggap paling sesuai dengan kondisi Kota Malang di masa depan adalah skenario 1, namun kecendrungan yang terjadi saat sekarang ini malah menunjukkan kondisi skenario 4. Skenario 4 ini memperlihatkan kondisi dimana *focal concern* dan *driving force* pembentuk kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan kearah pesimis. Dimana anggaran dan partisipasi masyarakat tidak mendukung. Partisipasi masyarakat yang tidak mendukung dalam pengelolaan sampah yang diprediksi pada skenario 4 terlihat dari lemahnya undang-undang yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah namun tidak ditindaklanjuti dengan sangsi yang tegas maupun usaha dari

pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini juga bisa dilihat dari sedikitnya jumlah masyarakat Kota Malang yang ikut berpartisipasi yang terdaftar dalam nasabah BSM. Selanjutnya mengenai keterbatasan anggaran, penganggaran pengelolaan sampah selalu berada pada prioritas yang rendah dalam skala anggaran sebuah kota. Anggaran selalu terserap habis oleh operasional, sehingga untuk melaksanakan program-program lain pemerintah selalu mencari sponsor dari BUMN maupun pihak lain.

Melihat kondisi pengelolaan sampah Kota Malang saat ini yang mengarah pada kondisi skenario 4, namun demikian penulis tetap optimis bahwa kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan mengarah pada kondisi skenario 1, tentunya dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang bisa mengarahkan pada skenario 1 tersebut.

Pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dapat berupa pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik dalam proses pewadahan, atau melalui pembuatan kompos dalam skala keluarga dan mengurangi penggunaan barang yang tidak mudah terurai. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam proses pelaksanaan mengelola sampah, tetapi juga ikut serta menjadi anggota organisasi yang berkaitan dengan masalah sampah yang berperan dalam merencanakan sistem pengelolaan sampah yang baik.

Peneliti menemukan terdapat dua bentuk partisipasi masyarakat dalam penelitian ini. Pertama, partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, dan yang kedua, partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah hingga mempunyai nilai ekonomi. Peneliti menyadari, bahwa tidak mungkin setiap masyarakat kota Malang akan mengelola sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, namun sebagian hanya berpartisipasi dalam pemilahan sampah sehingga memudahkan pemerintah untuk pemrosesan selanjutnya.

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengamanatkan Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, dan/atau sifat sampah. Untuk mewujudkan hal tersebut, peneliti membuat skenario yang nantinya diharapkan dijalankan oleh pemerintah, skenarionya seperti berikut;

- Pemerintah mewajibkan pada setiap rumah tangga menyediakan dua wadah tempat penampungan sampah berupa wadah untuk sampah organik dan wadah untuk sampah anorganik.
- Pengumpulan sampah rumah tangga merupakan kewajiban dari kelurahan, oleh kerna itu pemerintah mewajibkan setiap kelurahan

untuk menggunakan gerobak pegumpul sampah dengan gerobak yang terdapat pemisah antara sampah organik dan anorganik.

- Untuk menghindari adanya masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah yang mereka hasilkan sendiri, maka sebagai sangsisnya sampah tersebut tidak diangkut oleh petugas sampah.
- Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan sampah anorganik yang telah mereka pilah, maka pemerintah melalui BSM membentuk unit-unit BSM disetiap kelurahan. Masyarakat bisa menjadikan sampah anorganik menjadi barang yang bernilai ekonomis.
- Dan juga, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan kompos dan untuk bahan budidaya cacing maka bisa bekerjasama dengan pihak DKP dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan oleh DKP.

Selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam upaya mewujudkan terciptanya kondisi skenario 1 dimasa depan adalah dengan memperbaiki anggaran. Anggaran merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan sampah di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatakan Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dalam hal

ini pemerintah Kota Malang dengan keterbatasan anggaran, sebaiknya melakukan kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.

Skenario yang peneliti inginkan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah, jika kondisi ini bisa dicapai dan terlaksana oleh pemerintah Kota Malang, maka peneliti optimis dimasa depan akan mengarah pada kondisi skenario 1. Skenario ini menginginkan dimasa depan sampah dimanfaatkan sebagai energi alternatif dan sebagai pemberdayaan ekonomi lokal. Hal tersebut didukung oleh partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, memanfaatkan sampah sebagai energi alternatif.

- Pengelolaan sampah menjadi energi biogas dan/atau listrik tidak hanya dilakukan di TPA, namun dilakukan disetiap kecamatan di Kota Malang. Hal ini bertujuan, untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat kota Malang.
- Pemerintah menyediakan lahan disetiap kecamatan untuk dijadikan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
- Pemerintah melakukan kemitraan dengan pihak swasta dalam mengkonvensi sampah menjadi energi alternatif. Kerjasama dilakukan

dalam bentuk pengadaan teknologi dan pengoperasiannya dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian.

- Operasionalnya, sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat dari sumbernya dibawa petugas kebersihan ke TPS. Sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan dibawa ke BSM, dan sampah organik dibawa ke TPST untuk dikonvensi menjadi energi. Sampah hasil buangan dari usaha mengkonvensi ke energi, baru selanjutnya di buang ke TPA.

Kedua, memanfaatkan sampah untuk pemberdayaan ekonomi lokal.

- Masyarakat mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos dan sebagai bahan untuk budidaya cacing.
- Dan memanfaatkan sampah anorganik untuk dijadikan kerajinan yang memiliki seni dan bernilai jual, serta juga dimanfaatkan untuk dijual ke BSM.
- Operasionalnya, masyarakat melakukan pemilahan sampah skala rumah tangga, dipilah sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dijual ke BSM maupun ke unit-unit BSM yang ada di kelurahan, sedangkan sampah organik dijadikan kompos dan budidaya cacing, baik individu maupun kelompok.

Indikator skenario

- Pengelolaan sampah menuju ke arah *zero waste*, dimana sampah dari sumbernya dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga sampah yang masuk ke TPA persentasenya relatif kecil.

- *Waste to energy*, bisa mengatasi krisis energi. Apalagi saat sekarang ini harga beli gas maupun listrik selalu mengalami kenaikan yang menyulitkan masyarakat.

Peningkatan peluang usaha, pengelolaan sampah dengan mengikutsertakan masyarakat dapat membantu perekonomian lokal.

e. *Acting*

Langkah terakhir dalam TAIDA adalah *acting*. *Acting* diartikan sebagai langkah untuk menempatkan strategi yang telah diputuskan ke dalam sebuah tindakan. Pada tahap *deciding* telah dipilih kemungkinan skenario yang akan terjadi di masa depan dan telah dibuat strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Maka pada tahap *acting* dibuat sebuah tindakan yang akan mendukung terwujudnya skenario 1 yang di inginkan dimasa depan. Tahap ini merupakan tahap implementasi strategi yang telah mengintegrasikan skenario sekaligus tahap pembelajaran organisasi atau institusi untuk terus menyesuaikan diri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindakan yang harus diambil adalah sebagai berikut:

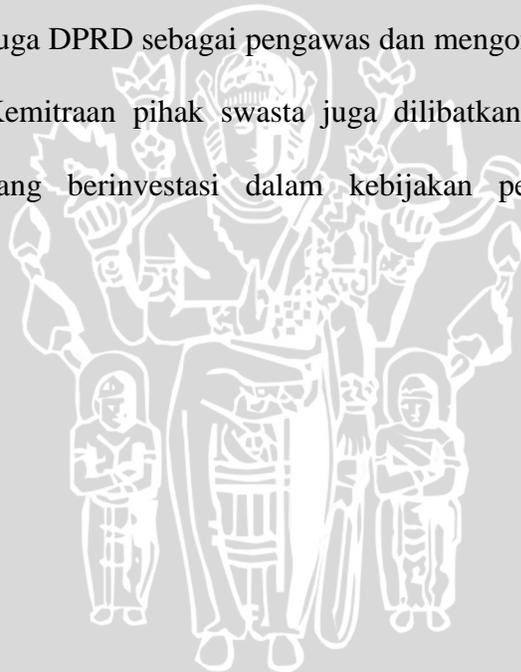
- Perlunya pemerintah melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimitrakan dengan dunia usaha seperti perizinan, kemudahan investasi, proses tender, pengelolaan aset pemerintah dan prosedur kerjasama pemerintah dan swasta.

- Dalam rangka penggunaan teknologi tinggi untuk pengelolaan sampah oleh Pemda, pemerintah pusat perlu membuat standar teknologi pengelolaan sampah yang meliputi antara lain jenis teknologi, spesifikasi, keunggulan dan kelemahan, serta estimasi nilai investasi dan operasionalnya.
- Dibutuhkan peraturan-peraturan untuk mendukung pengelolaan sampah menjadi energi (*waste to energy*).
- Pemerintah melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat yang ingin mengolah sampah menjadi kompos dan budidaya cacing. Serta mengenalkan jenis-jenis sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan beserta cara untuk mendaur ulang.
- Pemerintah mendirikan unit-unit BSM disetiap kelurahan untuk menampung sampah hasil olahan masyarakat.
- Memfasilitasi terbentuknya Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Pemerintah perlu memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah.

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengamanatkan Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran tersebut berupa pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta dapat berpartisipasi dalam perumusan

kebijakan pengelolaan sampah. Penulisan penelitian ini merupakan salah satu bentuk partisipasi peneliti dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan membuat skenario kebijakan untuk pengelolaan sampah.

Selanjutnya, keseluruhan dari skenario akan dikonsultasikan kepada pihak pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait. Dalam pengelolaan sampah Kota Malang maka pihak-pihak tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, serta pemerintah kota sebagai perumus kebijakan dan juga DPRD sebagai pengawas dan mengontrol kebijakan yang telah dibuat. Kemitraan pihak swasta juga dilibatkan sebagai pemangku kepentingan yang berinvestasi dalam kebijakan pengelolaan sampah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh di lapangan serta dari penelitian dan pembahasan mengenai skenario kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Malang yang telah dipaparkan secara mendalam melalui penyajian data dan analisis data maka terdapat dua simpulan yang diberikan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1. Berdasarkan potret kebijakan pengelolaan sampah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kondisi pengelolaan sampah saat sekarang ini sudah mengarah pada pengelolaan sampah terpadu. Sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengikut sertakan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang adalah dengan pengelolaan sampah dalam tiga tingkatan, yaitu pengelolaan sampah tingkat hulu, tingkat antara, dan tingkat hilir. Pengelolaan sampah tingkat hulu dilaksanakan dengan meluncurkan program-program seperti mendirikan BSM, kompos dan budidaya cacing yang dibuat masyarakat, mengadakan lomba lingkungan bersih dan pemberdayaan kader lingkungan. Program-program seperti BSM, kompos dan budidaya cacing belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

sampah, sedangkan melihat dari program-program tersebut untuk berjalan dengan baik sangatlah menuntut partisipasi dari masyarakat. Sedangkan untuk lomba lingkungan bersih, sedikit banyaknya sudah membantu mewujudkan kota sampah bebas dari sampah, namun hal ini bersifat musiman. Pengelolaan sampah tingkat antara dilakukan di TPS, kegiatan ini berupa pemilahan sampah organik dan anorganik melalui pemberdayaan pemulung dan pembuatan kompos di TPS 3R. Hal ini peneliti nilai juga kurang membantu dalam mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA, dikarenakan pemulung hanya memanfaatkan sampah anorganik yang dianggap mereka mempunyai nilai ekonomis, sedangkan untuk pengomposan di TPS 3R bahan utamanya seperti sampah anorganik yang sudah tercampur di TPS sulit untuk dipilah. Terakhir, pengelolaan tingkat hilir, yakni di TPA Supiturang. Sampah dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi gas metan dengan sistem *landfill*, yang mana sedikit banyaknya sudah bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar TPA. Sistem *landfill* masih belum mengarah pada *sanitary landfill* seperti yang diamanatkan undang-undang, hal ini dikarenakan biayanya yang cukup besar.

Melihat dari teknik operasionalnya, pengelolaan sampah dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan. Masyarakat diberi tanggungjawab untuk menyediakan wadah penampungan sampah dan selanjutnya setiap kelurahan diberi tanggungjawab untuk mengumpulkan sampah sampai pada TPS, sampah yang sudah terkumpul di TPS menjadi tanggung jawab DKP untuk diangkut ke TPA.

Pengelolaan sampah kota Malang saat ini sudah mempunyai dampak yang positif baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sosial, masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dan ikut berpartisipasi, selain itu Kota Malang juga meraih Penghargaan Adipura Kencana yang merupakan penghargaan di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ekonomi, masyarakat sudah mulai memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis, pada TPA sampah juga telah dimanfaatkan untuk energi alternatif dengan penangkapan gas metan. Lingkungan, program-program pengelolaan sampah yang telah dilakukan sedikit banyaknya sudah merubah wajah kota Malang menjadi lebih baik.

2. Berdasarkan potret pengelolaan sampah Kota Malang saat sekarang ini serta analisa yang dilakukan, pada tahap *tracking* peneliti menemukan bahwa masalah utama dari pengelolaan sampah adalah anggaran dan partisipasi masyarakat. Anggaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama yang menentukan pembentukan skenario kebijakan pengelolaan sampah untuk masa depan. Melalui tahap *analysing* peneliti membangun empat skenario yang mungkin terjadi di masa depan, empat skenario ini didasarkan dari *focal concern* yaitu partisipasi masyarakat dan anggaran. Skenario 1 merupakan skenario yang peneliti pilih karena sesuai dengan kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan di Kota Malang. Skenario ini mengasumsikan bahwa kecenderungan partisipasi masyarakat dan anggaran mengarah pada kondisi optimis. Untuk mewujudkan

tercapainya kondisi skenario 1 dimana sampah dimanfaatkan sebagai energi alternatif dan sebagai pemberdayaan ekonomi lokal, maka harus ditetapkan beberapa langkah dan strategi, antara lain pada sumbernya sampah dikelola semaksimal mungkin dengan melakukan pemilahan, pelengkapan sarana dan prasarana, pemberian sanksi bagi rumah tangga yang tidak memilah sampah, kemitraan dengan pihak swasta. Pelaksanaan yang efektif dari strategi yang disarankan sangat penting untuk mencapai skenario pengelolaan sampah yang diinginkan di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran.

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah haru dapat melengkapi sarana dan prasara dalam pengelolaan sampah secara merata ke setiap daerah di Kota Malang serta melakukan sosialisasi pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Skenario merupakan alat yang tepat untuk menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dalam pengelolaan sampah Kota Malang. Skenario membantu memetakan kemungkinan-kemungkinan dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi ketidakpastian masa depan. Melalui skenario yang peneliti kemungkakan sudah seharusnya pemerintah

mengembangkan potensi sampah kearah peningkatan nilai ekonmi. Sehingga pengeluaran untuk pengelolaan sampah harus diseimbangkan dengan apa yang bisa dihasilkan dari sampah baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publi*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basriyanta. 2007. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. 2011. *Teknologi Pengelolaan Sampah*. Bandung: ITB
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fahey, Liam dan Robert M Randall. 2008. *Learning From The Future: Competitive Foresights Scenario*. Toronto: John Wiley & Sons, Inc
- Heijden, Kees Van Der. 2005. *Scenarios: The Art of Strategic Conversation*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Erlangga
- Lindgren, Mats dan Hans Bandhold. 2003. *Scenario Planning: The Link Between Future and Strategy*. Hampshire: Palmgrave Macmillan
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasir, M. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Ghalia
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Ringland, Gill. 2002. *Scenarios in Public Policy*. UK: John Wiley and Sons Ltd, Baffine Lane, Chichester, West Sossex PO 19 HID
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan-peraturan

Peraturan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Internet/Website

<http://dkp.malangkota.go.id>

<http://www.menlh.go.id>

<http://banksampahmalang.com>

<http://www.greeners.co/>



LAMPIRAN

Curriculum Vitae

Nama : Ikhwan Alfikri
Tempat, Tanggal Lahir : Koto Panjang, 18 Mei 1992
Nim : 105030101111115
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Alamat Asal : Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan
Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
Alamat Malang : Perum Landungsari Indah Blok E No.7
Email : Ikhwan.alfikri@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal : 1. SDN 07 Kabupaten Sijunjung (1999-2004)
2. SMPN 02 Kabupaten Sijunjung (2004-2007)
3. SMAN 01 Kabupaten Sijunjung (2007-2010)

